

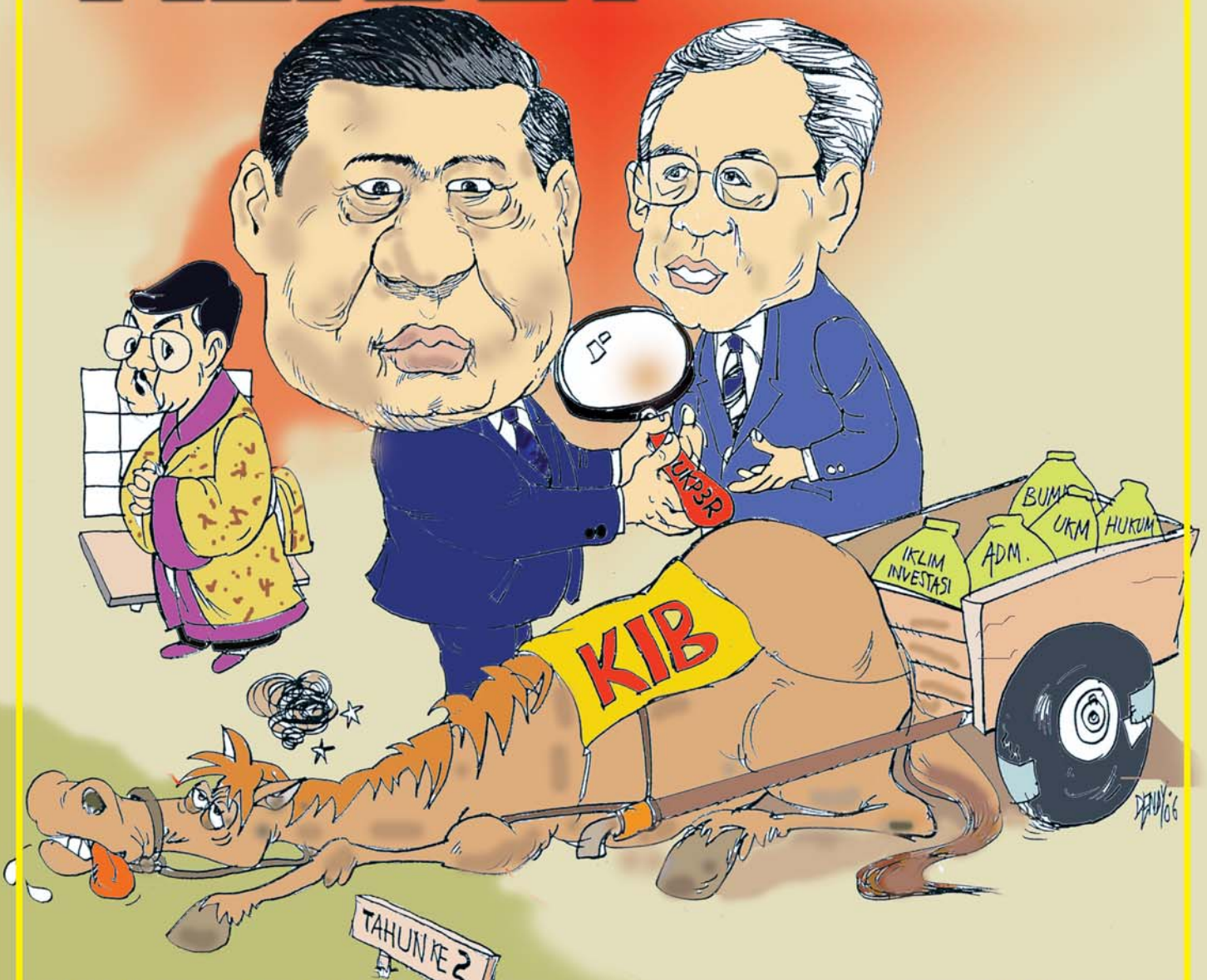
INTERDEPENDENSI, FITRAH KEHIDUPAN MANUSIA

BERITA INDONESIA[®]

EDISI 25 TAHUN II ★ 03 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2006

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

TIDAK SEMUA MERAH



UNDANGAN TERBUKA



MUSYAWARAH NASIONAL KE-3
IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH



UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
MENUJU WORLD CLASS UNIVERSITY

50Th
BERSAMA
M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

di
Auditorium Utama
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sabtu, 18 November 2006
Jam : 08.00 WIB s.d. Selesai

"Menyambut 50 Th. ADIA-IAIN-UIN (1957-2007)"

Ketua IKALUIN

Rektor UIN

AS. Panji Gumilang

Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA

Informasi : Jl. Ir. H. Djuanda No. 95 Jakarta 15412 Telp. (021) 749 4106

Contact Person : Rony Basti : 0815 8455 3006. Susan Savia : 0815 1469 1122, Halimah : 0818 800 240



Sampul/Illustrasi:
Dendy Hendrias

Edisi No. 25/Th.IV/ 03-23 November 2006

DARI REDAKSI 4
 SURAT KOMENTAR 5
 HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 7
 BERITA TERDEPAN 12
 VISI BERITA 13

BERITA UTAMA

RAPOR SBY TIDAK SEMUA MERAH

Kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang, memasuki tahun ketiga menuai kritik. Di antara banyak kemajuan yang dicapai, publik masih menagih janji untuk menciptakan perubahan, terutama di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Kemiskinan dan pengangguran masih membayangi perjalanan pemerintahan SBY ke depan 14



Kontrak Politik Versus Realitas Politik 18
 UKP3R Diminta Berhenti Sebelum Melangkah .. 31

BERITA NASIONAL

Darah Kembali Tumpah di Poso 39



LENTERA

KHUTBAH 'IED AL-FITRIH 1427 H/2006 M

INTERDEPENDENSI, FITRAH KEHIDUPAN MANUSIA

Beraktivitas untuk mencapai masa depan yang terhormat, memerlukan pengendalian diri, masing-masing pada proporsinya. Itulah wujud saling ketergantungan satu dengan lainnya (interdependensi) dalam beraktivitas. Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang mengemukakan hal itu pada Khutbah 'Ied al-Fithri 1427 H/2006 M, di Kampus Al-Zaytun, pada tarikh 01 Syawal 1427 H (24 Oktober 2006 M). 32

BERITA KHAS

Mudik Lebaran Cermin Sukses dan Prestise 40

BERITA HANKAM

Bukan Terbesar Tapi Terbaik 43

BERITA EKONOMI

Negara Banyak Dirugikan Kontraktor Migas 44



Fungsi Intermediasi Perbankan Jalan di Tempat ... 46
 Genjot Pertumbuhan Kredit 47

BERITA MANCANEGARA

Saling Menjatuhkan Lewat Iklan Politik 50
 Tiga Iklan Politik 'Terpanas' 51

BERITA IPTEK

Menguak Misteri Leonardo da Vinci 52
 Rahasia Mona Lisa 53

BERITA FEATURE

Teguh Pada Pilihan Hidupnya 54
 Pekerja Keras yang Tidak Mudah Menyerah 55

BERITA HUMANIORA

Psikopat di Sekitar Kita 56

BERITA DAERAH

Petani Tanpa Sawah 58



Meneliking Pengedar Narkoba 59
 BE 200 Mulai Beraksi 60
 Hutan Dibabat, Malinau Kiamat 61
 Lintas Media Daerah 62

BERITA HUKUM

Syarat Untuk Tommy 63
 Sang Koruptor di Televisi 64
 Daan Menolak Hamid 64

BERITA PEREMPUAN

Perempuan di Balik Layar Perak 65

BERITA OLAAHRAGA

Hayden Juara Dunia Sejati 66



Sepak Bola ke AG 2006 Tanpa Target 66



BERITA TOKOH

Hatta Radjasa 48

Pemimpin Umum:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:
Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:
MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Syahbuddin Hamzah
Dandy Hendrias
Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (Liputan, Litbang & Pusdat):
Syahbuddin Hamzah (Redaktur Eksekutif)
Mangatur Lorieclide Paniroy (Wakil Redaktur Eksekutif)

Sekretaris Redaksi:
Retno Handayani

Redaktur:
Suryo Pranoto
Haposan Tampubolon

Staf Redaksi:
Samsuri
Nawawi
Ikhwani Triatmo
Sarjiman
Henry Maruwas
Christlan Natamado
M Subhan
Sanita Retmi
Amron Rilonga

Wartawan Foto:
Wilson Edward

Redaktur Bahasa dan Pracetak:
Marjuka Situmorang
Mangatur Lorieclide Paniroy

Desainer:
ESERO Design, Arief Maulana

Biro Redaksi:
Medan: HM Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang, Purwakarta: Benhard Sihite,
Tarakan: Sudirman Leonard Pohan

Penerbit:
PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia
dan PT Citraprinsip Publikasindoindo

Komisaris:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/Pemimpin Perusahaan:
Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:
Samsuri

Iklan dan Promosi:
Imam Supriyanto
Watty Soetikno

Keuangan dan Umum:
Mangatur Lorieclide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:
Abdul Halim
Marjuka Situmorang

Harga:
Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:
PT Gramedia
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. 9101871

E-mail:
redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:
www.beritaIndonesia.co.id



foto: berindo wilson

Pemimpin Redaksi Majalah Berita Indonesia bersama keluarga bersilaturahmi ke Al-Zaytun pada Hari Raya Idul Fitri 1427 H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera

Sidang Pembaca yang budiman,

Pada edisi ke 25 di bulan Syawal 1427 H, yang bertepatan jatuh di bulan November 2006 ini kami sampaikan SELAMAT IDUL FITRI 1427H, MINAL AIDIN WAL FAIDZIN. Bila selama ini ada kata-kata dalam tulisan kami yang melukai hati Sidang Pembaca dan terutama Narasumber, kami mohon maaf yang dari hati yang tulus.

Sidang Pembaca, Isu kontrak politik begitu menggema usai Pemilu 2004. Semua yang terpilih dituntut untuk membuat kontrak politik. Anggota dewan dengan konstituennya, dan menteri yang terpilih dengan presidennya. Sebelum merekrut para menterinya, Presiden sudah mengatakan akan mengevaluasi kinerja para menterinya dan tidak segan-segan memecatnya. Evaluasi ternyata bukan hanya dilakukan oleh Presiden, tetapi media massa turut pula aktif melakukan sesuatu yang sangat janggal di era Orde Baru. Itu pula yang kami sajikan pada edisi kali ini namun dengan satu pesan, apa yang kami sajikan ini hanyalah sebagian kecil opini yang bisa diterima, bisa pula dianggap sambil lalu.

Dalam pengamatan redaksi, pada penghujung tahun 2006 ini, situasi politik dan keamanan dalam negeri masih banyak menarik perhatian. Sejumlah persoalan kecil bisa saja segera membesar hanya karena kecerobohan penanganan dan miskomunikasi. Misalnya, kasus *voucher* pendidikan yang dibagi-bagikan oleh Ketua DPR Agung Laksono dalam safari Ramadhannya beberapa waktu lalu menuai protes karena dianggap kampanye politik terselubung. Atau, situasi kamtibmas Poso yang semakin tidak kondusif akibat aksi teror dalam bentuk pembunuhan dan peledakan bom. Begitu pula, pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), yang dinilai sebagian kalangan akan memperlebar gap hubungan antara Presiden-Wakil Presiden.

Setumpuk persoalan bangsa ini masih menunggu untuk segera diselesaikan. Tentu kita tak perlu larut pada persoalan. Sebab pasti ada jalan keluarnya. Bangsa ini sedang membangun peradaban besar. Hal ini tertuang dalam Khutbah 'Ied Al-Fitri 1427H/2006M di Kampus Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Khutbah lengkap Syaykh Al-Zaytun, AS Panji Gumilang didahului oleh laporan pandangan mata Pemimpin Redaksi, Robin Simanullang, yang turut bersilaturahmi ke Al-Zaytun pada hari yang fitri itu.

Semoga sajian kami ini bermanfaat bagi pembaca sekali.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- http : www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/
- email : redaksi@berindo.com
- surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840
- Telp. (021) 70930474, 8293113
- (021) 83701736
- Fax. (021) 8293113, 9101871

Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Bulan kemarin saya pulang dari Qatar ke kampung halaman saya sendiri lewat Bandara Soekarno Hatta. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta setelah beres dari proses imigrasi dan pengambilan bagasi di Terminal 2, saya berjalan menuju jalan keluar. Saya melihat keluarga saya sudah menunggu di tempat penjemputan yang memang sudah diatur jauh hari sebelum kepulangan ke tanah air. Tiba-tiba petugas bandara yang berjaga di dekat pintu penjemputan secara paksa melihat pasportnya. Dia bilang coba lihat pasportnya, dan langsung bilang dengan kata-kata yang tidak profesional, "Kamu harus lewat terminal 3." Saya menjawab, "Pak

saya pekerja profesional, kebetulan saya bekerja di Dubai Airport yang tahu prosedur bandara." Namun dengan keras petugas itu berkata, "Kamu melanggar aparat?" Kemudian petugas itu mengatakan kalau mau lewat pintu sebelah sini, yaitu pintu terminal 2, harus membayar Rp 300 ribu rupiah. Dengan rasa berat hati terpaksa saya bayar uang itu daripada saya harus lewat terminal 3 yang merupakan tempat perampokan bagi para TKI selain akan menambah waktu kepulangan yang paling tidak 3 jam. Adakah aparat pemerintah bisa menertibkan Bandara Soekarno-Hatta menjadi tempat yang aman bagi seluruh orang pengguna bandara?

Abdul Rahsid,
tetengozink@hotmail.com

Pemerintah Harus Menghormati TKI

Saya merasa gerah karena dari tahun ke tahun selalu saja mendengar berita atau keluhan tentang para TKI yang merasa diperas di pelabuhan/airport tempat menaik-turunkan TKI. Kadang saya berpikir apakah semua keluhan itu dianggap bohong dan mengada-ngada saja sehingga tidak perlu ada tanggapan apalagi tindakan nyata dari pihak berwenang untuk mengatasinya secara permanen. Atau jangan-jangan kondisi

ini secara tidak tertulis sudah dianggap sesuatu yang legal. Di saat Indonesia belum pulih dari multi-krisis dan pengangguran merajalela, maka sepatutnya pemerintah lebih menghormati para TKI dengan memberi segala kemudahan dan membantu mereka supaya lebih siap bersaing dengan pekerja negara lainnya. Bagi saya, paling tidak para TKI itu berjasa membantu pemerintah dalam mengurangi masalah pengangguran. Mereka itu adalah kelompok yang tidak merecoki kue pembangunan/anggaran belanja negara RI. Saya tidak tahu bagaimana cara pandang aparat negara tentang hal ini kalau sikap aparatnya terhadap TKI seperti itu. Kalau ketika berangkat, TKI diganjal beban fiskal yang tidak bisa dianggap ringan, ketika pulang pun TKI di peras kiri-kanan. Apakah ini pertanda bahwa sebenarnya pemerintah tidak suka dan tidak mendorong warganya bekerja di luar negeri? Kalau begini, lalu insentif pekerjaan apa dan bagaimana yang akan ditawarkan kepada TKI yang mengurangi niatnya ke luar negeri? Tentu kalau ada tawaran bagus di dalam negeri mereka tidak perlu susah payah menjang risiko jadi buruh di negeri orang.

Sulaeman Herisuwendi,
sulaemanh@gmail.com

BUNG WARTO



MPSA Online

Yth Redaksi Berindo. Dalam setiap edisi cetaknya Berindo memuat Mutiara Pemikiran Syaikh Al-Zaytun (MPSA). Maka alangkah lengkap dan sempurna-lah bila saja MPSA juga dimuat di Berindo Online. Hal ini akan sangat berguna sebagai referensi bagi para pembaca situs Berindo yang wilayah jangkauannya jauh lebih luas ketimbang edisi cetak.

Tiiyansyah,
tiiyansyah@yahoo.com

Kaji Ulang Sistem Pelatnas

Sistem Pelatnas, baik untuk persiapan SEA GAMES 2007 maupun ASIAN GAMES 2008, perlu dikaji lagi secara mendalam. Sistem Pelatnas ASIAN GAMES 2006 menyisakan begitu banyak persoalan non teknis, yang menghambat persiapan teknis. Katakan saja soal pencairan dana Pelatnas yang turunnya tersendat-sendat. Sistem Pelatnas tahun ini memang berubah total dari sistem yang pernah dilaksanakan oleh KONI Pusat sebelumnya. Dulu, seluruh kontrol Pelatnas berada di tangan KONI Pusat, sehingga persoalan dana jarang sekali mencuat ke permukaan, karena birokrasinya lebih mudah. Sedangkan sistem yang baru, menempatkan Pengurus Besar cabang olahraga sebagai pengontrol penuh

jalannya pemusatan latihan para atletnya, termasuk penggunaan dananya. Masalah yang timbul dengan sistem ini adalah terhambatnya pencairan dana, karena sebagai pengguna anggaran, para pengurus induk cabang olahraga harus memberikan laporan keuangan disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap ditambah dengan disertakannya NPWP. Dalam hal birokrasi seperti ini, pengurus-pengurus induk cabang olahraga belum siap, sehingga, dana yang telah mereka anggarkan tidak dapat cair sesuai jadwal yang mereka harapkan. Sebagai suatu kontrol keuangan negara, sistem Pelatnas sekarang memang punya nilai lebih. Namun, kelebihan dalam satu sisi ternyata harus dibayar mahal dengan tersendatnya proses Pelatnas ASIAN GAMES 2006 dan SEA GAMES 2007. Beruntung, KONI Pusat memiliki dana talangan, sehingga membantu kelancaran proses Pelatnas. Ke depan, sistem Pelatnas seperti sekarang ini perlu dikaji ulang.

Wiyanto,
wyndjo@yahoo.com

Jadilah Stasiun TV yang Mencerdaskan Bangsa

Saya salut dengan AN-TV yang tidak tergođa untuk menayangkan sinetron “melodramatik” yang seperti ditayangkan stasiun TV lainnya. Contohnya kuis

SM3M, ini bisa membantu visi pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya juga menghimbau stasiun TV lain untuk menayangkan acara-acara yang “mendidik”. Jangan hanya karena menuruti permintaan pasar jadi menurunkan standar. Kapan bisa maju bangsa kita jika pihak-pihak yang berkesempatan luas untuk mempengaruhi, tidak memberikan pengaruh yang positif. Kebanyakan sinetron sarat dengan *self pity* dan *unrealistic things* yang sangat tidak membangun mental dan moral bangsa. Salah satu contoh sinetron yang berakibat negatif adalah sinetron yang menampilkan “siluman” yang pada dunia nyata saat ini tidak ada. Gara-gara tontonan ini, ada di satu daerah di Indonesia yang menyiksa seekor babi betina (sedang hamil) dan dipaksa berubah untuk jadi manusia. Dari tindakan sebagian masyarakat kita yang seperti ini, kita tahu sejauh mana moral dan pengetahuan mereka. Tidak tergeraklah untuk mengambil inisiatif dalam pendidikan bangsa? Apakah Anda mencintai bangsa ini?

Susana Kuncayani,
santafre@gmail.com

Negeri Penuh Dagelan

Saya tinggal di Negara Barat yang menganut “kebebasan”. Di sini orang bebas mengemukakan pendapat, bebas memiliki hak-nya sebagai warga negara/penduduk, bebas membeli minuman keras, bebas untuk merokok dan semua orang bebas untuk menghidupi dirinya. Namun, penjual minuman keras harus mempunyai ijin pemerintah yang di restui oleh komunitas/warga setempat. Minuman keras dan rokok tidak boleh dijual kepada orang yang berusia di bawah 18 tahun. Merokok tidak boleh di tempat umum, di dalam gedung, kendaraan umum. Tempat pelacuran dilokalisir dan harus mempunyai ijin pemerintah, termasuk ijin dari komunitas/warga sekitar. Ironis sekali melihat Indonesia akhir-akhir ini, tempat hiburan diobrak-abrik, namun penjual minuman keras tersebar di mana-mana bahkan di warung-warung kecil. Perda larangan merokok diterapkan, namun perokok di bis kota dan di tempat umum masih berkeliaran. Pelacuran bertebaran di mana-mana, mulai dari warung remang-remang, panti pijat, diskotik sampai iklan pelacuran vulgar di media massa tertentu. Lucu memang, negara ini penuh dagelan. Banyak orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain.

KK Lee,
kk-lie@hotmail.com

PASTIKAN

TARIF IKLAN BERITAINDONESIA

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000

Iklan kuping (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan @ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:

Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736

Fax.(021) 8293113, 9101871

18/10/2006

Produk WSF Dianggap Melanggar Hukum

Produk *water stimulating feed* atau WSF yang diklaim penemunya sebagai pupuk majemuk lengkap belum memiliki izin resmi dari Departemen Pertanian. Oleh karena itu, peredarannya secara komersial melanggar aturan hukum. Menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian (Deptan) Sutarto Alimoeso di Jakarta, Rabu (18/10), produk WSF juga tidak memenuhi syarat minimal pupuk. Selain hanya memiliki satu dari 16 unsur minimal pupuk, pemakaian WSF pada jangka panjang bisa merusak tanah karena unsur hara alami terkuras. Sebelumnya, Umar Hasan Saputra mengklaim produknya mampu meningkatkan penyerapan unsur hara tanaman dan mengaktifkan organisme dalam berbagai jenis tanah. Presiden Direktur Ciputra Group Ir Ciputra juga sempat memperkenalkan Umar Hasan Saputra dan WSF kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden, 6 September 2006.

19/10/2006

Hamid Tunjuk Pengacara

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin menilai tuduhan Daan Dimara dan kuasa hukumnya, Erick S Paat, sudah tak proporsional. Untuk itu, mulai Kamis (19/10), Hamid menunjuk Amir Syamsuddin sebagai kuasa hukumnya. Amir Syamsuddin menjelaskan, pernyataan-pernyataan Daan Dimara dan kuasa hukumnya telah merusak semuanya, tidak saja citra Hamid Awaludin selaku pribadi dan pejabat negara, tetapi juga merusak institusi kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang telah berupaya membentangkan korupsi. Keterangan Hamid yang diduga palsu, yakni pernyataan bahwa dia tidak hadir dan tidak memimpin rapat pada 14 Juni 2004 yang memutuskan harga pengadaan segel surat suara pilpres I dan pilpres II. Padahal, menurut Amir, ada lima saksi lain: Untung Sastrawijaya, Zainal, Aryono, Boradi, dan Bakrie Asnuri menyatakan sebaliknya. "Selain itu, Hamid bukanlah ketua atau wakil ketua panitia segel surat suara pilpres I dan pilpres II sehingga tak berwenang memimpin dan memutuskan harga," kata Amir.

20/10/2006

Dua Tahun SBY-JK

Dua tahun masa pemerintahan SBY-JK belum memberi harapan perubahan, baik di bidang politik, keamanan, apalagi ekonomi. Pemerintah malah sibuk beretorika dan mengemas citra. Arah dan konsep pembangunan ke depan tidak jelas. Demikian rangkuman pendapat dari pengamat politik Tjipta Les-

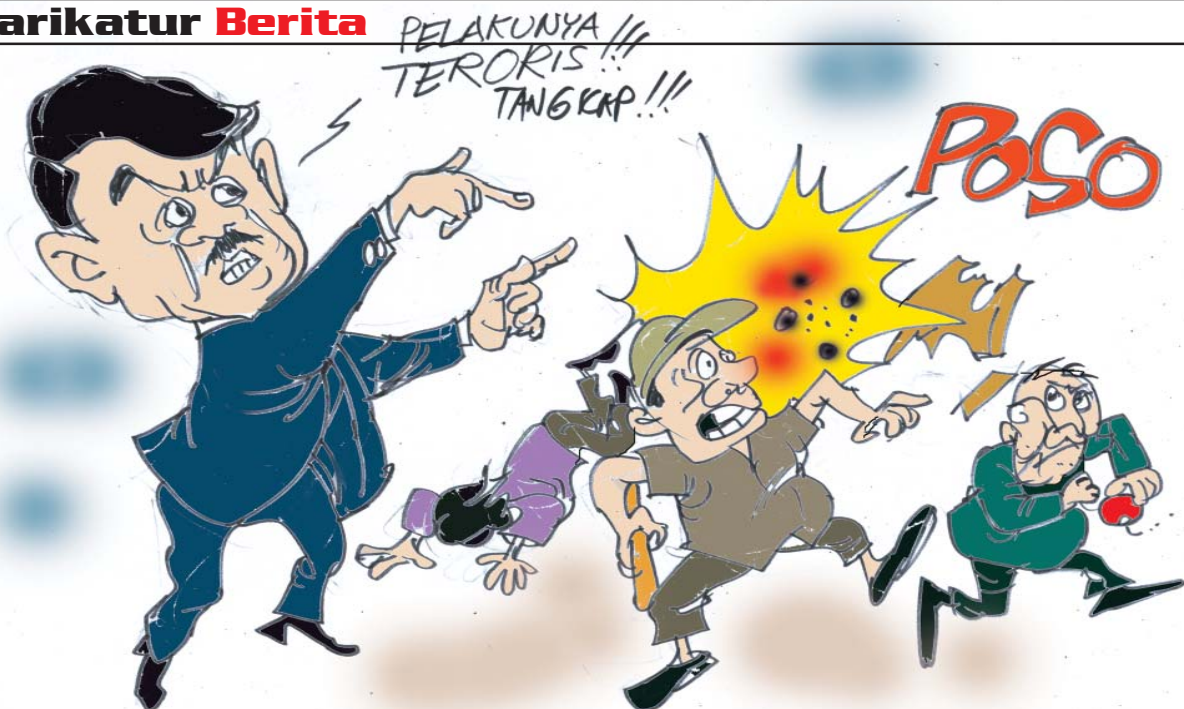
mana, Ketua DPP PPP Endin Shofihara, Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo dan pengamat ekonomi Rhenald Kasali. Tjipta Lesmana menyatakan, di bidang politik pemerintah tak sanggup menekan radikalisme dan ancaman NKRI. Presiden terjebak dalam lingkaran *bargaining* partai dan tak mampu bersikap tegas dalam berbagai persoalan. Endin dan Tjahjo menilai pemerintah jalan di tempat dalam melakukan reformasi hukum. Sedangkan Kasali menyatakan, pemerintah harus mengefektifkan perusahaan agar masyarakat sejahtera dan keluar dari kemiskinan. Dia menilai reformasi birokrasi belum diprioritaskan. Birokrasi yang ada belum menunjang atau mendorong perusahaan untuk berkembang, justru malah menghambat.

21/10/2006

Yudhoyono Menerima Kunjungan PM Thailand

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong agar keadaan darurat yang masih diberlakukan dan justru diperpanjang melalui dekrit di Thailand dicabut secepatnya. Pernyataan Presiden itu disampaikan dalam pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Surayud Chulanont di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu (21/10). Terhadap harapan Presiden Yudhoyono itu, menurut Menlu Hassan Wirayuda, PM Surayud bersedia mempertimbangkan

Karikatur Berita



baik-baik. PM Surayud berada di Indonesia dalam kunjungan kerja singkat sekitar delapan jam sebagai kepala pemerintahan baru Thailand. Indonesia adalah negara ASEAN kedua yang dikunjungi PM Surayud setelah beberapa hari sebelumnya berkunjung ke Malaysia. Negara ASEAN berikutnya yang dikunjungi adalah Filipina.

22/10/2006

Sebanyak 40.738 Koperasi Tidak Aktif

Sebanyak 40.738 unit atau 30 persen dari seluruh koperasi di Indonesia kini tidak aktif. Salah satu hal mendasar untuk menilai aktif tidaknya koperasi itu ditandai dengan penyelenggaraan rapat anggota tahunan atau RAT. Persoalan tersebut terungkap dalam laporan rapat regional koperasi wilayah I hingga wilayah IV yang dihimpun Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jakarta, Minggu (22/10). Dalam laporan tersebut terungkap, jumlah koperasi yang saat ini aktif di seluruh Indonesia sebanyak 95.318 unit. Menanggapi hal tersebut, Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali menyatakan, bahwa revitalisasi koperasi merupakan program yang tak dapat ditawar-tawar lagi. "Evaluasi perkoperasian itu akan dijadikan pijakan dalam menentukan program-program yang menyentuh sektor riil selanjutnya," katanya.

23/10/2006

Muhammadiyah Berlebaran

Muhammadiyah menetapkan Lebaran

jatuh pada 23 Oktober 2006. Warganya pun berlebaran dan mengawali hari raya dengan salat Id. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersalat Id di Lapangan Suryo, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salat digelar pukul 07.00 WIB, Senin (23/10). Seribuan orang berdatangan sejak pukul 06.00 WIB. Din Syamsuddin bertindak sebagai imam dan penceramah salat Id. Di antara jamaah tampak salah satu menteri Kabinet Indonesia Bersatu yakni Menkes Siti Fadilah Supari. Warga Muhammadiyah pada Minggu malam juga menggelar takbiran menyambut Idul Fitri 1427 Hijriah.

24/10/2006

Sumanto Bebas, Jalani Terapi di Ponpes

Sumanto (34 tahun), warga Desa Plumutan, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Jateng, terpidana kasus pencurian mayat dan kanibalisme terhadap mayat curiannya, dibebaskan. Sumanto yang sebelumnya divonis penjara lima tahun, terhitung hanya menjalani hukuman selama tiga tahun delapan bulan di LP Purwokerto setelah mendapat remisi dan pengurangan masa hukuman. Sesaat setelah menerima surat pembebasan dari Kristiadi, Kepala LP Purwokerto, Sumanto mengatakan ingin pulang kampung dulu, menengok bapak dan ibunya di Plumutan. Padahal, orangtua Sumanto, Nuryadiakarta (62) dan isterinya serta warga Plumutan menolak kehadiran Sumanto karena trauma. Setelah bebas, Sumanto akan menjalani terapi non-

medis di Pondok Pesantren An Anur, Bungkel, Kabupaten Purbalingga dan terapi medis di RSUD Banyumas.

25/10/2006

SBY Open House di Cikeas

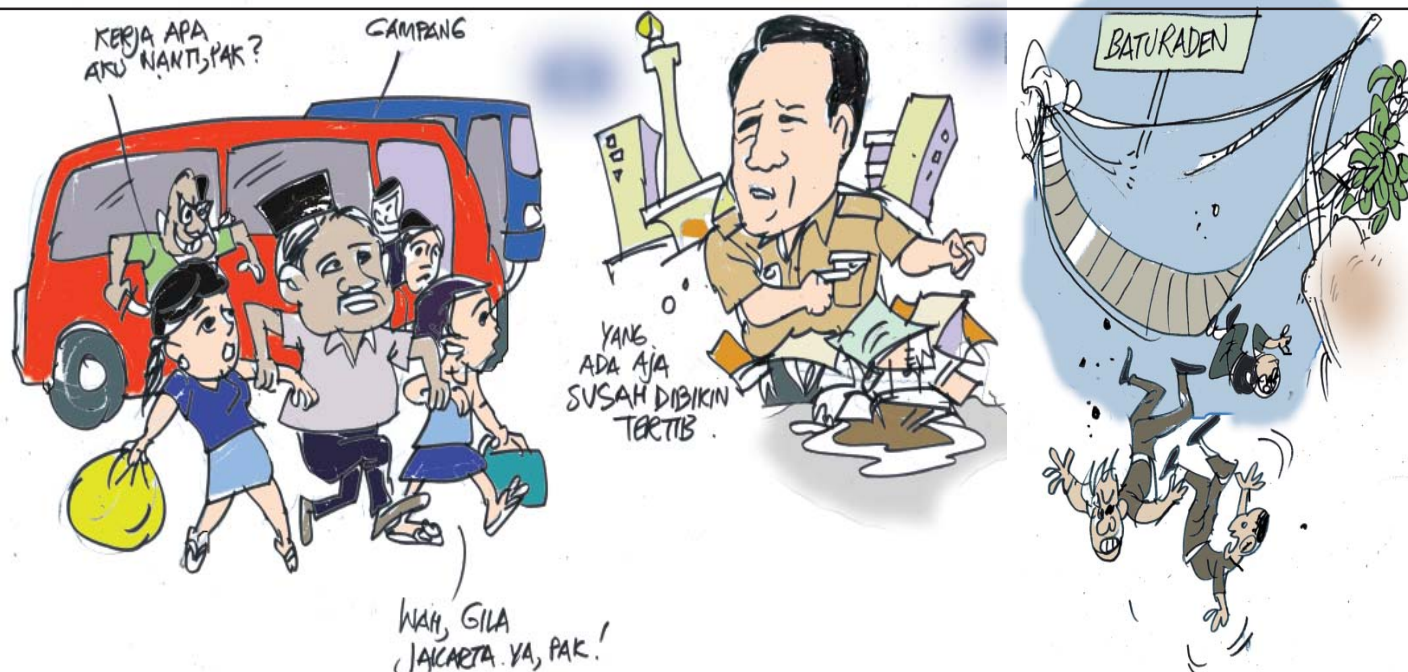
Setelah sehari sebelumnya menggelar open house dengan ribuan masyarakat Jakarta di Istana Negara, Presiden SBY kembali menggelar open house dengan warga di kediamannya, Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor. Open house yang diikuti seluruh anggota keluarga SBY, kecuali putra bungsu, digelar mulai pukul 10.00 WIB, Rabu (25/10). SBY dan putranya Lettu Inf Agus Hari-murti tampak mengenakan batik coklat kemerah-merahan. Sementara Ibu Ani Yudhoyono dan menantunya Anissa Pohan tampak mengenakan kebaya merah. Silaturahmi SBY dengan warga sekitar dilakukan di pendopo yang terletak di samping kediaman SBY. Tenda berukuran 15x25 meter dipadati ratusan warga yang antusias mengikuti acara tersebut. Selain bersalaman dengan SBY dan keluarga, warga juga dijamu dengan berbagai hidangan ala Lebaran.

26/10/2006

Perseteruan Mahathir-Badawi Memanas

Perseteruan antara Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi dan mantan PM Mahathir Mohamad memanas. Badawi mulai gerah dengan sikap mentornya yang selalu mengkritisi pemerintahannya setelah Mahathir melancarkan 'serangan mematikan' melalui internet dengan mengatakan

Karikatur Berita



"Iklim ketakutan membelit negara." Mahathir menuduh penerusnya itu bertindak nepotisme, korupsi, salah mengelola perekonomian dan tidak memiliki arah-arah kebijakan. Menanggapi serangan bertubi tersebut, Badawi pada Kamis (26/10) malam mengatakan bahwa dia kecewa dan sedih dengan permusuhan yang terjadi saat ini. Dia juga menuduh Mahathir menyulut pertikaian yang telah mengagetkan partai penguasa dan banyak warga Malaysia. Ini adalah pernyataan pertama sekaligus bentuk frustrasi Badawi sejak gagal berdamai dengan Mahathir dalam suatu pertemuan, Minggu (22/10). Mahathir dilaporkan langsung melancarkan serangan-serangan terbarunya pasca kegagalan pembicaraan perdamaian tersebut.

27/10/2006

Mang Udell Telah Tiada

Drs Raden Panji Purnomo Tedjokusumo yang lebih dikenal sebagai Mang Udell meninggal dunia dalam usia 83 tahun. Mang Udell meninggal sekitar pukul 11.00 di rumah kediaman di Jalan Mohammad Yamin, Menteng, Jakarta Pusat. Mang Udell yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur, 7 Oktober 1923, meninggalkan tiga anak dan enam cucu. Istrinya, Sri Sufinati binti Bintang Soedibyo - putri pencipta lagu, Ibu Soed - telah lebih dulu meninggal pada tahun 1979. Mang Udell mulai populer setelah masuk dunia hiburan. Di dunia hiburan, ia dikenal sebagai seniman serba bisa. Ia adalah aktor, penyanyi, pembawa acara televisi, dan komedian. Nama populer Mang Udell sendiri diambil dari

nama tokoh dalam acara obrolan "Sepintas Lalu" yang dibawakan almarhum di RRI Jakarta sejak akhir tahun 1946. Terakhir, Mang Udell yang dikenal penonton televisi era 1980-an sebagai tokoh Pak Broto dalam sinetron Losmen, ini ikut bermain dalam film Pasir Berbisik (2000) yang disutradarai Nan Triveni Achnas.

28/10/2006

RI-Cina Sepakati MoU Energi 5 Miliar Dolar

Presiden SBY menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama energi antara Indonesia dan China dengan nilai investasi 5 miliar dolar AS, meliputi enam proyek di Indonesia. Ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kerja sama di bidang energi antara kedua negara. "China kini tidak hanya tertarik pada sektor energi, tetapi juga pertambangan dan mineral. Dengan cadangan yang cukup besar yang dimiliki Indonesia, saya harap perusahaan-perusahaan China akan berinvestasi pada sektor yang menjanjikan ini," ujar SBY yang bersama Wakil PM RRC Huang Zu membuka Indonesia-China Energy Forum II di Shanghai, China. Usai penandatanganan MoU, Presiden mengadakan pertemuan tertutup satu persatu dengan para pemimpin perusahaan China. Yakni China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), PetroChina, PT Sumber Gas Sakti Prima, dan PT Bayan Resources. Presiden SBY beserta ibu Ani Yudhoyono dan rombongan berkunjung ke China sejak Jumat (27/10) untuk memulai rangkaian kunjungan kerja sama lima

hari di negeri Tirai bambu tersebut.

29/10/2006

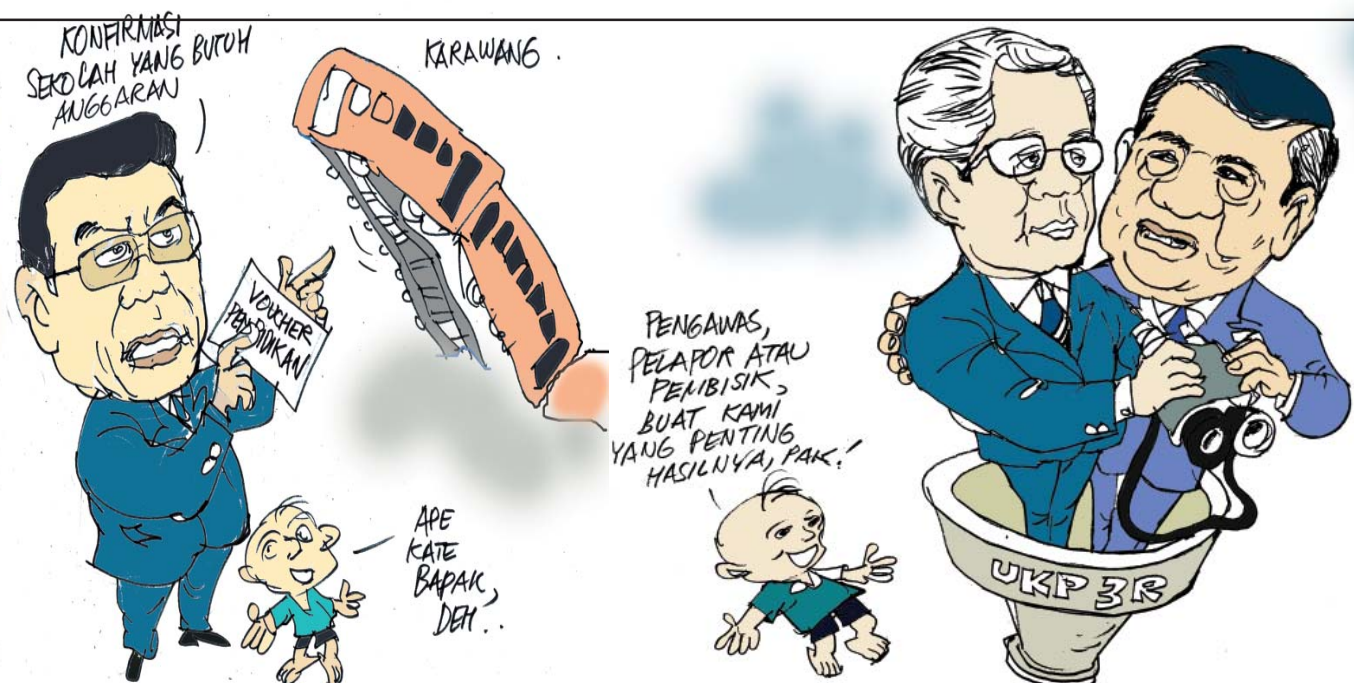
Lula da Silva Terpilih Kembali

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva kembali terpilih untuk masa jabatan kedua, dengan kemenangan telak dari saingannya, Geraldo Alckmin dari Partai Demokrasi Sosial. Lula mendapatkan 60,8 persen suara, sementara Alckmin hanya mendapat 39,2 persen dalam Pemilu babak kedua. Program Bantuan Keluarga yang dimulai pendahulunya dan kemudian diperluas Lula sehingga menjadi gerakan yang membuatnya mendapat dukungan dari kaum miskin. Lula juga berhasil mengurangi inflasi Brasil melalui tingkat bunga tinggi. Kemenangan Lula ini memperlihatkan bahwa daya tarik Lula bagi rakyat jelata Brasil, ditambah dengan keberhasilannya yang telah membantu jutaan orang keluar dari kemiskinan, telah mengalahkan kekecewaan atas skandal-skandal yang menodai masa jabatan pertamanya.

30/10/2006

Tommy Soeharto Bebas Bersyarat

Hutomo Mandala Putra, akrab dipanggil Tommy Soeharto, Senin (30/10) pukul 14.00, mendapatkan pembebasan bersyarat setelah ia menjalani hukuman penjara 2/3 dari 10 tahun masa hukuman. Tommy Soeharto divonis PN Jakarta Pusat 15 tahun penjara dalam kasus keterlibatannya pada pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita. Ia kemudian ditahan sejak 29 November



2001. Estimasi awal, Tommy harusnya mendekam di penjara hingga 29 November 2016, namun setelah dipotong remisi-remisi sebanyak 37 bulan atau 3 tahun satu bulan, Tommy akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat karena ia telah menjalani hukuman penjara 2/3 dari masa hukuman. Meski Tommy sudah bebas bersyarat, Tommy tetap akan diawasi oleh kejaksaan.

31/10/2006

UGM Termasuk Dalam Jajaran 100 Perguruan Tinggi Terbaik Dunia

Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun ini berhasil masuk dalam jajaran 100 perguruan tinggi terbaik dunia untuk tiga kategori bidang keilmuan. Peringkat ini berdasarkan Times Higher Education Survey yang diterbitkan harian The Times, Inggris, 26 Oktober 2006. Ketiga kategori bidang keilmuan itu adalah bidang ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) yang berada pada peringkat ke-47 dari 100 universitas terbaik, bidang ilmu-ilmu budaya dan humaniora (*art and humanities*) peringkat ke-70 dunia, dan bidang ilmu-ilmu biomedis (*biomedicines*) pada peringkat ke-73. Meski demikian, UGM belum bisa masuk dalam jajaran 200 universitas paling top dunia untuk seluruh kategori bidang ilmu. Pada kategori bidang ilmu-ilmu sosial, UGM memperoleh total nilai 41,1. Peringkat pertama pada kategori ini adalah Oxford University, Inggris, dengan total nilai 100. Pada peringkat 2 adalah Harvard University dengan nilai total 98,5. Adapun pada kategori ilmu-ilmu bio-

medis, UGM memperoleh nilai 34,5. Peringkat pertama adalah Cambridge University, Inggris, dengan nilai 100 dan ke-2 Harvard University dengan nilai total 99,1.

01/11/2006

Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition 2006

Tiga lembaga internasional siap mendukung pembiayaan proyek infrastruktur yang ditawarkan dalam Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition (IICE) 2006. Total dana yang disiapkan lebih dari US\$ 3 miliar. Bank Dunia, Bank Pembangunan, dan Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional (JBIC) masing-masing menyiapkan dana sekitar 1 miliar. Sementara itu, Internasional Finance Corporation (IFC) berjanji untuk mendukung pendanaan proyek IICE 2006 akan lebih baik dibanding Infrastructure Summit 2005. Pemerintah Indonesia dinilai lebih siap dalam menawarkan proyek-proyek, khususnya pada 10 proyek model senilai US\$ 4,4 miliar. Selain itu, adanya kepastian *risk sharing* dan jaminan terhadap *risk*-proyek yang ditawarkan, membuat investor lebih yakin terhadap prospek investasi proyek tersebut. Hal itu terungkap dalam forum IICE 2006 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (1/11). Pada IICE 2006, selain menawarkan 10 model proyek, pemerintah juga menyiapkan 101 potensi proyek lain senilai 14,7 miliar dollar AS. Proyek yang ditawarkan antara lain jalan tol, kelistrikan, pemipaan gas, transportasi, dan telekomunikasi.

02/11/2006

Dua Jaksa Pemerass Diadili

Dua jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Cecep Sunarto dan Burdju Ronni Allan Felix, duduk di kursi terdakwa pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/11). Keduanya diadili dalam perkara tindak pidana korupsi, yakni memeras Ahmad Djunaedi (mantan Direktur Utama PT Jamsostek). Tim jaksa penuntut umum, yang diketuai Ali Mukartono, mendakwa perbuatan melawan hukum dilakukan terdakwa pada kurun waktu November 2005-Desember 2005 di Kantor Kejari Jakarta Selatan. "Cecep dan Burdju melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya berturut-turut dan berulang, memaksa meminta uang dari Ahmad Djunaedi sebesar Rp 600 juta," kata jaksa. Pada akhirnya, uang yang diserahkan Djunaedi sebesar Rp 550 juta, yang terbagi dalam tiga tahap, yakni Rp 100 juta, Rp 250 juta, dan Rp 200 juta. Transaksi penyerahan uang dilakukan di ruang kerja Cecep dan Burdju. Djunaedi bersedia membayar karena ingin sidangnya dipercepat serta dapat ditahan di luar rumah tahanan.

03/11/2006

UKP3R 'Dibekukan'?

Setelah beberapa hari jadi polemik di media massa dan "dikeroyok" dari berbagai sisi oleh berbagai kalangan, diskusi soal Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) makin memanas karena bertemunya faktor politik (resis-

Karikatur Berita



tensi Wakil Presiden dan Partai Golkar atas kehadiran unit kerja baru), faktor primordial (penggunaan isu agama untuk menolak personalia), dan faktor intelektual (catatan dan resistensi kalangan pengamat dan akademisi mengenai kelayakan institusi baru ini). Akibatnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla (3/11) untuk menjelaskan UKP3R yang baru saja dibentuknya. Penjelasan itu diberikan, antara lain karena pembentukan UKP3R yang diketuai Marsillam Simandjuntak tidak melibatkan Wapres. Pertemuan itu, berlangsung di ruang kerja Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11). Dalam pertemuan itu, Kalla juga sempat mengingatkan Presiden Yudhoyono mengenai komitmen dasar mereka ketika mereka bergabung menjadi calon Presiden dan Wapres sebelum kampanye calon Presiden dan Wapres. Esoknya, setelah pertemuan itu, Kalla 'menceritakan' bahwa UKP3R yang dipimpin Marsillam Simandjuntak telah dibekukan. "Pembekuan" UKP3R disepakati bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan itu. Hal itu disampaikan di rumah dinas di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Soal status Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang UKP3R yang dikeluarkan pada 29 September lalu, masih menunggu sikap Presiden. Sebab, bila dicabut akan menjatuhkan wibawa Presiden sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini.

04/11/2006

Indonesia Masih Tertinggi Korupsinya
Menurut hasil survei Transparency

International (TI) pada 2006, Indonesia masih tetap dikelompokkan sebagai negara yang korupsinya sangat tinggi, sejajar dengan Zimbabwe, PNG, Ethiopia, dan negara terkorup, Haiti. Sementara di peringkat satu atau negara yang pemberantasan korupsinya paling bagus adalah Finlandia. Penilaian tersebut disimpulkan setelah mengadakan survei berdasarkan kemampuan mengatasi korupsi. Dari survei yang dilakukan terhadap 163 negara, Indonesia cuma berada di peringkat ke 134. Namun, peringkat tersebut sudah lebih baik dibanding tahun 2005 yang berada di urutan 140. Dan dibanding dengan negara ASEAN lain, posisi Indonesia hanya di atas Myanmar yang berada di urutan 162, dan Kamboja yang di urutan 152. Menyikapi peringkat buruk tersebut, Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki mengaku kecewa karena peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi belum terdongkrak signifikan, namun dengan optimis, Taufiqurrahman mengatakan tidak akan putus harapan.

05/11/2006

Hukuman Gantung untuk Saddam

Mantan Presiden Irak Saddam Hussein (69) dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung, Minggu (5/11). Tim pembela Saddam langsung mengajukan banding atas keputusan tersebut. Pengadilan Tinggi Irak memutuskan Saddam bersalah atas kasus kejahatan kemanusiaan di Desa Dujail pada tahun 1982. Dalam proses pengadilan yang berlangsung sejak 19 Oktober itu Saddam terbukti me-

merintahkan anak buahnya untuk membunuh 148 warga Syiah—pria dewasa dan remaja laki-laki—di Dujail yang dituduh berencana membunuh Saddam saat dia sedang berkunjung ke Dujail. Selain Saddam, dua terdakwa lain juga divonis hukuman gantung, yaitu mantan kepala intelijen sekaligus adik tiri Saddam, Barzan Ibrahim al-Tikriti, dan mantan Kepala Pengadilan Revolusioner Awad Hamid al-Bandar. Selain vonis hukuman mati dengan digantung, pengadilan juga menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mantan Wakil Presiden Irak Taha Yassin Ramadan.

06/11/2006

AS Turunkan Status RI Menjadi "Watch List"

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR mengumumkan penurunan peringkat pengawasan terhadap Indonesia, dalam hal perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Indonesia yang sejak tahun 2001 dimasukkan dalam *priority watch list* atau pengawasan khusus kini diturunkan menjadi *watch list* atau pengawasan biasa. Menurut Asistant USTR di Indonesia Barbara Weisel, Senin (6/11) di Jakarta, penurunan peringkat Indonesia itu sesuai dengan penilaian khusus aturan 301 yang memantau efektivitas perlindungan HAKI. Menurut Barbara, langkah Pemerintah Indonesia dalam hal perbaikan penegakan HAKI akan meningkatkan posisi Indonesia dalam persaingan ketat investasi asing di wilayah Asia. Saat ini yang berstatus PWL di kawasan Asia tinggal Vietnam dan China.





Banyak Cara Jinakkan Dewan

Banyak jalan menuju Roma, banyak cara menyalurkan “hadiah” pada anggota DPR. Salah satunya lewat voucher bantuan pendidikan.

Safari Ramadhan Agung Laksono, Ketua DPR, membawa hikmah. Pada suatu kesempatan Agung membagikan voucher bernilai Rp 470 juta pada empat sekolah Kosgoro yang berada di bawah naungan Kosgoro 1957 yang dipimpinnya. Agaknya voucher ini membuka tabir yang selama ini terselubung. Voucher-voucher, semacam surat berharga, diteken oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo.

Lazimnya voucher berupa kupon hadiah untuk belanja, tidak bisa dicairkan secara tunai. Tetapi praktik yang bergulir di DPR sejak 2002, voucher-voucher dibagikan kepada para anggota Dewan, khususnya anggota Komisi X yang membawahi bidang pendidikan. Berapa nilainya dan siapa saja yang menerima voucher, itu yang belum dijelaskan oleh Bambang.

Anggota Komisi X dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah berterus terang bahwa dia menerima voucher bahkan dua kali setahun. Dan Ketua Komisi X

Irwan Prayitno dari Fraksi PKS, mengaku ada pembagian voucher tiga bulan lalu, sebelum periode kepemimpinannya. Namun Wakil Ketua Komisi X, Masduki Baidlowi dari Fraksi PKB berkecil hati bahwa komisi tersebut belum pernah mendapat voucher secara langsung dari Depdiknas. Komisi X hanya meminta sekolah yang berkepentingan mengajukan usulan ke Depdiknas, lantas ditindaklanjuti. Padahal, faktanya voucher tersebut beredar di tangan anggota Dewan.

Lantas bagaimana menguangkannya? Bisa saja anggota yang memiliki voucher itu meminta sekolah-sekolah swasta untuk mencairkannya ke Depdiknas, dan dia menerima uang tunai dari mereka. Banyak kalangan, termasuk anggota Dewan sendiri, menilai pembagian voucher tersebut berbau KKN dan sarat dengan kepentingan politik. Memang banyak jalan untuk menjinakkan anggota Dewan. Tetapi, ibarat kata pepatah, sepandai-pandai menyimpan bangkai,

baunya menyeruak jua.

Namun Sekjen Depdiknas, Dodi Nandika berkecil hati bahwa penyaluran voucher bantuan pendidikan lewat Agung jauh dari muatan politis, apalagi dikaitkan dengan praktik korupsi. Menurut Dodi praktik ini hanyalah sebuah bentuk sinergi dengan semua komponen bangsa untuk secara bersama menangani masalah pendidikan. Kata Dodi, tujuan penerbitan voucher memperpendek birokrasi penyaluran bantuan pendidikan, langsung lewat rekening sekolah, bukan rekening Pemerintah Daerah. Tetapi kenapa harus lewat anggota Dewan? Inilah pertanyaan yang menggajal di dada publik.

Sedangkan Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Suyanto menilai kemas bantuan pendidikan lewat voucher mengandung tujuan mulia. Sebab voucher merupakan salah satu bentuk bloc grant yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang tidak masuk dalam usulan pemerintah daerah. Kata Suyanto voucher disalurkan oleh petinggi Depdiknas atau mitra kerja yang dianggap kredibel. Inilah pasalnya sehingga para anggota Dewan diberi kepercayaan untuk menyalurkan voucher pendidikan ke sekolah-sekolah? Tetapi Menteri Bambang Sudibyo berusaha menghindari dari polemik voucher, hanya berkomentar singkat, “persoalan ini sudah ditangani Wapres Jusuf Kalla.”

Rupanya Kalla lebih sigap meredakan kontroversi voucher dengan memanggil rapat dengan Bambang. Di dalam rapat itu dijelaskan bahwa voucher tersebut hanyalah sertifikasi bagi sekolah untuk mengurus dana bantuan ke Depdiknas, Agung mengaku empat voucher yang diterimanya sudah ditandatangani oleh Mendiknas.

Kalla juga bertindak sigap menghentikan penerbitan voucher bantuan pendidikan oleh Depdiknas. Dia ingin mekanisme penyaluran bantuan pendidikan dilakukan melalui pemerintah daerah—bupati/walikota dan gubernur. Banyak permintaan agar peredaran voucher diselidiki lebih

lanjut, tidak cukup hanya dihentikan. Sebab dana yang mengalir dalam bentuk voucher, menurut Suyanto, diperkirakan satu persen dari seluruh anggaran pendidikan, setiap tahun bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Tetapi kata anggota Komisi X Ruth Nina, anggaran voucher sebesar dua persen atau Rp 660 miliar dari total anggaran pendidikan (tahun 2006) sebesar Rp 33 triliun.

Yang sudah mentradisi di kalangan petinggi Depdiknas, mereka membagi-bagikan voucher kepada sekolah-sekolah yang ingin dibantu ketika berkunjung ke daerah-daerah. Sangat mungkin voucher diurus oleh “calo proyek” sebelum turun ke sekolah yang sudah mengajukan usulan bantuan. Bisa jadi sang calo menerima uang tunai dari sekolah yang bersangkutan setelah voucher tersebut dicairkan. Voucher dicairkan lewat Kantor Pembayaran Kas Negara Daerah (KPKND), yang harus menunjukkan surat serta hasil verifikasi bahwa betul sekolah itu membutuhkan bantuan. Nilai nominal voucher bervariasi, mulai dari Rp 60 juta untuk perbaikan kelas, dan Rp 120 juta untuk pembangunan laboratorium.

Dalam hal pembagian voucher kepada anggota Dewan yang menurut sejumlah pengamat memiliki motivasi politik, jika dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi bisa tergolong pemberian gratifikasi dan melanggar UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU itu menetapkan setiap penyelenggara negara yang menerima pemberian uang, barang, rabat, (diskon), komisi, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, bisa dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya. Namun, penerima gratifikasi bisa terlepas dari sanksi bilamana dia melaporkannya ke KPK, paling lambat 30 hari setelah menerima hadiah tersebut. Namun tak satu pun anggota Dewan, termasuk Agung, yang melaporkan ke KPK tentang voucher yang mereka terima. ■ AM-SH

Dilema SBY

Boleh jadi dua sayap pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR yang berseberangan—Partai Golkar dan PKS—menarik dukungan mereka. Nada-nada ketidakpuasan terhadap pemerintah mengalir deras dari cabang-cabang Partai Golkar di banyak daerah. Mereka malahan pagi-pagi mengusung Wapres Jusuf Kalla sebagai calon presiden tahun 2009. PKS, sudah dalam banyak hal, misalnya dalam soal impor beras, mengambil sikap yang berseberangan dengan pemerintah. Bahkan, PKS sudah mengambil ancang-ancang untuk mengajukan calon presiden sendiri bilamana meraih 20 persen suara dalam Pemilu Legislatif 2009.

Apa artinya ini semua bagi pemerintahan SBY yang hanya didukung *all out* oleh Partai Demokrat, partai yang menemepati urutan ketujuh di dalam Pemilu Legislatif 2004?

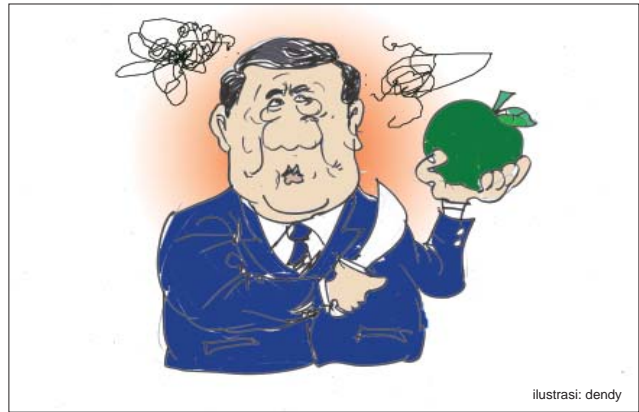
Kemungkinan besar banyak kebijakan pemerintahan SBY yang membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR akan terganjal. Sementara partai terbesar kedua setelah Golkar, PDI-P sudah memasang posisi oposisi permanen terhadap pemerintah. Sedangkan kekuatan Demokrat di DPR hanya 46 suara. Bisa jadi realisasi kebijakan pembangunan semakin lamban. Fenomena ini tentu akan sangat mengganggu kinerja SBY, dan akan menurunkan popularitasnya.

Di dalam koalisi longgar yang mendukung pemerintah, bergabung partai-partai Golkar, PPP, PKB, PKS, PAN, Demokrat dan PBB. Selain Golkar dan Demokrat, lima partai pendukung lainnya—PPP, PKB, PAN, PKS dan PBB bisa lebih bebas mengambil posisi mereka untuk mendongkrak popularitas. Sedangkan menteri-menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tidak menjadi bahan pertimbangan dominan untuk mendukung atau tidak mendukung kebijakan. Inilah dilema yang dihadapi pemerintah yang didukung oleh partai kecil. Pemerintah lebih banyak berkompromi dan “menjinakkan” para anggota Dewan agar kebijakannya tidak terganjal.

Sedangkan Golkar diikat secara moral oleh Wapres Jusuf Kalla yang menjabat pucuk pimpinan partai. Bagi Demokrat tidak ada lagi tawar menawar karena partai yang dibesarkan oleh popularitas pribadi SBY. Sayangnya, Demokrat sampai saat ini belum memperlihatkan kemampuannya untuk mengikat para pendukung SBY di DPR. Langkah ini lebih banyak dilakukan oleh SBY sendiri, sehingga konsentrasinya di dalam menjalankan roda pemerintahan terbelah.

Sejumlah pengamat memperkirakan dilema tersebut semakin mengental begitu memasuki tahun 2007. Soalnya, lima dari enam anggota koalisi longgar akan lebih melihat ke dalam. Mereka akan lebih memilih ancang-ancang untuk memenangkan suara dalam Pemilu Legislatif, batu loncatan mengungguli pemilihan presiden tahun 2009. Calon-calon pesaing SBY masih berkisar pada figur-figur lama, seperti Megawati dari PDI-P, Amien Rais dari PAN, KH Abdurahman Wahid dari PKB, dan “pesaing dalam selimut” Jusuf Kalla dari Golkar. Mungkin akan muncul pesaing dari lingkungan TNI dan Polri—Wiranto, Prabowo Subianto, Ryamizard dan jago yang dikedepankan oleh Amien, Sutanto.

Karena partai-partai tersebut tidak ingin SBY lebih populer lagi sehingga menutup ruang para calon mereka untuk memenangkan perebutan kursi presiden. Tentu dukungan mereka di parlemen yang selama ini diberikan kepada pemerintahan SBY akan mengalami erosi. Ini akan menyulitkan posisi SBY, apalagi sebagian besar menteri kabinet SBY berasal dari partai-partai pendukung, dan mereka belum



ilustrasi: dendy

memperlihatkan prestasi yang menggembirakan.

Bisa berarti dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan SBY yang memerlukan persetujuan DPR akan mengalami erosi yang serius.

Pada sisi lain, SBY diragukan memiliki keberanian untuk menggantikannya dengan figur independen yang berasal dari para pakar dan teknokrat. SBY tentu tak ingin mengulangi pelajaran pahit mantan Presiden Abdurahman Wahid yang dihentikan di tengah jalan karena “membuang” menteri-menteri yang berbasis partai politik. Dilema ini akan semakin pelik tatkala Pemilu Legislatif dan Presiden bergerak semakin dekat. Buktinya, SBY akan menyusun ulang Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) pimpinan Marsilam Simandjuntak yang baru berusia 35 hari.

Persoalan bangsa ini akan berputar-putar di situ saja bilamana tidak ada kesadaran kolektif untuk mengubah keadaan secara terencana dan berkesinambungan. Konflik kepentingan sempit partai dan kelompok telah membelenggu diri para pemimpin dan pengelola negara. Di samping itu, kelompok *aji mumpung* dan koruptor, selalu siap dengan perangkat mereka untuk menangkap semua peluang yang tercipta di sela-sela persaingan tersebut.

Apakah dampak dilema SBY bagi rakyat kecil? Karena waktu dan perhatian SBY akan banyak tersita oleh upayanya menjaga keseimbangan dukungan di DPR dan popularitas pribadi, maka kinerja pemerintahannya akan melambat. Keadaan ini bisa diperparah oleh munculnya tekanan-tekanan eksternal, misalnya gangguan keamanan dan defisit neraca anggaran yang membengkak lantaran beban utang dalam dan luar negeri yang semakin mencekik. Pengembalian utang dan penutupan lubang defisit selalu menuntut pengorbanan rakyat. Jadi harapan bagi perbaikan ekonomi negara yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat akan semakin jauh panggang dari api.

Hanya komitmen dan kerja keras para pemimpin dan pengelola negaralah yang bisa menyembuhkan krisis ekonomi yang berkepanjangan ini. Mereka semestinya meneladani sikap mendiang Presiden J.F. Kennedy dari Amerika Serikat: “Loyalitas saya pada partai berakhir begitu loyalitas saya pada negara dimulai.” Artinya, komitmen dan kerja keras mereka menjadi suatu keniscayaan agar rakyat yang berpenghasilan pas-pasan keluar dari himpitan kesulitan ekonomi. Sebab rakyat menanti janji dan komitmen SBY-JK untuk membawa perubahan (nasib rakyat), bukan sekadar Bantuan Tunai Langsung untuk memuaskan kebutuhan sesaat.

Mampukah mereka meninggalkan loyalitas sempit pada partai demi kepentingan yang lebih besar? Inilah pertanyaan yang sudah lama lupa untuk dijawab. Sekarang jawaban itu ditunggu oleh rakyat banyak yang tak sabar lagi menjalani kehidupan yang semakin berat. ■



foto: www.presidensby.info

RAPOR SBY TIDAK SEMUA MERAH

Kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memasuki tahun ketiga menuai kritik. Di antara banyak kemajuan yang dicapai, publik masih menagih janji untuk menciptakan perubahan, terutama di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Kemiskinan dan pengangguran masih membayangi perjalanan pemerintahan SBY ke depan.

Dampak dua kali kenaikan harga BBM tahun 2005 luar biasa. Sampai sekarang, puluhan juta orang hidup terseok-seok dalam kemiskinan. Departemen Sosial mencatat, sejak Oktober 2005, tidak kurang dari 19 juta keluarga miskin (KM) harus diberi bantuan langsung tunai masing-masing Rp 150.000, selama berbulan-bulan. Pemerintah terpaksa menguras dana puluhan triliun rupiah yang disisihkan dari surplus harga BBM. Soalnya, penghasilan mereka tidak lagi mampu mengejar lonjakan harga yang mendorong laju inflasi sampai 8% di ujung tahun 2005, akibat kenaikan harga BBM sebesar 150%—Maret 30% dan Oktober 120%. Sepanjang tahun tersebut laju inflasi mencapai 17%.

Selain pengidap miskin struktural, jutaan orang mendadak jatuh miskin karena dengan penghasilan dalam barometer UMR (upah minimal regional) Rp 800.000 per bulan, mereka masih berada di batas garis kemiskinan. Apalagi keluarga miskin di perkotaan dan pedesaan yang memiliki penghasilan hanya Rp 150.000 sebulan. Dengan daya beli mayoritas masyarakat sebesar itu, sektor riil semakin terpuruk, apalagi setelah mengalami hantaman kenaikan harga BBM. Yang sangat terpuuk industri-industri yang menghasilkan barang-barang fabrikasi selain pangan dan obat-obatan. Mereka mau tidak mau mem-PHK karyawan karena harus menekan ongkos produksi untuk bisa bertahan hidup. Maka kemiskinan telah menjadi sebuah lingkaran setan.

Dalam kondisi seperti ini, Presiden Susilo menghembuskan "angin sorga" di depan DPR, menjanjikan pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk memberi masyarakat sumber penghasilan. Namun janji ini masih di-

tunggu-tunggu. SBY mengundang polemik yang berkepanjangan memaparkan angka kemiskinan dan pengangguran yang diragukan akurasi. SBY mengungkapkan, pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 23% tahun 1999, menjadi 16% tahun 2005. Angka ini mengundang kritik tajam dari banyak pihak. Misalnya, para ekonom Tim Indonesia Bangkit (TIB), melihat bahwa faktor dua kali kenaikan harga BBM harus dihitung yang memicu lonjakan kemiskinan ke angka 22% sejak Maret dan Oktober 2005.

Mengurangi kemiskinan dan pengangguran semestinya menjadi prioritas utama pemerintahan SBY. Target menurunkan kemiskinan sampai ke angka 8,2% selama lima tahun pemerintahannya masih jauh dari jangkauan. Demikian juga pengurangan tingkat pengangguran sampai 5,1% menjadi sebuah mimpi bilamana faktor riil tidak bergerak maju, sekarang malah semakin terpuruk. Rakyat masih menunggu janji SBY membuka lapangan kerja dan usaha seluas-luasnya. Karena hanya dengan jalan itu, pengangguran bisa dikikis. Semakin banyak penduduk yang bekerja akan banyak orang yang punya daya beli, dan semakin tinggi produktivitas nasional.

Upaya pengentasan pengangguran yang diperkirakan menyentuh angka 11%, masih jauh panggang dari api. Sebenarnya banyak cara untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, misalnya dengan mengikis birokrat yang bermental korup, memprioritaskan realisasi anggaran untuk proyek-proyek padat karya, memberi dukungan modal bagi usaha-usaha mikro, baik di pedesaan maupun perkotaan dan menyembuhkan sektor riil dari penyakit kronis.

Ketika pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM sebesar 120%, lonjakan harga minyak di pasar

tunai internasional sempat menyentuh angka 75 dolar AS per barel. Langkah tersebut diambil untuk menutup defisit anggaran negara yang menganga. Namun kenaikan tersebut menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang sangat luas, dan masih terasa sampai sekarang. Di balik kesuraman tersebut, sekarang muncul titik-titik harapan bagi perbaikan ekonomi, karena harga minyak di pasar dunia sudah turun ke angka 60-an dolar per barel, masih di bawah angka yang diprediksi dalam RAPBN 2007 sebesar 65 dolar per barel. Sedangkan nilai rupiah terhadap dolar AS bergerak turun dan stabil pada kisaran angka 9.000 lebih. Namun yang membuat pemerintah tidak berdaya untuk menaikkan anggaran belanja pembangunan karena tingginya angka pengembalian utang dalam dan luar negeri—masing-masing berjumlah lebih kurang Rp 900 triliun. Rasio pengembalian utang bergerak pada angka 45% dari PDB.

Ekonom terkemuka, Faisal Basri, berbicara dalam forum seminar yang bertopik *Krisis Multi Dimensi* mengatakan, jika perut kenyang maka rakyat tenang. Ini menunjukkan ekonomi merupakan masalah yang mendasar. Faisal menilai, kecuali pasar modal, angka rapor ekonomi pemerintah tahun pertama merah semuanya, kecuali pasar modal. Ibarat permainan sepakbola, Faisal menggambarkan kesebelasan SBY dihujani gol ketika jabatan Menko Perekonomian dipegang oleh Aburizal Bakrie dan Yusuf Anwar menjadi Menteri Keuangan. Sekarang, setelah jabatan-jabatan tersebut dipegang oleh Budiono dan Sri Mulyani, gawang memang tidak kemasukan gol, tetapi para penyerang tumpul sehingga tidak mampu memasukkan gol ke gawang lawan alias tumpul. Menurut Faisal, menteri-menteri sektoral harus meningkatkan daya saing ekonomi nasional kemudian menciptakan lapangan kerja.

Menyelesaikan tahun kedua, kata Faisal, kelihatannya agak lumayan, angka rapor pemerintah mulai banyak yang tidak merah, nilai tukar rupiah tidak merah, investasi masih merah tapi menjelang hijau dan beberapa indikator makro ekonomi jangka pendek juga luar biasa bagus. Cadangan devisa tidak pernah

setinggi seperti sekarang, tapi kalau ditanya mengapa seperti itu? Maka mungkin akan gundah gulana. Sebab menjadikan rapor itu tidak merah dengan biaya yang sangat mahal. Secara politik, pemerintah lebih mengutamakan stabilitas yang semu dengan mengorbankan daya beli rakyat. Kata Faisal, yang menarik dari SBY, ia konsisten dengan presiden *image* sebab yang dicari citranya.

Menurut Faisal, pertumbuhan sektor riil semakin tertinggal, semakin hari semakin jauh dari PDB, di bawah pertumbuhan rata-rata. Yang paling menderita sektor industri manufaktur. Pertumbuhan sektor pertanian lumayan, tapi sektor pertanian non-pangan, seperti perkebunan besar di mana tidak banyak rakyat terlibat. Program revitalisasi hasilnya babak belur, terutama karena ketidaktegasan SBY.

Setelah setahun babak belur, pemerintah menaikkan harga BBM. Faisal mengibaratkan pemerintah seperti drakula, mengisap darah rakyat dalam bentuk subsidi sehingga rakyat kehilangan daya beli. Uang subsidi yang diambil seperti drakula menyedot darah, itu disajikan kepada orang-orang asing.

Mau nggak menghirup darah rakyat saya ini? Hasilnya datang. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak kurang dari 10 miliar dollar AS uang orang asing datang ke Indonesia, yang membuat ekonomi bagus semua seperti sekarang. Kalau besok ada apa-apa lagi, uang asing itu tinggal kabur ke tempat lain. Membaliknya ekonomi bisa dikatakan 80%, karena darah segar rakyat disajikan pada orang asing. Kenapa orang asing datang? Karena suku bunga naik. Pemerintah memberikan bunga kepada Surat Utang Negara (SUN) yang cukup tinggi, kira-kira 12 % dan SUN ritel 12,05 %. Sedangkan bunga obligasi global hanya 7 %. Jadi siapa yang tidak tertarik. SUN Amerika hanya 5,25%. "Jadi mengalirlah uang ke Indonesia," kata Faisal.

Menunggu Mukjizat

Memang sudah bertahun-tahun rakyat mengharapkan mukjizat perbaikan ekonomi negara untuk mengangkat pendapatan mereka yang terpuruk. Mereka hampir tidak punya daya beli, kecuali untuk menutupi kebutuhan pokok, terutama pangan, seadanya. Padahal mereka sangat membutuhkan biaya transpor, pendidikan, kesehatan dan papan. Harapan itu tentu tertumpu pada komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi sektor-sektor tersebut, terutama perluasan lapangan kerja dan lapangan usaha.

Dalam RAPBN 2007, pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp 731

triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3%, nilai tukar dolar Rp 9.300, inflasi 6,5%, SBI tiga bulan 8,5%, harga minyak 65 dolar AS per barel, produksi minyak 1 juta barel per hari, defisit anggaran -0,9%. Namun sembilan dari sepuluh fraksi di DPR pesimis terhadap RAPBN yang diajukan oleh SBY, 16 Agustus lalu. Fraksi PKS bahkan meminta pemerintah untuk merevisi RAPBN 2007.

Kesembilan fraksi—Golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN, PKS, PDS, BPD dan BR—menganggap target pertumbuhan ekonomi (6%) yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi, tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Mereka juga menyangsikan keakuratan data yang digunakan pemerintah untuk menentukan asumsi makro ekonomi dan kebijakan program-program pembangunannya. Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah dan rendahnya minat investor asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia menjadi alasan utama mereka untuk meragukan pencapaian target-target pemerintah. Pandangan tersebut disampaikan pada sidang paripurna DPR (28/8).

Padahal isu kemiskinan dan pengangguran bisa beralih pada isu politik yang panas bilamana muncul pemicu yang terencana atau tidak terencana. Tidak heran bilamana "dukun politik" Prof. Suhardiman meramalkan munculnya "goro-goro" atau kekacauan politik yang dicek-masukkan bisa mengguncang stabilitas pemerintahan. "Sekarang ini tantangan khususnya adalah masalah ekonomi, sosial, budaya, hukum," kata Suhardiman dalam wawancara dengan *Berita Indonesia* (10/10). Suhardiman melihat berbagai bencana sebagai kemurkaan alam terhadap ulah manusia. Tetapi, kata Suhardiman, proses tersebut memang harus dilalui oleh bangsa ini. Dan kepemimpinan SBY sedang diuji.

Bisa jadi pemicunya karena masalah korupsi yang masih merajalela, perusakan lingkungan atau kemiskinan dan pengangguran yang terus menekan kehidupan rakyat. Sebab fakta yang tak terbantahkan, kondisi air dan udara di kota-kota semakin pekat dengan pencemaran, pembalakan hutan belum sepenuhnya terbendung. Dan masih banyak anak-anak Balita yang menderita kurang gizi atau anak-anak usia sekolah yang tidak bisa duduk di bangku pendidikan karena ekonomi keluarga mereka yang sangat minim.

Suhardiman meramalkan munculnya seorang *Satrio Piningit*, seperti halnya Soekarno dan Soeharto pada era mereka masing-masing. Tokoh ini dalam gambaran Suhardiman, tidak terlalu pintar, tetapi mampu mengatasi keadaan, dan



Rapat Paripurna DPR yang tidak paripurna.

muncul secara tidak terduga. Kata Suhardiman, seorang pemimpin yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan krisis multi-dimensi yang dialami oleh bangsa Indonesia. Siapakah *Satrio Piningit* tersebut? Inilah yang masih jadi tanda tanya besar. Dia menilai SBY itu seorang pemikir, tetapi bangsa ini membutuhkan seorang pemimpin yang negarawan.

Tidak Semua Merah

Dibanding dengan pemerintahan Bung Karno 20 tahun, Pak Harto 32 tahun, Habibie 500 hari, Gus Dur 800 hari dan Megawati 3,5 tahun, pemerintahan SBY dalam dua tahun ini masih memadai karena dia mewarisi sisi positif dan negatif dari para pendahulunya. Wapres Jusuf Kalla membantah bahwa angka rapor pemerintah semuanya merah. "Bangsa ini persoalannya besar," kata Kalla dalam wawancara khusus dengan *Media Indonesia* (20/10). Jika dibandingkan dengan tiga tahun lalu, pasti warnanya hitam dan



foto: berindo wilson

angkanya di atas tujuh. Pemerintah berjanji mewujudkan negara yang aman dan damai. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi 4%, sekarang 6%, laju inflasi tahun lalu 17% sekarang 6%. Pemerintah juga mampu melunasi utang pada IMF yang berjumlah 7 miliar dolar AS. Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS relatif terkendali pada angka 9.200-9.100.

Dalam soal amandemen UUD 1945, Kalla menilai berlebihan, terutama di dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan. Penilaian Kalla sejalan dengan evaluasi Forum Rektor bahwa pengambilan keputusan menjadi susah dan tidak produktif. Kalau mengambil keputusan harus melalui komisi demi komisi di DPR. Dalam sistem presidensial, sebenarnya presiden hanya mengurus masalah anggaran dengan DPR, tetapi sekarang tidak. Gejolak terjadi di bidang hukum. Misalnya, UU yang bisa dimantahkan oleh MK. Selain itu masih ada MA dan KY. KPK bisa masuk langsung ke MA. "Komplikasinya jadi luas sekali," kata

Kalla.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengantar buku laporan dua tahun pemerintah, *Berjuang Membangun Kembali Indonesia*, bahwa selama dua tahun, sejak 20 Oktober 2004, tak mudah bagi Presiden SBY dan Wapres JK menjalankan pemerintahan dan mencapai kinerja spektakuler. Penyebabnya, bangsa Indonesia menghadapi masalah yang sangat kompleks dan tantangan yang teramat berat. Tulis Suzetta, untuk mencapai cita-cita bangsa, langkah dan kinerja selama dua tahun ini menunjukkan bukti kesungguhan dan kemampuan pemerintah mewujudkan misi, visi dan program pembangunan. Buku laporan tersebut disiapkan dan disusun oleh Bappenas.

Selain berbagai kekurangan, pemerintah mencatat keberhasilan di dalam mengatasi konflik berdarah di Aceh. Pemerintah berhasil menciptakan perdamaian di Aceh dengan penandatanganan nota kesepahaman bagi penyelesaian konflik berdarah Aceh di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Polri juga berhasil meredam aksi-aksi teroris dengan menembak mati gembong teror bom Dr. Azahari yang mengotaki berbagai teror bom di Indonesia selama bertahun-tahun. Polisi juga menangkap pelaku aksi teror Bom Bali II. Situasi keamanan dalam negeri secara umum relatif stabil. Meskipun pemberantasan korupsi dinilai berjalan "tebang pilih" banyak kasus korupsi yang sudah bisa dijaring oleh para penegak hukum; kejaksaan, kepolisian dan KPK.

Peranan internasional Indonesia yang makin meningkat, baik di PBB maupun OKI. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan Ketua Komisi HAM PBB. Di dalam penghentian konflik antara Israel dan Hamas di Palestina, dan dengan Hizbullah di Libanon, Indonesia memainkan peranan yang cukup berarti. Delegasi Indonesia ke sidang darurat OKI di Kuala Lumpur awal Oktober membawa lima usulan penghentian agresi Israel terhadap Libanon dan Palestina. Sebagian besar usulan tersebut diakomodasi di dalam sidang tersebut, antara lain, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera memutuskan gencatan senjata antara Israel, Libanon dan Palestina, melakukan pemulihan pasca perang dan mengupayakan pengiriman pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik. Indonesia sendiri telah mengirim pasukan yang beranggotakan 850 tentara untuk bergabung dengan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Libanon Selatan.

Namun masih saja ada penilaian pesimis terhadap kinerja SBY-JK, misalnya

datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Di dalam pernyataan politiknya, KAMMI menilai bahwa selama dua tahun kepemimpinan SBY-JK belum menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang diharapkan masyarakat. Kontribusi yang diberikan kepada masyarakat belum sebesar dukungan yang telah diberikan masyarakat kepada pemimpin ini. SBY-JK dinilai belum menunjukkan secara penuh keberpihakannya bagi kepentingan nasional dan kerakyatan. Kebijakan menaikkan harga BBM secara drastis telah menyebabkan kesengsaraan masyarakat secara luas. Penyerahan Blok Cepu kepada Exxon menunjukkan tidak adanya *sense of belonging* terhadap aset nasional yang harus dipertahankan.

Menurut KAMMI, sejak bulan pertama menjabat sebagai pemimpin nasional, ketegasan, kekuatan dan kemampuan manajemen SBY-JK diuji dengan datangnya bencana nasional tsunami di NAD. Namun hasil yang dirasakan kini sangat mengecewakan. Demikian juga penanganan korban gempa di Yogya. Kesungguhan mereka juga diuji di dalam penanganan banjir lumpur Lapindo di Sidoarjo. Padahal eksensya sangat mengancam kesatuan masyarakat. "Kepemimpinan SBY-JK dipenuhi retorika bukan fakta," kata KAMMI.

Karena itu, KAMMI menyimpulkan bahwa kepemimpinan SBY-JK sulit diharapkan bisa membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis. Alasannya, karena tidak adanya ketegasan, dan tidak konkritnya sikap dan kebijakannya. KAMMI mendesak agar pemerintahan SBY-JK lebih berpihak kepada kepentingan nasional dan agenda-agenda penegakan hukum. Supaya dilakukan penggantian terhadap menteri-menteri yang memiliki konflik kepentingan.

Politisi senior Akbar Tandjung menyarankan SBY agar mengubah gaya kepemimpinannya yang terkesan cenderung ragu-ragu. "Sudah seharusnya Presiden mengubah gaya kepemimpinan. Sebagai pemimpin, dia harus tegas meskipun berisiko," kata Akbar. Mantan Ketua DPR yang berhasil membawa kemenangan bagi Golkar dalam Pemilu 2004 itu, juga menyarankan sudah saatnya Presiden melakukan evaluasi kritis terhadap kinerja para menteri. Banyak ketidakpuasan publik yang dilontarkan terhadap kinerja para menteri, terutama di bidang ekonomi.

Pemerintah, di dalam memperbaiki kinerjanya, harus berlomba dengan waktu karena memasuki tahun 2007, masing-masing partai mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2009. Mungkin waktu yang tersisa tinggal dua tahun lagi. ■ SH

Kinerja Pemerintahan SBY-Kalla

Kontrak Politik Versus Realitas Politik

Wajah duet kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada awalnya sangat menjanjikan. Di alam socio-politik yang serba baru, sebagai buah reformasi, keduanya tampil mewacanakan hal-hal yang baru.

Karakter dan latar belakang mereka yang serba berbeda diakomodir dalam sebuah kontrak politik, sebelum keduanya maju menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) Juli 2004.

Walau tak pernah terungkap resmi ke publik, namun intisari kontrak keduanya adalah, sebagaimana pernah diungkapkan oleh Jusuf Kalla sebelum menuju Pilpres putaran kedua September 2004, keduanya sama-sama mempunyai *share* dalam hal pembagian tugas dan fungsi Presiden-Wakil Presiden.

Kepada *Tokoh Indonesia*, Jusuf Kalla ketika itu mengatakan tak mau diperlakukan sama seperti Wapres-Wapres Orde Baru sebelumnya, termasuk Muhammad Hatta di era Orde Lama yang tak lebih seperti ban serap saja.

Dasar penentuan *share* yang dimaksud, mungkin, adalah mesin uang dari Jusuf Kalla sejak dari putaran pertama, yang kemudian memperoleh penguatan termasuk Aburizal Bakrie dan dari orang-orang 'smpalan' Partai Golkar lain di putaran kedua. Sedangkan SBY mengandalkan mesin politik-intelijen yang sudah dua tahun sebelumnya dibina, ditambah popularitas sebagai "Jenderal yang Berpikir".

Pembagian saham masih proporsional dalam perekrutan anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sama seperti antara SBY-Kalla, terhadap para menteri pun diikat kontrak politik.

Realitas lapangan mulai bergeser tatkala Jusuf Kalla berhasil memenangkan kursi Ketua Umum Partai Golkar, dalam Kongres di Bali Desember 2004. Institusi Partai Golkar yang sebelumnya bukan pengusung pasangan SBY-Kalla, balik badan menelikung di tengah jalan menjadi partai penguasa.

Sebuah keberuntungan bagi duet SBY-Kalla karena memperoleh dukungan yang kuat di parlemen untuk meluluskan setiap kebijakan politik. Tetapi, sekaligus menjadi musuh dalam selimut bagi Presiden



Ilustrasi: denny

sebab sewaktu-waktu Partai Golkar bisa meminta harga sebagai balasan yang setimpal. Misalnya, kursi di kabinet secara proporsional.

Tarik-menarik terpecahkan dengan keputusan Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet jilid pertama, usai setahun usia kepemimpinannya. Terlihat Aburizal Bakrie hanya dirotasi dari Menko Perekonomian menjadi Menko Kesra.

Merasa bisa mendikte, memasuki tahun kedua usia kabinet tekanan *reshuffle* kembali didengungkan. Suaranya lebih keras dan bergema sebab kadung sudah terlanjur dianggap sebagai *business as usual*.

Berbagai gertak-sambal mengemuka seperti akan mengevaluasi dukungan politik, hingga muncul usul untuk mengusung nama Jusuf Kalla sebagai Capres Partai Golkar tahun 2009 tanpa melalui Konvensi. Gertakan terakhir ini datang dari Lampung, yang bosan Gubernur Sjachruddin ZP tak juga diturunkan supaya bisa digantikan kader Golkar.

Tetapi proteksi dari para pembisik terhadap SBY tak kalah kuatnya. Seperti, SBY adalah Presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat karena itu memiliki legitimasi maksimal untuk berbuat maksimal. Sesuai konstitusi yang dikenal di republik ini adalah 'Presiden bertanggungjawab'.

Kontrak politik antara SBY-Kalla akhirnya menjadi kertas kosong. Keduanya menghadapi realitas politik sendiri-sendiri. Presiden SBY secara sepihak membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3R). Dan Jusuf Kalla terang-te-

rangan mengatakan sama sekali tak dilibatkan dalam pembentukannya.

Mantan Menko Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie menduga, UKP3R dibentuk untuk menandingi kekuatan Wapres Jusuf Kalla. "Untuk mengatasi Wapres, Presiden cukup bilang: 'you cuma ban serap' sehingga tak perlu ada perangkat baru," kata Kwik. Kwik, mungkin termasuk yang tak pernah melihat langsung bunyi kontrak politik SBY-Kalla, juga menyebut pembentukan unit ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan.

Golkar kemudian menggertak lebih keras, tunggu Rapimnas II Tahun 2006 Partai Golkar, 13-16 November 2006. Sesuai realitas politik yang berkembang gertakan ini bukan tak mustahil terwujud. Jika demikian, prediksi Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Suhardiman, SE yang juga Penasehat Sentral Organisasi Swadiri Indonesia (SOKSI), salah satu ormas KINO pendiri Sekber Golkar, bisa terjadi.

Kepada *Berita Indonesia*, Suhardiman mengatakan, Presiden SBY sedang menghadapi berbagai ujian, termasuk berbagai bencana alam merupakan ujian baginya, dan ternyata dia tak lulus uji. Puncaknya, pada Desember ini akan memuncak rasa ketidakpuasan itu hingga memicu munculnya *goro-goro*.

Presiden SBY, kata Suhardiman tak akan sampai menyelesaikan masa jabatannya untuk digantikan oleh seorang satrio piningit. Siapa Satrio Piningit ini, Suhardiman tak memastikan siapa orangnya kecuali menyebut dia belum begitu terkenal, tak pintar-pintar amat. ■ HT

Laksamana (Purn) Widodo AS

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan

Secara umum, stabilitas politik, hukum dan keamanan (Polhukam) terkendali. Namun ada beberapa riak yang belum tertangani tuntas. Semisal kasus di Papua, Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan kasus teror di Poso. Demikian pula berbagai eksekusi dalam kasus Pilkada di beberapa daerah yang berdampak pada

bidang Polhukam. Proses perdamaian di NAD pasca kesepakatan damai Helsinki masih perlu terus dikawal. Apalagi, bulan Desember mendatang Pilkada akan digelar. Tantangan terbesar bagi Widodo saat ini adalah mengkoordinasikan langkah Polri, TNI dan BIN serta Muspida setempat dalam menangani kasus Poso secara tuntas. Mulai maraknya kasus

pembunuhan dan peledakan di Poso bisa jadi karena lemahnya koordinasi dari para aparat terkait termasuk intelijen. Membekuk para pelaku yang sudah termasuk melakukan aksi terorisme ini adalah satu-satunya jalan keluar agar Poso kembali damai. ■ SP



Boediono

Menteri Koordinator Perekonomian

Boediono sejak menggantikan Aburizal diakui berhasil membangun kestabilan makroekonomi. Bahkan, bersama-sama Menteri Keuangan dan Gubernur BI ia sepakat untuk bersama-sama menolak intervensi terhadap BI dari pengusaha dan pejabat tinggi berlatar pengusaha. Namun di sisi lain, ada indikasi para menteri di bidang ekonomi sudah tak dipercaya lagi. Menurut ekonom dari Institut for Development of Economic and Finance (Indef), Fadhil Hasan, pem-

entukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UP3KR) adalah salah satu buktinya. Fadhil dalam pernyataannya yang dimuat dalam surat kabar Media Indonesia (28/10) meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti para menteri yang tidak mampu menerjemahkan visi Presiden. Dikatakannya, tugas UKP3KR bersinggungan dengan tugas Menko Perekonomian Boediono, seperti mendorong perbaikan iklim investasi. Padahal, sudah ada tim eksternal

yang juga berfungsi memberikan masukan kepada Boediono yaitu Faisal Basri, Mudradjad Kuncoro, dan Ar-mida Alisjahbana. Boediono juga harus menghadapi segudang masalah klasik yang makin memburuk seperti angka pengangguran yang meningkat signifikan, jumlah warga miskin naik hampir empat juta jiwa, angka inflasi melonjak 17% pasca kenaikan BBM Oktober 2005, sektor riil tidak bergerak ditandai minimnya investasi, dan rendahnya penyerapan dana perbankan. ■ HT



Aburizal Bakrie

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Setelah gagal menunaikan tugas sebagai Menko Perekonomian, Aburizal masih dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memegang jabatan Menko Kesra. Aburizal, pengusaha papan atas yang masuk ke birokrasi hampir tidak mencatat prestasi selama memimpin kantor Menko Perekonomian. Kesalahannya yang disesalkan dan dikritik banyak orang, merekomendasi kenaikan harga BBM sebesar 120 persen. Ini belum termasuk kegagalan di dalam membangun stabilitas makro ekonomi. Meskipun pernah memimpin KADIN bertahun-

tahun, Aburizal tidak berhasil menggerakkan sektor riil yang terseok-seok.

Ketika memimpin Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat, Aburizal yang mewakili Golkar, kembali dihadang oleh berbagai bencana. Bisa dicatat bencana yang cukup dahsyat, gempa bumi di Nias, Yogyakarta dan tsunami di sepanjang pantai selatan P. Jawa. Koordinasi bantuan untuk para korban bencana terseok-seok. Masih banyak korban yang tinggal di bawah tenda-tenda pengungsian. Sempat merebak kasus percaloan proyek penanggulangan bencana Yogya.

Kejadian terakhir yang menampar

Aburizal adalah semburan lumpur panas Lapindo Brantas yang belum selesai sampai sekarang. Ironisnya, akibat kecerobohan perusahaan pengeboran minyak milik keluarga Bakrie Brothers (Aburizal) ini, ribuan penduduk Sidoarjo menderita tanpa penanganan yang berarti. Mungkin di antara para menteri, Aburizallah yang mencatat nilai merah terendah, menurut penelitian Tempo, nilainya hanya 5,6. ■ SH



Yusril Ihza Mahendra Menteri Sekretaris Negara

Yusril baru saja mengikat tali pernikahan kedua dengan seorang perempuan muda Filipina. Tentu ini bisa memberinya kesegaran di dalam melaksanakan tugas-tugas yang rumit dan berat di

lingkungan Sekretariat Negara. Pada pergantian menteri babak pertama, wakil dari PBB ini, dimutasi dari Menteri Hukum dan HAM yang kini dipangku Hamid.

Peranan Mensesneg memang sudah

banyak yang dipangkas, tidak sedominan di era Orde Baru. Tugas-tugasnya banyak berbagi dengan Mensekab dan Kantor Presiden.

Yusril termasuk sosok yang beruntung karena duduk sebagai menteri di pemerintahan tiga presiden—Gus Dur, Megawati dan SBY. Hasil penelitian Tempo memberinya nilai 6,2. ■ **SH**



Mochamad Ma'ruf Menteri Dalam Negeri

Dari sejumlah persoalan menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, yang paling memalukan adalah “pemberontakan” yang dilakukan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Disebut memalukan, karena walaupun kedudukan Depdagri merupakan induk dari seluruh pemerintahan daerah, namun sejak digulirkannya otonomi daerah, Depdagri tidak saja mandul tetapi hampir seluruh kewenangannya dilucuti daerah-daerah. “Pemberontakan” dalam bentuk pengingkaran terhadap kewenangan pemerintah pusat atas daerah-daerah, tampak dalam produk-produk hukum

yang dihasilkan pemerintah daerah. Sejumlah Perda sepertinya dihasilkan dengan seenaknya oleh pemerintah daerah, tanpa menghormati prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum, khususnya hirarki sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ironisnya, Departemen Dalam Negeri, terkesan kurang tanggap dengan “pemberontakan” itu, walaupun berbagai pihak telah menyatakan keluh kesahnya. Celakanya, kelahiran Perda-Perda bermasalah itu, justru baru mendapat perhatian dari Depdagri setelah memicu konflik horizontal di berbagai daerah, antara masyarakat yang mendukung Perda dengan masyarakat

kat yang menolak Perda. Salah satu contoh dan paling banyak mendapat perhatian publik di seluruh Indonesia adalah Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang pelarangan Pelacuran. Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 itu, menimbulkan kontroversi ketika seorang perempuan yang tengah berdiri di pinggir jalan ditangkap dan diperiksa dengan dugaan sedang akan melacur. Ternyata, perempuan yang ditangkap adalah seorang ibu rumah tangga dari keluarga baik-baik dan keberadaannya di pinggir jalan saat ditangkap, hanya sedang menunggu angkutan kota. ■ **MS**



Hassan Wirayudha Menteri Luar Negeri

Hassan Wirayuda sudah hampir lima tahun menduduki pos Menteri Luar Negeri. Kurun waktu ini merupakan masa kerja menteri terlama dalam satu pos sejak reformasi. Namun, bagaimana kinerja Departemen Luar negeri? Selama pemerintahan SBY-JK, tidak jauh berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Bahkan posisi tawar Indonesia dengan negara-negara tetangganya sendiri pun, seperti Malaysia dan Singapura justru memperlihatkan keterpurukan. Masalah endemik dari persoalan diplomasi dan hubungan luar negeri yang paling menonjol adalah masalah buruh migran Indonesia di Malaysia. Disebut endemik karena persoalan buruh migran hampir mencuat setiap tahun, tanpa penyelesaian mendasar. Bahkan, dalam 10 tahun terakhir, persoalan buruh migran Indonesia seperti gelombang pasang, seiring dengan semakin banyaknya per-

soalan yang menimpa buruh migran (TKI) dan semakin banyaknya buruh migran yang menjadi korban sewenang-wenang majikannya di luar negeri. Ada baiknya jika bercermin pada apa yang dikemukakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Hikmahanto Juwana. Kelemahan hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia, ditengarai karena keberadaan Deplu yang kurang dapat mengakomodasi dan meredakan kepentingan berbagai instansi dan institusi, antara lain karena penguasaan subtansi. Hal itu dikemukakan Juwana pada seminar “Telaah Kritis Mengenai Undang-undang No. 37 Tahun 1999” yang diselenggarakan pada Kamis, 14 Juli 2006 di gedung Departemen Luar Negeri. Juwana yang merujuk pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 37 Tahun 1999 menyebutkan presiden dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri

kepada menteri luar negeri, dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Dalam pelaksanaannya, tutur Juwana, berbagai lembaga dan instansi negara yang memiliki kepentingan dengan luar negeri, ingin berperan dan bertindak sendiri-sendiri. “Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan hubungan luar negeri dan politik luar negeri tidak jelas,” tuturnya. Bahkan, untuk memperkuat posisi dengan luar negeri, masing-masing lembaga, instansi, dan institusi itu diberi legitimasi dalam bentuk perundang-undangan, sehingga masing-masing seolah-olah mempunyai Deplu sendiri-sendiri. Memang harus diakui, ada kemajuan yang cukup menggembirakan dalam kinerja politik luar negeri Indonesia pasca reformasi, yakni masuknya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. ■ **MS**



Juwono Sudarsono

Menteri Pertahanan

Ada kalangan yang menilai Juwono Sudarsono sebagai orang sipil yang terlalu membela TNI. Bahkan menyebutnya sebagai lebih tentara dari tentara. Ini terkait dengan sikapnya menyangkut soal peradilan militer. Terutama mengenai ketidaksetujuannya bila kasus pelanggaran yang dilakukan oknum TNI diajukan ke pengadilan sipil. Mantan Mendiknas dan Dekan Fisip UI serta Wakil Gubernur Lemhannas ini memang harus mereformasi peran dan tugas lembaga pertahanan. Termasuk dalam menangani pengadaan berbagai alutsista

yang dibutuhkan TNI, penanganan bisnis TNI maupun dalam menyiapkan berbagai perundang-undangan di bidang pertahanan bersama dengan DPR. Terkait dengan pengadaan alutsista, Juwono harus berusaha keras meyakinkan DPR untuk meningkatkan anggaran departemennya. Karena jumlah anggaran yang diterima Departemen Pertahanan - termasuk untuk TNI - sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. Dephan - termasuk Juwono Sudarsono - sempat menjadi sorotan DPR terkait dengan pembelian panzer dari Perancis untuk mendukung kesiapan kontingen Garuda

yang diberangkatkan ke Lebanon. Soal bisnis milik tentara (karena TNI tidak boleh lagi berbisnis), Dephan sudah melakukan verifikasi sebanyak 1.520 unit. Terdiri dari yayasan dan usahanya 916 unit dan koperasi 604 unit. Semua bisnis TNI itu masih dalam penanganan Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI. ■ SP



Hamid Awaluddin

Menteri Hukum dan HAM

Berhasil menunaikan misi perdamaian Aceh, Hamid terbawa-bawa kasus dugaan korupsi segel surat suara KPU. Hamid berkali-kali dipanggil ke pengadilan, tetapi baru sebatas saksi. Anggota KPU, Daan Damara yang terjerat hukum meng-

adukan Hamid ke polisi karena dianggapnya memberikan sumpah palsu di depan pengadilan.

Secara umum Menteri Hamid tidak banyak mengalami hambatan di dalam menjalani bidang tugasnya. Tempo memberi angka 6,2 pada rapor Hamid, meskipun

masalah penerapan hukum masih amburadul. Berembus kabar buruk bahwa Hamid salah seorang menteri yang akan terkena skenario penggantian babak kedua. ■ SH



Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan

Pengelolaan keuangan negara, yang menjadi domain Departemen Keuangan adalah mengelola neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat. *Performance* APBN yang bermuara pada tiga kinerja, surplus, seimbang, dan defisit. Kinerja keuangan Indonesia, berada di kategori ketiga, yang ditandai dengan sisi penerimaan lebih kecil dari sisi pengeluaran.

Permasalahan yang dihadapi setiap departemen keuangan di seluruh negara, tidak saja berusaha menciptakan neraca APBN yang surplus, tetapi juga meningkatkan peran APBN dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun, departemen keuangan di bawah pimpinan Sri Mulyani Indrawati, seperti dihadapkan pada buah simalakama. Di satu sisi tidak mungkin men-

ciptakan neraca APBN yang surplus, di sisi lain juga harus ekstra hati-hati menyangkut upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jika dimodali dengan utang.

Menurut Menko Perekonomian Budiono, seperti dilaporkan *Harian Suara Pembaruan*, Selasa (9/5), rasio utang pemerintah mencapai 48,5% pada PDB. Utang luar negeri Indonesia saja, menurut Budiono sebesar US\$79,86 miliar atau mencapai Rp 718 triliun (kurs Rp9.000 per 1 dolar AS). Sementara, Surat Utang Negara (SUN), seperti dilansir *Harian Suara Pembaruan*, Senin (4/9) mencapai Rp 698,353 triliun

Tanggung jawab terbesar Sri Mulyani adalah, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menambah jumlah utang. Salah satu langkah efisiensi Sri Mulyani yang dianggap berhasil adalah penutupan rekening 600 pejabat negara yang dianggap tidak efektif karena sudah

terjadi pergantian pejabat. Penutupan rekening pejabat itu, sebagaimana yang dilaporkan *Harian Suara Pembaruan*, Senin (4/9) memberi tambahan pemasukan negara sebesar Rp 2,8 triliun.

Namun, yang terpenting sesungguhnya adalah bagaimana agar penggunaan anggaran oleh aparaturnya menjadi lebih efisien dalam penyerapannya, akuntabel dan transparan menentang celah korupsi, serta pengembangan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penyalahgunaan uang negara. ■ MS



Anton Apriantono

Menteri Pertanian

Harian *Indo.Pos* (30/10) menyebutkan Anton Apriantono sebagai menteri termiskin di Kabinet Indonesia Bersatu. Anton, setiap kali bepergian ke daerah lebih suka dengan tiket ekonomi, nginapnya pun di rumah petani. Berdasar laporan, harta kekayaan penyelenggaraan negara, total kekayaan Anton hanya Rp 400 juta. "Kalau menteri (pakai) ekonomi, anak buahnya nggak ada yang berani (di kelas) bisnis," ungkap Anton. "Kalau pemimpin tak bisa jadi uswah (tela-

dan, *Red*), jangan berharap anak buah mengikutinya." Jadi, layakkah Anton yang diusulkan PKS ini dipertahankan sebagai menteri karena kesederhanaannya dan rutin mengadakan rapat pimpinan sekali dua minggu? Apakah Anton sudah berada di pihak yang memenangkan petani setiap kali melahirkan kebijakan di bidang pertanian dan pangan? Untuk yang terakhir, sikap Anton masih dipertanyakan. Anton dinilai bersikap tak tegas membela petani ketika muncul kebijakan impor beras. Bahkan, di luar impor resmi yang sudah

diputuskan pemerintah, kendati kalangan DPR masih mencoba menjaganya, baru-baru ini tersiar lagi kabar kalau pihak swasta sudah mengikat kontrak impor beras 250.000 ton dari Vietnam.

Kepada *Suara Pembaruan* (31/10) Anton malah mengatakan, kontrak impor beras yang dilakukan oleh pihak swasta adalah hal biasa dan tidak melanggar hukum. Siapapun bisa melakukan kontrak impor beras, swasta maupun pemerintah. Belum lagi masalah pupuk palsu yang merajalela beredar di pasaran. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan peredaran pupuk ilegal terus terjadi. ■ HT



MS Kaban

Menteri Kehutanan

Sukses dengan gebrakan pemberantasan anggota mafia pembalok kayu (*illegal loggers*), MS Kaban tersandung kasus asap yang menyerbu Singapura dan Malaysia yang telah memojokkan SBY. Tetapi Kaban berkali-kali menyangkal bahwa

asap tebal tersebut dihasilkan oleh kebakaran hutan, tetapi sebenarnya timbul dari aksi pembakaran hutan yang juga dilakukan oleh warga kedua negara.

Kaban yang mewakili PBB memang belum puas sanksi yang dikenakan pada para pembakar hutan ini. Sedangkan

mereka berada di balik pembakaran hutan yang akan dijadikan lahan perkebunan sawit. Kaban juga belum puas dengan langkah aparat penegak hukum untuk menjangkau para pembalok kayu liar. Di dalam penelitian Tempo, Kaban diberi nilai 6,1. ■ SH



Hatta Rajasa

Menteri Perhubungan

Meskipun terjadi beberapa kecelakaan kereta api, Hatta boleh jadi berhasil mengelola angkutan Lebaran, baik yang mudik maupun balik ke Jakarta. Kecelakaan angkutan bisa ditekan seminimal mungkin berkat kesiapan aparat Departemen Perhubungan di dalam

mengantisipasi kemungkinan terburuk. Angkutan Lebaran relatif lancar, tidak ada gejolak kenaikan biaya transportasi.

Hatta melakukan terobosan dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, mengantisipasi kemungkinan padatnya angkutan jalan raya. Menteri yang mewakili PAN ini ingin me-

ngembalikan peranan kereta api, sebagai alat angkutan massal yang relatif aman dan murah. Kenaikan tarif angkutan bus mendorong calon penumpang lebih memilih kereta api yang terhindar dari kemacetan lalu lintas.

Boleh dibilang Hatta termasuk Menteri KIB yang berhasil, sehingga *Tempo* memberinya angka 6,6. ■ SH



Sudi Silalahi

Menteri Negara Sekretaris Kabinet

Banyak orang memandang Sudi sebagai tangan kanan SBY. Memang seringkali terlihat di mana ada SBY di situ ada Sudi. Pamor Sudi pernah tercoreng oleh kasus pemalsuan surat rekomendasi yang berkaitan dengan rencana peremajaan Kantor Kedubes RI di Korea Selatan. Tetapi kasus itu reda setelah Sudi diperiksa polisi

untuk memberi kesaksian. Kasus itu tak berujung, raib begitu saja.

Boleh dibilang menjadi motor penggerak KIB, dan pembantu setia SBY. Karena itu ada anggapan Sudi sebagai perdana menteri bayangan. Tetapi di lingkungan Kantor Presiden sekarang, bertugas 14 pakar dalam berbagai bidang—ekonomi, politik, hukum, pertahanan dan ke-

amanan. Baru-baru ini telah dibentuk tim penilai pelaksanaan reformasi yang beranggotakan tiga orang, termasuk teman kental SBY, Letjen (Pur) Agus Wijaya. Sudi di dalam penelitian Tempo mendapat nilai 6,2. ■ SH



Freddy Numberi

Menteri Kelautan dan Perikanan

Sebagai kementerian teknis yang baru dilahirkan tahun 2001, Freddy Numberi masih perlu banyak melakukan penataan institusional, personalia, dan terutama pembenahan di sisi regulasi untuk membuat bangsa ini berdaulat di laut yang sumberdaya perikanan melimpah ruah. Secara institusi, pembentukan direktorat jenderal yang ada masih belum mencerminkan adanya pemenuhan kebutuhan dan kesiapan menghadapi tantangan di era perdagangan bebas yang kompetitif. Karena konsumen perikanan adalah konsumen global yang mempunyai standar yang tinggi dalam hal jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga keberadaan direktorat jenderal yang baru yang khusus menangani penilikan dan

pengendalian mutu hasil perikanan sangat diperlukan.

Secara personalia, penempatan pejabat eselon satu belum mencerminkan departemen ini sebagai milik sendiri kalangan kelautan dan perikanan. Sejumlah eselon satu di DKP hanya ada dua yang berasal dari sektor perikanan, yakni Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Perikanan Budidaya. Sisanya kebanyakan orang-orang kampus - yang sekiranya gagal bertugas bisa dengan mudah kembali ke kampus, dan pensiunan TNI-AL. Sekjen-nya pun, sebelum ini adalah orang pertanian, lalu diganti tetapi oleh orang kampus. Freddy Numberi masih belum berani menaikkan ke permukaan orang-orang dalam di eselon dua sebagaimana dilakukan Menkeu Sri Mulyani. Dari segi

regulasi, Freddy Numberi masih harus melahirkan sejumlah peraturan sebagai turunan dari UU No. 31/2004 tentang Perikanan. Freddy juga masih harus berpikir dan bekerja keras membangkitkan industri pengolahan ikan Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan industri sejenis di China dan negara lain di ASEAN. ■ HT



Erman Suparno

Menakertrans

Tugas Erman yang masuk ke kabinet setahun lalu memang tidak ringan, memikirkan pekerjaan buat 11% penganggur dari total angkatan kerja. Erman, wakil PKB di kabinet, juga harus memikirkan nasib mereka yang di PHK, dan mengatur arus tenaga kerja tidak terampil keluar negeri, khususnya tenaga kerja wanita (TKW). Sedangkan program transmigrasi terhenti sama sekali sejak lengsernya Presiden Soeharto.

Survei Tempo memberi angka 5,7 untuk

Erman. Di masa kepemimpinannya puluhan ribu buruh di berbagai pabrik, terutama tekstil dan sepatu, sedang menunggu vonis PHK. Lantas apa yang akan dilakukan Erman? Pertanyaan ini harus dijawab dengan langkah berani dan kreatif. Bagaimanapun rakyat butuh lapangan kerja untuk memperoleh penghasilan yang akan menghidupi keluarga mereka. Menaker semestinya memikirkan lapangan kerja untuk mereka yang bergerak di sektor non-formal, dan meningkatkan ketrampilan mereka yang akan

bekerja di luar negeri.

Keberhasilan Erman, paling tidak menghentikan percaloan dan pemerasan terhadap TKI, terutama TKW, yang baru pulang dari luar negeri agar mereka aman dan selamat tiba kembali di kampung halaman mereka. ■ SH



Siti Fadilah Supari

Menteri Kesehatan

Penanganan kasus flu burung yang terkesan lambat, kasus-kasus busung lapar dan polio yang terungkap, demam berdarah dengue yang setiap tahun terjadi, penolakan rumah sakit terhadap pasien miskin masih kerap terjadi karena tidak adanya payung hukum yang jelas, membuat rapor Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari bertambah merah. Akibatnya, sejak RI merdeka, hanya Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari satu-

satunya menteri kesehatan RI yang pernah diinterpelasi oleh DPR RI mempertanyakan kinerjanya selama ini. Tidak bisa disangkal, ruwetnya permasalahan yang dihadapi merupakan dampak dari tidak beresnya sistem dan program kesehatan di masa lalu yang mengabaikan preventif dan promotif. Depkes dimasa lalu hanya menekankan kuratif dan rehabilitasi.

Program adalah pengadaan alat, obat-obatan dan rumah sakit yang berbau

proyek korupsi, kolusi dan nepotisme. Ada yang ingin melayani rakyat, ada pula yang ingin memeras rakyat.

Itu pula yang membuat berbagai kebijakan Depkes tidak mudah diimplementasikan di lapangan. ■ RH



Bambang Sudibyo

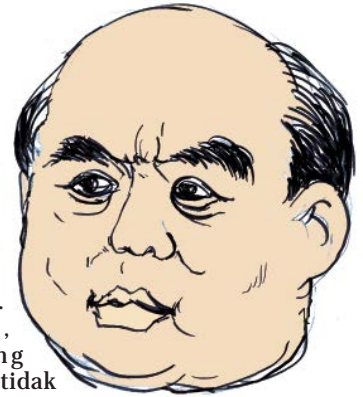
Menteri Pendidikan Nasional

Salah satu langkah konkretnya adalah memekarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi dua lembaga utama. Alasannya, Ditjen (Direktorat Jenderal) Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) terlalu gemuk sehingga rentang kendalinya terlalu luas dan tidak efisien. Penumpukan kekuasaan pada satu titik juga sangat rawan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Akan tetapi, tidak dapat dipastikan apakah hal itu benar-benar menghapus budaya KKN dalam departemen tersebut. Salah satu tugas besar yang perlu mendapat perhatian serius adalah penggunaan dana BOS

(bantuan operasional sekolah) yang lebih efektif dan efisien. Yang terjadi selama ini, meski sudah ada dana BOS (bantuan operasional sekolah), pungutan uang seragam dan uang buku tetap berlangsung di sekolah-sekolah. Depdiknas terkesan tidak bertindak tegas menertibkan hal ini. Mendiknas juga membolehkan perguruan tinggi (PT) untuk membuka kelas jauh di Tanah Air. Pola pikir Mendiknas ini berbeda dengan sebagian besar rektor di Indonesia yang berharap agar perguruan tinggi yang membuka kelas jauh di-tertibkan. Alasannya, pembukaan kelas jarak jauh itu justru menurunkan mutu dan membuka peluang merebaknya pem-

berian gelar dan i j a z a h p a l s u . Namun, Bambang Sudibyo tidak merasa khawatir karena persoalan-persoalan semacam itu sudah ada aturan dan undang-undangnya.

Di sisi lain, prestasi siswa Indonesia di kancah kompetisi internasional semakin meningkat dengan dimenangkannya berbagai olimpiade akademis internasional. ■ RH



Bachtiar Hamsyah

Menteri Sosial

Bachtiar, satu dari lima menteri Presiden Megawati yang berhasil duduk di kabinet SBY. Empat lainnya, Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Hassan Wirayudha, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Bachtiar berhasil mengangkat kembali 'kapal karam' setelah Departemen Sosial dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dia menyusun kembali organisasi dan pegawai Depsos yang kacar-kacir selama pemerintahan Gus Dur.

Depsos hidup kembali ketika pemerintah mengalami berbagai kemelut sosial akibat gempa bumi dan pengusiran ratusan tenaga kerja Indonesia dari Malaysia. Boleh jadi Bachtiar berhasil meredam masalah-masalah yang krusial sehingga tidak

menyebabkan gejolak sosial. Bachtiar tak ingin Depsos yang dibangunnya dengan susah payah hanya sebagai penampung residu pembangunan ekonomi. Wakil dari PPP ini boleh jadi tidak termasuk menteri yang mendapat angka merah. Tempo melupakan Bachtiar di dalam surveinya, tetapi dia pantas mendapat di atas 6. ■ SH

memuncak menjadi gejolak sosial. Bachtiar tak ingin Depsos yang dibangunnya dengan susah payah hanya sebagai penampung residu pembangunan ekonomi. Wakil dari PPP ini boleh jadi tidak termasuk menteri yang mendapat angka merah. Tempo melupakan Bachtiar di dalam surveinya, tetapi dia pantas mendapat di atas 6. ■ SH



M. Maftuh Basyuni

Menteri Agama

Kasus penyimpangan Dana Abadi Umat (DAU) di Departemen Agama sempat menggoyang kursi kepemimpinan Maftuh Basyuni. Ditengarai uang yang dikorup mencapai sedikitnya Rp 1 triliun. Menteri Agama M. Maftuh Basyuni mengakui pernah menggunakan Dana Abadi Umat (DAU). Awalnya, tunjangan itu sebesar Rp 15 juta perbulan. Namun Maftuh merasa itu terlalu besar. Kemudian mulai Januari 2005 diturunkan menjadi Rp 5 juta. Maftuh menerima dana itu karena kapasitasnya sebagai Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat, sesuai dengan Keputusan Presiden No.22 tahun

2001. Semua pengurus menerima dana tersebut yang dimasukkan dalam *cost* tunjangan. Menurut Juru Bicara Departemen Agama Sukanto, perolehan tunjangan dari DAU tersebut, sudah sesuai menurut aturan lama. Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Agama No. 88 tahun 2001. Maftuh siap mengembalikan DAU yang sempat dipakainya. Maftuh menerima DAU sebesar Rp 425,187 juta dan US\$ 5 ribu. Ia pun siap mundur dari jabatannya, jika dianggap keliru menggunakan dana DAU tersebut. Di luar kasus DAU, Menteri Agama ikut berperan dalam penyempurnaan SKB pendirian tempat ibadah.

Pemerintah menambah sejumlah hal dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 / B E R / m d n - mag / 1969 tentang pengaturan pendirian tempat ibadah. Tiga hal yang menjadi dasar proses evaluasi adalah kebebasan beragama tetap dijamin, surat keputusan harus sesuai dengan undang-undang, dan diusahakan tidak menimbulkan multitafsir. Tampaknya tidak banyak yang diperbuat oleh Menteri Kesehatan Maftuh Basyuni selama jabatannya. ■ RH

Tiga hal yang menjadi dasar proses evaluasi adalah kebebasan beragama tetap dijamin, surat keputusan harus sesuai dengan undang-undang, dan diusahakan tidak menimbulkan multitafsir. Tampaknya tidak banyak yang diperbuat oleh Menteri Kesehatan Maftuh Basyuni selama jabatannya. ■ RH



Jero Wacik

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Menbudpar belum membuat kebijakan yang strategis bagi kemajuan pariwisata Indonesia. Bahkan, Indonesia tidak punya lagi badan promosi wisata yang menjual destinasi ke mancanegara serta kantor-kantor perwakilan pariwisata di luar negeri. Singapura punya 16 kantor promosi wisata di luar negeri, Australia punya 17 kantor, Malaysia punya 22 kantor perwakilan, Thailand punya 15 kantor dan Filipina ada 12 kantor di luar negeri. Sementara Indonesia yang dulu memiliki kantor Promosi Pariwisata Indonesia (PPI) di Frankfurt, Singapura, Amerika dan di negara lainnya, hingga

kini tidak buka lagi. Secara nasional, jumlah lalu lintas kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mulai Januari-Agustus 2006 mencapai 2,60 juta turis atau turun 8,63 persen dibanding periode yang sama 2005 yang mencapai 2,85 juta orang. Dan Bali sebagai *central point* pariwisata Indonesia, mengalami nasib serupa. Wisman yang datang ke Bali sampai data Agustus 2006 hanya 242,4 ribu orang atau turun 5,11 persen dibanding Juli 2006 yang mencapai 361,9 ribu turis. Peledakan bom Bali, bencana alam, tsunami, flu burung, isu terorisme, kebakaran hutan yang menimbulkan ekspor asap ke negara tetangga, selalu dipakai

alasan strategis terkait soal grafik penurunan turis asing ke Indonesia. Namun, alasan itu seharusnya tidak menjadi harga mati dalam memajukan pariwisata nasional. Di sisi lain, sosok Jero Wacik adalah pribadi yang menyenangkan. Ia memiliki semangat dan antusiasme untuk membangkitkan pariwisata Indonesia. Sayangnya, semangatnya tidak dibarengi strategi yang matang dan skala prioritas. ■ RH



Sofjan A. Djalil

Menkominfo

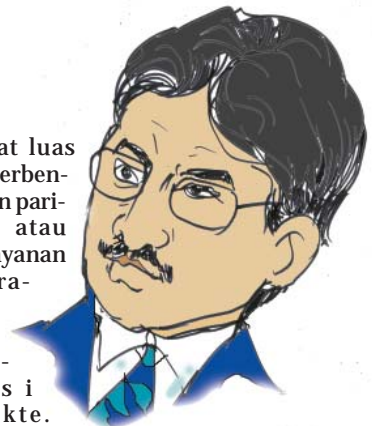
Sektor telekomunikasi adalah *prime mover* pembangunan ekonomi di negara manapun. Tanpa digerakkan pun ia bisa bergerak sendiri. Menteri Komunikasi dan Informasi Sofjan A. Djalil hingga kini masih lebih banyak berkuat mengurus regulasi di bidang telekomunikasi. Regulasi dan keputusan yang sudah ada pun diutak-atiknya sehingga terjadi rotasi di antara sesama pemain atau operator telekomunikasi. Bahkan, nomor ponsel kartu prabayar pun diharuskan Sofjan Djalil untuk didaftarkan. Sesuatu yang rasanya mubasir. Sebab, rakyat biasa sekalipun bisa merasa bangga telah berhasil mengecoh

peraturan menterinya, setelah berhasil mendaftarkan nomor ponsel prabayarnya dengan identitas orang lain yang sudah meninggal dunia, misalnya.

Sejumlah kebijakan Sofjan di bidang regulasi mengundang kontroversi sebab pasti ada pihak-pihak yang dirugikan. Bahkan karena kebijakan tersebut, kata Sofjan, ia membutuhkan bantuan pengamanan ekstra saat melintas di jalan raya. Di belakang mobil dinasnyanya selalu ada membuntuti tenaga pengamanan.

Sofjan Djalil secara halus mulai mengembalikan peran masa lalu Departemen Penerangan ke Depkominfo, dari sisi baiknya. Yakni, memberi informasi ke ma-

sarakat luas tetapi berbentuk iklan parawara atau iklan layanan masyarakat tanpa bertenidensi mendikte. Sofjan memang salah seorang penggagas sekaligus pelaku ide pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di republik ini. ■ HT



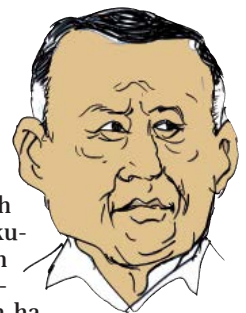
Rachmat Witoelar

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Masalah polusi asap kebakaran hutan dan lumpur Lapindo menjadi PR utama yang harus segera ditangani serius oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup saat ini. Kasus kebakaran hutan, misalnya, memang sarat dengan kompromi sebab banyak dilema yang harus dihadapi. Dilema yang terjadi

misalnya adalah saat pembakaran lahan dilakukan oleh petani kecil yang langsung ditangkap polisi sebagai bukti keseriusan pemerintah. Selain itu, dalam masalah-masalah yang pernah dihadapi seperti kasus pencemaran Teluk Buyat Minahasa, Sulawesi Utara, tempat pembuangan terakhir sampah (TPTS) Bojong, Bogor, Jawa Barat, dan reklamasi pantai DKI

Wilayah Jakarta Utara, pemerintah masih bersikap kurang tegas dan proaktif. Para perusak lingkungan harus ditindak dan dijatuhi sanksi hukum untuk memberi efek jera kepada pelaku dan pihak-pihak terkait lainnya. ■ RH



Meutia Hatta

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta menilai selama ini tindak pidana perdagangan orang belum dijangkau oleh peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan yang ada telah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Namun, pada November ini, Indonesia direncanakan sudah memiliki Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Pembahasan

RUU PTPPO ini dimulai sejak 28 September. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (PP) juga melaksanakan program kesetaraan gender di tujuh provinsi, yaitu Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Jawa Timur. Dengan menganggarkan dana Rp 375 juta, program tersebut diharapkan dapat membentuk jaringan dan mekanisme komunikasi, meningkatkan pemahaman dan kemampuan antar institusi media massa, organisasi keagamaan, LSM, profesi dan

swasta serta organisasi sosial dan politik dalam pembangunan pemberdayaan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di provinsi dalam rangka pengarusutamaan gender. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan (PP) akan meratifikasi peraturan-peraturan yang tidak memihak kepada perempuan. Salah satunya Perda Pelacuran yang diterapkan di Tangerang. Disebutkannya, ada sekitar 28 peraturan, termasuk UU, Perpu dan Perda, yang masuk dalam peraturan yang tidak memihak kepada perempuan, seperti Perda Keluar Malam dan Perda Larangan Pelacuran yang diterapkan di Tangerang. ■ RH



Djoko Kirmanto

Menteri Pekerjaan Umum

Perekonomian akan dapat bergerak maju hanya jika tersedia infrastruktur fisik. Syarat pembangunan adalah tersedia infrastruktur pembangunan. Infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi berlipat kali ganda dan berefek multi ke semua sektor kehidupan.

Djoko Kirmanto selaku Menteri Pekerjaan Umum dipercaya memimpin sebuah departemen yang secara khusus

membangun dan memelihara infrastruktur fisik pembangunan. Selama masa krisis ekonomi, bahkan masih berlaku hingga sekarang, departemen ini memiliki fungsi ganda yaitu membangun infrastruktur sambil memberikan lapangan kerja kepada pengangguran yang banyak tumbuh baru belakangan ini.

Sayangnya Bank Dunia justru menyorot departemen ini dengan dugaan telah terjadi tindak korupsi di sejumlah proyek yang

didanai, sampai-sampai pimpinan Bank Dunia berani menyurati Menkeu. Tak mengherankan pula apabila banyak kesepakatan bisnis yang sudah ditandatangani dalam berbagai kesempatan kesempatan Indonesia Infrastructure Summit, terbukti tak semua terealisasi menjadi proyek benaran. ■ HT



Taufiq Effendi

Meneg PAN

Kinerja aparat birokrasi masih banyak dikeluhkan warga masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Reformasi di bidang birokrasi seakan berjalan di tempat. Kendati memang tak semudah membalik telapak tangan, masalah pembenahan dan pemberdayaan aparatur negara terkesan masih amburadul. Padahal lembaga Meneg PAN (Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara) ini sudah ada sejak era Presiden Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY sekarang ini. Taufiq Effendi memang sudah berusaha melakukan pembenahan. Termasuk menertibkan 242 ribu PNS yang berstatus tidak jelas, 66 ribu PNS yang menerima gaji double dan merugikan keuangan negara ratusan

miliar. Mengangkat ratusan ribu tenaga honor di bidang pendidikan, kesehatan di pusat dan daerah. Perbaikan gaji pegawai juga dilakukan. Ia pun melakukan inspeksi mendadak dan berbagai terobosan lainnya. Namun kenyataan belum menunjukkan hasil optimal. Bahkan terkesan para birokrat (PNS) belum melaksanakan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebaliknya, secara terang benderang – terutama yang tugas dan fungsinya melayani publik – lebih condong berperilaku sebagai “biro jasa”. Dengan tak segan-segan meminta imbalan dari masyarakat yang berurusan dengan mereka. Contoh konkret lainnya yang nampak di depan mata adalah masih rendahnya disiplin pegawai. Kendati sudah menikmati liburan panjang di waktu Le-

baran, kenyataannya banyak PNS yang masih membolos. Belum lagi, masalah 65 % PNS yang katanya tidak mempunyai *job description* yang jelas. Semua itu menunjukkan betapa penataan atau reformasi birokrasi belum seperti yang diharapkan. Yakni bagaimana membuat fungsi pelayanan publik bisa berjalan cepat, lancar, mudah dan tidak berbelit-belit serta menghilangkan mental korup. Tantangan nyata bagi Meneg PAN adalah mewujudkan itu. Tidak saja menyangkut sistem administrasi tapi juga aspek mentalitas. Sehingga aparatur birokrasi benar-benar bisa berfungsi menjadi penggerak mesin pemerintahan dalam rangka *good governance*. ■ SP



Paskah Suzetta

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

Paskah Suzetta masuk dalam Kloter kedua Kabinet, atau hasil *reshuffle* jilid-I menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang digeser ke Depkeu.

Posisi Paskah dianggap penting sebab ia satu-satunya menteri berdarah Sunda. Karenanya terkadang Paskah diguyoni

sebagai "Menteri Jawa Barat". Tetapi sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah tergolong tegas, dengan mengatakan pemerintah tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sudah disepakati dengan DPR yakni 5,8% tahun ini.

Paskah mengakui angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan-I agak rendah, tetapi

target pertumbuhan 5,8% merupakan akumulasi dari pertumbuhan ekonomi triwulan 1-4. "Kita lihat ekspor pada triwulan kedua naik, jadi saya optimis masih bisa mencapai angka 5,8%," kata Paskah. ■ HT



Sugiharto

Meneg BUMN

Di pundak Meneg BUMN Sugiharto dipercayakan pengelolaan total aset perusahaan negara senilai Rp 1.000 triliun. Oleh karena itu, mantan Direktur Keuangan Medco Group ini harus mendongkrak kontribusi BUMN terhadap negara berbentuk pendapatan pajak. Bila pada tahun 2000 pendapatan pajak Rp 9,37 triliun, tahun 2005 naik menjadi Rp 41,97 triliun. Dan, nilai deviden Rp 5,4 triliun tahun 2004, menjadi Rp 12,8 triliun tahun 2005.

Media Indonesia (20/10) menulis, di luar

Pertamina, pada tahun 2006 ini seluruh BUMN hanya ditargetkan bisa menyeter deviden ke pemerintah Rp 7,7 triliun. Hasil privatisasi dalam APBN-P Rp 3 triliun. Selama ini dana privatisasi murni dimaksudkan untuk menutup defisit APBN. Tahun depan Sugiharto akan menggeser penggunaannya. Dari rencana tahun 2007 dan privatisasi Rp 3 triliun, 39% atau Rp 1,3 triliun diantaranya dialokasikan untuk penyertaan modal negara (PMN), sisanya Rp 2 triliun untuk membiayai BUMN.

Tahun 2006 ini sejumlah BUMN sudah

antri menunggu uluran tangan PMN dari Sugiharto. Seperti Kertas Kraft Aceh, Merpati Nusantara Airlines, Kereta Api Indonesia, Sang Hyang Seri, Garuda Indonesia. Tahun 2007 ditargetkan Kereta Api Indonesia, Garuda Indonesia, Kertas Leces, Pupuk Iskandar Muda, Sarana Pembangunan Usaha, Boma Bisma Indra, dan Perkebunan Nusantara XIV. Sugiharto berkilah, PMN diberikan karena BUMN itu karena ada masalah keuangan, atau, mengemban misi pelayanan publik dan perannya itu harus tetap terjaga. ■ HT



Adhyaksa Dault Menpora

Belum terlihat secara menonjol hasil buah tangan menteri yang satu ini. Khususnya dalam membina dan menata kegiatan kepemudaan maupun keolahragaan di tanah air. Kendati sudah ada UU No.3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, namun Peraturannya belum tersusun. Secara umum, prestasi olahraga di forum dunia masih belum

bersinar kalau tidak mau dikatakan redup. Bahkan cenderung menurun. Cabang olahraga unggulan seperti bulutangkis mengalami kelesuan.

Piala Thomas dan Uber yang pernah bersanding di Indonesia juga terlepas. Sementara cabang olahraga sepak bola terkesan jauh terpuruk. Demikian pula cabang-cabang olahraga lainnya. Indonesia hingga kini belum bisa bicara banyak di

forum dunia (olimpiade), bahkan di forum yang lebih kecil seperti Asia (Asian Games) atau pun Asia Tenggara (SEA Games). Indonesia yang pernah berjaya di Sea Games dengan menjadi juara umum, kini merosot jauh di bawah Malaysia dan Filipina. Langkah-langkah perbaikan memang sudah coba dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. ■ SP



Yusuf Ashari

Menpera

Namanya jarang sekali terdengar di radio, sosoknya hanya sesekali muncul di layar televisi, dan fotonya sulit ditemukan di surat-surat kabar. Program Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) yang dijagokan PKS ini hampir tak kelihatan, padahal masih jutaan pasangan ke-

luarga yang membutuhkan perumahan.

Lantas apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam dua tahun yang sudah berlalu? SBY hampir tidak mempersoalkan kinerja menteri yang satu ini. Yusuf tampil dengan gagasan membangun rumah susun 20 lantai dengan mengundang investor dari Timur Tengah. Yusuf juga

masih terus mengkaji program sejuta rumah.

Dalam dua tahun ini, keberhasilan Yusuf hanyalah menghidupkan kembali kementerian yang dikubur sejak pemerintahan Gus Dur dan Megawati agar nafasnya terus berdebut. ■ SH



Abdul Rahman Saleh Jaksa Agung

Dua tahun kinerja Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh (Arman) dinilai kurang optimal oleh kalangan pakar hukum. Jak- gung juga dinilai belum mampu menan- capkan visi bahwa pejabat nonkarier dapat memimpin kejaksaan. Reformasi di kejaksaan berjalan lambat.

Sebagai contoh, masih diterapkannya PP 110/2000 dalam kasus korupsi di daerah. Instruksi Jaksa Agung tampaknya tidak sampai ke pejabat kejaksaan di daerah. Ini jelas ada permasalahan terkait komunikasi jaksa agung dengan pejabat di daerah. Selain soal kasus PP 110, contoh lain adalah pelaksanaan pembersihan jaksa nakal di kejaksaan, yang dinilai tidak berjalan tuntas. Jaksa agung hanya

mengedepankan pencitraan daripada membangun sistem pengawasan yang efektif. Meski kasus pencopotan Rusdi Taher dari Kepala Kejati DKI bisa dijadi- kan bukti keseriusan pengawasan ke- jaksaan, namun masih timbul pertanyaan lain. Apakah penindakan jaksa nakal hanya terjadi di Jakarta, sedang jaksa di daerah tidak tersentuh? Selain itu, se- jumlah anggota Komisi III DPR saat rapat kerja dengan jaksa agung dan jajarannya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/9), mempertanyakan kepemimpinan Arman dalam kasus puluhan jabatan kosong selama lebih dari tiga bulan. Beberapa kepala kejaksaan tinggi masih merangkap dua jabatan, seperti Kajati Kalteng dan Sulsel yang masih menjabat sebagai Kajati

Jateng dan Kalsel. Me- reka juga mengkon- firmasi soal Jaksa A g u n g yang ja- rang meng- gelar rapat koordinasi de- ngan jajarannya. Mengenai kri- tikan tajam itu, Abdul Rahman Saleh hanya ber- ucap, "Itu pendapat mereka, saya juga punya pendapat, tinggal diuji pendapat mana yang benar." Di sisi lain, keseriusan Kejaksaan Agung meng- gelar sidang *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa) terhadap koruptor yang kabur ke luar negeri masih perlu diuji. Efektivi- tas dari penayangan para koruptor di te- levisi juga belum terasa dampaknya. ■ RH



Marsekal TNI Djoko Suyanto Panglima TNI

Walaupun belum setahun men- jabat Panglima TNI (di- lantik 13 Maret 2006) Marsekal Djoko Suyanto sudah menghadapi berbagai persoalan. Mulai dari soal hak pilih TNI, bisnis TNI, peradilan militer sampai kasus penim- bunan senjata yang melibatkan almarhum Brigjen Koemayanto. Namun Marsekal kelahiran Madiun 2 Desember 1950 ini tetap konsisten melanjutkan reformasi di tubuh TNI guna mewujudkan prajurit yang profesional dan tidak terlibat politik praktis. Terkait dengan hak pilih TNI,

Djoko Suyanto telah melakukan jajak pendapat. Ia juga telah mengambil ber- bagai langkah untuk mengamankan pu- lau-pulau terluar serta meredam aksi-aksi separatisme. Sedangkan peningkatan profesionalisme dilakukan melalui ber- bagai pendidikan dan latihan, termasuk menggelar latihan antar matra dengan negara-negara tetangga. TNI juga ikut berperan menciptakan perdamaian dunia dengan mengirim kontingen Garuda XXIII di bawah bendera PBB ke Lebanon. Kendati belum sepenuhnya berhasil (karena keterbatasan anggaran), upaya

meningkatkan pembinaan kekuatan me- lalui alutsista sesuai kebu- tuhan dan meningkat- kan kesejah- teraan praju- rit secara ber- tahap terus dilakukan. Tantangan ke depan adal- ah bagaimana terus melakukan reformasi di tubuh TNI karena tuntutan ke arah itu senantiasa berkembang dan merupakan proses tanpa akhir. ■ SP



Jenderal Pol. Sutanto Kapolda

Kasus teror di Poso merupakan tantangan di depan mata yang harus segera ditangani Polri, di samping berbagai ancaman kamtibmas lainnya. Karena dikhawatirkan kasus Poso ini bisa ber- potensi kembali menjadi konflik antar kelompok/agama. Di era kepemimpinan Sutanto, Polri sempat menggoncang dunia perjudian, membongkar pabrik narkoba dan menangkap para pelakunya. Me- newaskan gembong teroris Dr Ashari dan

membongkar jaringannya. Sementara teroris lainnya, Noordin M Top, masih buron dan belum tertangkap. Sutanto juga melakukan penertiban ke dalam. Misal- nya dalam kasus Bank BNI yang melibat- kan sejumlah petinggi Polri. Juga dalam kasus rekening pejabat Polri, kendati masih ada kalangan yang mempertanya- kan kelanjutan penanganan kasus ter- sebut. Berbagai kasus lainnya yang men- jadi 'utang' Polri diantaranya adalah penuntasan kasus ijazah palsu, kasus *ille-*

gal logging, ke- bakaran hutan dan lahan. Termasuk pula mentahya kasus terbu- nuhnya ak- tivistis Munir pasca dibebaskannya Polly- carpus oleh Mahkamah Agung. Karena menurut MA, Pollycarpus terbukti tidak melakukan pembunuhan terhadap Munir. ■ SP



Mari Elka Pangestu

Menteri Perdagangan

Sedikitnya ada dua persoalan besar yang dihadapi Mari Elka Pangestu bersama jajaran departemen perdagangan yang dipimpinnya. Pertama, rendahnya daya saing produk-produk nasional, sehingga tidak kompetitif, baik di pasar domestik, terlebih di pasar global. Kedua, rendahnya daya beli masyarakat, sehingga kinerja sektor perdagangan dalam negeri mengalami stagnasi. Dampak dari rendahnya daya saing itu mengakibatkan ketidakmampuan Indonesia memanfaatkan momentum perdagangan yang muncul. Ekonom Bank Pembangunan Asia (ADB)

Amanah Abdulkadir, misalnya, seperti dilaporkan *Harian Kompas*, (7/4), mengungkapkan pasar ekspor di berbagai negara diperkirakan meningkat tahun 2006. Permintaan terhadap barang elektronik dan tekstil dunia, diperkirakan mengalami lonjakan. Namun sayangnya, daya saing lemah akibat ekonomi biaya tinggi membuat Indonesia tidak mampu memanfaatkan peluang itu secara optimal. Sementara, akibat dari turunnya daya beli masyarakat, daya serap pasar terus menurun. Namun, di tengah-tengah persoalan daya saing itu, volume perdagangan luar negeri Indonesia justru relatif membaik.

Untuk periode Januari-Mei 2006 misalnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) volumenya justru meningkat dari tahun sebelumnya. Bahkan nilai ekspor bulan Mei yang mencapai 8,34 miliar dolar AS, merupakan nilai impor tertinggi sepanjang berdirinya Republik Indonesia. Menurut Kepala BPS Rusman Heriawan, nilai ekspor Januari-Mei 2006 sebesar 38,39 miliar dolar AS, mengalami peningkatan sebesar 13,40% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara nilai impor bulan Mei meningkat hingga 9,79% dibanding ekspor April. Peningkatan nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari-Mei didorong melonjaknya harga komoditas ekspor berbasis sumber daya alam, sementara komoditas industri manufaktur justru mengalami keterpurukan. ■ MS



Purnomo Yusgiantoro

Menteri ESDM

Purnomo Yusgiantoro dikenal sebagai menteri pembawa kebijakan tunggal pengerek harga bahan bakar minyak (BBM) mengikuti fluktuasi dan standar harga internasional.

Sejak pertamakali diangkat menjadi menteri di era KH Abdurrahman Wahid (26 Agustus 2000-23 Juli 2001) menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono, berlanjut di era Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004), Purnomo telah berkali-kali menaikkan harga BBM.

Demikian pula menaikkan tarif dasar listrik (TDL), kendati suplai listrik dari PLN belakangan ini semakin sering padam.

Kenaikan BBM yang tak akan pernah terlupakan oleh rakyat terjadi tahun 2005, naik dua kali, terutama kejadian bulan Oktober yang langsung mengerek lebih banyak jumlah orang miskin baru. Tapi Purnomo konsisten, kalau harga minyak dunia turun ia pun menurunkan harga BBM di dalam negeri.

Tetapi, cukupkah langkah demikian untuk menunjukkan pemerintah telah

melaksanakan pasal 33 UUD '45? Sebab, barang tambang, minyak bumi, dan gas murni kekayaan alam yang tak terbarukan yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat?

Purnomo ternyata justru memperoleh tentangan perihal kebijakannya memomorduakan perusahaan migas dan pertambangan dalam negeri, terutama di Cepu, Natuna, Tangguh dan lain-lain. Tingginya perlawanan terhadap kebijakan Purnomo sampai-sampai mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berbicara untuk menyakinkan investor asing, bahwa Indonesia tidak akan melakukan nasionalisasi perusahaan asing. ■ HT



Fahmi Idris

Menteri Perindustrian

Sejak krisis ekonomi pertengahan 1997, persoalan yang senantiasa menghambat pemulihan ekonomi adalah sektor rill. Walaupun kinerja ekonomi makro sudah mengalami perbaikan yang signifikan, selalu saja gagal ditransmisikan ke sektor rill. Oleh karena itu, ketika sektor industri, baik yang berorientasi domestik maupun yang berorientasi ekspor, tidak mengalami perkembangan, segera memicu tingginya tingkat pengangguran. Faktor utama yang menghambat kinerja sektor industri, selain faktor-faktor *endowment* (bawaan), juga karena iklim investasi yang belum mampu merangsang hadirnya investasi baru. Untuk menghindari keengganan investor, terkait dengan pro-

duk-produk hukum pemerintah daerah, Presiden SBY mengajak seluruh pimpinan daerah dan bangsa untuk membuktikan Indonesia dapat menjadi tempat terbaik bagi investasi asing. Hal itu diungkapkan Presiden dalam sambutannya pada rapat kerja Forum Kerja Sama Antarpemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2006 di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (5/9). Sedangkan untuk investasi dalam negeri, hambatan paling besar adalah tingginya suku bunga kredit perbankan. Sementara daya serap pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan, justru tidak mengembirakan karena kinerja daya beli masyarakat justru cenderung turun. Hal ini mendorong keengganan pelaku industri untuk meningkatkan produksinya.

Sementara itu, kinerja sektor industri manufaktur berbasis padat karya, juga semakin merisaukan. Lesunya kinerja industri manufaktur itu disebabkan tingkat penjualan yang anjlok, likuiditas yang semakin terbatas, minimnya kucuran kredit, tingginya suku bunga, yang kemudian semakin diperparah dengan banyaknya barang ilegal di pasar.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Perindustrian Fahmi Idris diharapkan mampu mendorong dan mensinergikan iklim investasi yang semakin kondusif di masa-masa mendatang sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja sektor industri dan sekaligus meningkatkan penyediaan lapangan kerja. ■ MS



Drs. Saifullah Yusuf

Meneg PPDT

Kasus bencana kelaparan yang terjadi di Yahukimo, Papua bisa menjadi contoh betapa masih adanya warga bangsa ini yang "terabaikan" kesejahteraannya. Faktor keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penyebab di samping berbagai faktor lainnya. Kondisi serupa tidak hanya dihadapi masyarakat di Yahukimo. Karena di republik ini masih terdapat sekitar 199 kabupaten yang masuk kategori tertinggal. Sebagian besar berada di kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT dan NTB.

Kalau di tahun 2005 lalu pihaknya telah mengidentifikasi kecamatan tertinggal, di tahun 2006 ini mulai dilakukan identifikasi desa tertinggal di seluruh pelosok Nusantara. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan di desa-desa tertinggal serta sejumlah daerah yang dilanda konflik seperti Poso.

Pada tahun 2005 lalu pemerintah berhasil melakukan pendataan dan pembangunan di 32 kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia. Sedangkan pada tahun 2006 ini, pemerintah melakukan percepatan pembangunan secara menyeluruh

di 32 ribu desa dari 70.611 desa tertinggal atau sekitar 44 persen. Melalui P2DTK (Program Percepatan Desa Tertinggal dan Khusus) diharapkan pada tahun 2006 tidak lagi ada desa yang tidak tersentuh program pemerintah tersebut. ■ SP



Ir. Kusmayanto Kadiman

Menristek

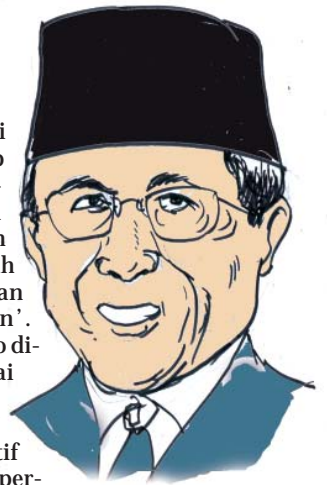
Menteri Negara Riset dan Teknologi, beberapa waktu yang lalu memang kebanyakan tugas yang tak kalah beratnya. Ketika harga minyak di pasar dunia terus melonjak dampaknya sangat memberatkan perekonomian Indonesia. Subsidi BBM membengkak. Karena itu Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi dipacu untuk melakukan riset bagi kemungkinan mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) sebagai pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM).

Setelah Pada tanggal 14 Juni Menristek dan jajarannya melakukan presentasi di depan Presiden Susilo Bambang Yudho-

yono (14/7), Kumayanto ditugaskan melakukan koordinasi dengan Menteri SDM, BUMN, dan juga Dirut Pertamina untuk mempersiapkan *blue print* pemanfaatan dan pengembangan BBN. Nantinya Pertamina akan memasarkan *Bioethanol dan Biopremium* di samping Biosolar yang sudah dipasarkan.

Hal yang lain yang menjadi perhatian Ristek adalah masalah peringatan dini terhadap gempa bumi dan tsunami. Itu terkait dengan hajat hidup orang banyak terlebih lagi dengan letak geografis Indonesia yang berada pada kawasan rawan gempa dan lempeng patahan bumi. Menteri kelahiran Bandung 1 Mei 1954 ini

mempunyai moto hidup 'saya mendengar, saya belajar, dan saya berubah & melakukan perubahan'. Kusmayanto dinilai sebagai menteri yang kreatif dan pro-aktif menangani permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. ■ SB-SH



Suryadharma Ali

Menteri Koperasi dan UKM

Masih sangat jarang terangkat ke permukaan apa saja kebijakan dan program pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang pernah ditelurkan oleh mantan direktur PT HERO Supermarket Suryadharma Ali ini.

Ali, mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lulusan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ini agaknya memperoleh kursi menteri sebagai portofolio Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tak heran apabila politisi

yang pernah memimpin Komisi V DPR RI ini terlihat sebagai calon terkuat pengganti Hamzah Haz di PPP sebagai ketua umum dalam mukhtamar partai tahun 2007.

Belakangan pengembangan koperasi dan UKM sudah bukan urusan pemerintah semata. Sejumlah perusahaan swasta yang tergolong bersih dan peduli mewujudkan tanggungjawab sosialnya dengan membina UKM secara struktural. Dan terbukti, badan usaha koperasi dan UKM binaan pemerintah dan swasta yang berhasil dalam bisnisnya akan di-

sorot menjadi ikon keberhasilan masing-masing pihak. Jadi, kalau ingin sukses secara paripurna bina pulalah koperasi dan UKM lalu tampilkan dalam bentuk iklan mewah. ■ HT



UKP3R Diminta Berhenti Sebelum Melangkah



foto: www.presidensby.info

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Wapres Jusuf Kalla membahas masalah UKP3R.

Tekanan dari Partai Golkar dan berbagai pihak membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpikir ulang untuk mengoperasionalkan UKP3R. SBY tak ingin Golkar menarik dukungan lantaran unit kerja tersebut.

Hanya dalam usia 35 hari, Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diindikasikan akan disusun ulang. Sikap ini diambil SBY- sikap yang tidak tegas dan mudah goyah - setelah mengadakan pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla di ruang kerja Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11). Agaknya JK merasa keberatan dengan hadirnya unit baru di sisi presiden, apalagi pembentukannya tidak dikonsultasikan dengan dia.

Seperti digambarkan oleh sejumlah petinggi kunci Golkar, hubungan harmonis kedua pimpinan puncak eksekutif tersebut terganjal setelah kelahiran UKP3R yang dipimpin Marsillam Simandjuntak didampingi Letjen (Pur) Agus Wijaya dan T. Gerungan. Semula unit tersebut di-

bentuk sebagai pembantu presiden untuk menilai pelaksanaan reformasi, terutama di bidang ekonomi, birokrasi dan penegakan hukum. Untuk mengesankan keharmonisan, keduanya muncul dari pertemuan, mengendarai *golf car* menuju Masjid Baiturrahman untuk menunaikan shalat Jum'at.

Jubir Presiden, Andi Mallarangeng menjelaskan tentang pertemuan tersebut bahwa SBY menegaskan kepada JK, bahwa UKP3R tidak mengubah peran dan tugas Presiden, Wapres, menteri koordinator, maupun seluruh anggota kabinet. UKP3R juga tidak mengkoordinasikan tugas-tugas menteri. UKP3R dibutuhkan Presiden untuk memantau dan mempercepat jalannya agenda reformasi. Tetapi penjelasan itu tidak mengubah sikap JK yang menolak kehadiran unit kerja tersebut. Usai pertemuan dengan

SBY, JK menjelaskan kepada pers, mereka sepakat bahwa koordinasi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sudah menyatu dalam kabinet. Karena itu tidak dibutuhkan lagi koordinasi lain, seperti dari UKP3R.

Dalam pertemuan juga dibahas langkah-langkah pemerintah di bidang ekonomi setelah melihat indikator ekonomi makro yang terus membaik. SBY pada kesempatan itu memberi tugas khusus kepada JK untuk membantu mendalikan komitmen investasi yang selama ini telah dilakukan pemerintah dengan sejumlah pihak.

SBY Kaji UKP3R

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar pembentukan UKP3R tidak untuk kepentingan Pemilu 2009. "Saya setuju jika unit ini bertujuan menguatkan hubungan antar-lembaga dan kementerian yang sudah ada. Tapi jangan sebaliknya dan jangan untuk kepentingan pemilu," ujar Hidayat Nur Wahid (3/11). Tetapi Gubernur Lemhanas Muladi mengingatkan, partai politik tidak perlu emosional menanggapi pembentukan UKP3R. Karena, unit kerja itu hanya lembaga ad hoc, bersifat sementara, dan setiap saat bisa dibubarkan. Di sisi lain, Muladi juga mengingatkan agar Marsilam dan anggota UKP3R lainnya tidak *over acting* dalam melaksanakan tugasnya, sehingga melebihi kewenangan menteri koordinator atau Wapres.

SBY akan mengkaji lagi keberadaan UKP3R. Kata JK, nanti lembaga ini hanya akan mengurus hal-hal teknis. Namun JK menilai keberadaan UKP3R bisa tumpang-tindih dengan tugas Wapres. Itu karena salah satu otoritas UKP3R mengontrol kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.

Ketua DPP Partai Golkar Firman Su-bagyo mengungkapkan, dalam pertemuan terbatas dengan JK di sela Rakornas LPP Golkar (3/11), sejumlah petinggi partai, juga JK, menyatakan kecewa atas pembentukan UKP3R.

Urgensi pembentukan UKP3R juga dipertanyakan oleh fungsionaris Partai Golkar Anton Lesiangi. Pasalnya tugas yang diemban UKP3R sudah menjadi tugas sehari-hari kementerian yang ada di kabinet. "Jadi buat apalagi lembaga itu dibentuk sebab sudah ada Wakil Presiden dan para menteri yang membantu tugas-tugas Presiden," kata Anton. ■ **SH**

Khutbah 'Ied Al-Fithri 1427 H Syaykh Al-Zaytun

Beraktivitas untuk mencapai masa depan yang terhormat, memerlukan pengendalian diri, masing-masing pada proporsinya. Itulah wujud saling ketergantungan satu dengan lainnya (interdependensi) dalam beraktivitas. Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang mengemukakan hal itu pada Khutbah 'Ied al-Fithri 1427 H/2006 M, di Kampus Al-Zaytun, pada tarikh 01 Syawal 1427 H (24 Oktober 2006 M).

Di hadapan lebih 7.000 jamaah, terdiri dari para eksponen Al-Zaytun, tamu dan para wali santri yang datang dari berbagai daerah, termasuk koordinator wali santri dari seluruh Indonesia, serta penduduk setempat, Syaykh Panji Gumilang, tokoh pemangku pendidikan bervisi toleransi dan perdamaian itu mengatakan semakin panjang rantai saling ketergantungan, individu makin banyak belajar mengendalikan dirinya sendiri, dan individu semakin terbebas dari nafsunya sendiri.

Menurut tokoh pembelajar demokrasi, toleransi dan perdamaian itu, makin panjangnya rantai saling ketergantungan, tak hanya berkaitan dengan makin kuatnya pengendalian atas kemauan individual, tetapi juga berkaitan dengan makin meningkat kepekaan terhadap orang lain dan diri sendiri. "Makin tingginya derajat kepekaan ini merupakan aspek kunci proses peradaban dan menjadi penyumbang utama perkembangan peradaban selanjutnya," kata Rektor Universitas Al-Zaytun Indonesia itu.

Pendiri dan pemimpin Al-Zaytun, lembaga pendidikan berseamang pesantren tapi bersistem modern, itu menegaskan: "Kunci proses peradaban adalah pengendalian diri." Pengendalian diri dimulai dengan cara pengendalian melalui orang lain dari berbagai segi, kemudian diubah menjadi pengendalian diri. Kemudian aktivitas manusia yang bebas berdasar naluri didesak ke belakang panggung kehidupan komunal manusia yang selanjutnya ditanamkan menjadi perasaan malu, kemudian diciptakan cara, norma umum masyarakat yang terus menerus dipengaruhi oleh pengendalian diri yang makin lama makin stabil dan mumpuni.

Cendekiawan alumni Ponpes Gontor dan IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, itu mengatakan: "Memasuki masa depan yang bermakna adalah kemampuan dan kepiawaian kita *men-solving problem* masa kini. Kita katakan sebagai kepiawaian, sebab untuk

menanggulangi berbagai macam masalah memang tidak ada jawaban rasional tunggal, karenanya diperlukan berbagai jawaban yang rasional."

Menurut Syaykh Panji Gumilang, agaknya jawaban-jawaban rasional yang harus ditampilkan untuk memasuki masa depan terhormat tentunya meniti pada kapital-kapital yang telah kita miliki, yang semua kapital-kapital itu harus diperkuat dengan ilmu pengetahuan, yang dapat memperhalus kepekaan kita terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi atas pendirian-pendirian yang tak mau dibandingkan.

"Kita yakin masyarakat kita (Indonesia) akan terus berkembang maju secara evolusioner menuju ke kepribadian dan moral yang ideal, setelah melewati berbagai fase yang mendahuluinya. Dari masyarakat militan menuju kepada masyarakat pendidikan," Syaykh optimis.

Namun, katanya, kita sadari bahwa perubahan sosial tidak dapat sekali jadi, memerlukan ketekunan dan ke-lumintu-



Sholat 'Ied Al-Fithri 1427 H di Masjid Al-Hayat diikuti 7.

H/2006 M

an kemauan dan tindakan. Pendekatan kita terhadap masa lalu harus arif, sehingga dapat kita jadikan sesuatu yang tetap bermanfaat. Mari kita jadikan masa lalu itu sebagai kumulasi pundak raksasa yang daripadanya kita dapat berdiri di atasnya untuk memandang masa depan yang ideal itu.

“Jika kita katakan gerak perubahan dari masyarakat militan menuju masyarakat pendidikan, itu yang dimaksudkan adalah: masyarakat militan yang bercirikan kekerasan (yang memang kekerasan dan pemaksaan pendapat masih sering terdemonstrasikan di masyarakat Indonesia). Karenanya perlu dirancang dan disebarluaskan suatu bentuk pendidikan untuk belajar hidup bersama dalam damai dan harmoni. Suatu bentuk pendidikan pengembangan belajar hidup bersama dengan orang lain, dengan semangat menghormati nilai-nilai pluralisme dan kebutuhan untuk saling pengertian, toleransi, dan damai. Proses belajar hidup bersama yang akan



Syaykh Al-Zaytun saat menyampaikan khutbah 'Ied Al-Fithri 1427 H.

foto: berindo wilson

memungkinkan terhindarnya pertikaian atau memungkinkan penyelesaian pertikaian secara damai. Hidup bersama semacam ini memerlukan suatu proses yang dinamis, holistik, sepanjang hayat melibatkan warga bangsa secara keseluruhan,” jelas Syaykh Panji Gumilang.

Sholat 'Ied al-Fithri 1427 H berlangsung di Mesjid al-Hayat. Selain diikuti para eksponen, guru dan karyawan Al-Zaytun, juga diikuti sekitar 7000-an wali santri, tamu dan

penduduk setempat. Sementara santri sedang berlibur. Seusai sholat 'Ied, acara dilanjutkan makan bersama di Gedung al-Akbar, diiringi alunan musik Gamelan yang diasuh langsung oleh Syaykh Abdussalam Panji Gumilang.

Selepas makan bersama, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dengan penduduk setempat, sekaligus pemberian angpaw. Penduduk setempat dengan antusias, senang dan khitmat mengikuti acara itu.

Sementara itu, tamu dan para wali santri yang sengaja datang ke kampus itu untuk merayakan hari Idul Fitri, mengeluhkan rusaknya jalan menuju kampus itu. Mereka berharap agar pemerintah memberikan perhatian untuk memperbaiki jalan tersebut. Seorang wali santri dari Jakarta mengatakan dibiarkannya jalan menuju Kampus Al-Zaytun sangat rusak dalam waktu yang sudah sangat lama, suatu indikasi perhatian pemerintah terhadap pendidikan masih sangat rendah. Wali santri itu berharap pemerintah semakin peka untuk mempermudah akses ke lembaga-lembaga pendidikan, agar bangsa ini lebih cepat cerdas, maju dan bermartabat.

Fitrah Kehidupan Manusia

Dalam edisi ini kami sajikan selengkapnya Khutbah 'Ied al-Fithri 1427 H/2006 M, Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang di Kampus Al-Zaytun, pada tarikh 01 Syawal 1427 H (24 Oktober 2006 M) tersebut, yang diberi judul: INTERDEPENDENSI, FITRAH KEHIDUPAN MANUSIA. ■ CRS



foto: berindo wilson

000-an lebih jemaah.

INTERDEPENDENSI, FITRAH KEHIDUPAN M

Kini, apa yang sedang kita lakukan dan terus kita lakukan, adalah membangun peradaban menuju perubahan sosial yang terhormat. Dalam kaitan ini (perubahan sosial) kita tidak melihat selalu berlangsung secara mulus, dalam prosesnya terkadang terhenti dan mulai lagi. Namun, karena memiliki motivasi yang jelas, maka membangun peradaban yang kita lakukan ini kita yakini akan terus bergerak dan tidak pernah terhenti. Dalam kaitan ini, kita telah memiliki kapital (modal) dengan berbagai jenisnya, baik kapital ekonomi, kapital kultural, kapital sosial, bahkan kapital simbolik.

Penciptaan manusia oleh Tuhan merupakan karya ciptaan-Nya yang terbaik secara rohaniyah maupun jasmaniah. Manusia ditugasi mengisi bumi dan memakmurkannya, sebagai tempat mulia di alam semesta ini. Manusia adalah bagian dari alam ini. Manusia dan tanah adalah satu, sebab daripadanya manusia diciptakan. Manusia secara jasad adalah makhluk yang lemah, yang selalu bergantung pada belas kasih sang Pencipta. Bahkan, dalam memanfaatkan alam untuk melayani kebutuhannya, manusia harus melayani alam ini, harus menjaganya, dan mengolahnya untuk mencapai tujuannya.

Selanjutnya kehidupan manusia ditentukan oleh dan melalui tindakan manusia itu sendiri. Seseorang adalah apa yang dikerjakannya. Sebagai pelaku, manusia mempunyai kapasitas untuk keluar dari masa kini, bergerak maju ke masa depan. Manusia adalah memiliki kebebasan, namun mereka harus bertanggung jawab atas apa saja yang mereka kerjakan. Nasib manusia ada di tangan manusia itu sendiri.

Semua aktivitas manusia dilakukan dalam kehidupan dunia, yang merupakan tempat bertemunya mutakallim dan mukhatab (pembicara dan pendengar) suatu tindakan komunikatif, dimana mereka saling mengajukan tuntutan bahwa ucapan mereka sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, dan dimana mereka dapat mengecam dan memperkuat kebenaran yang mereka nyatakan, menyelesaikan perselisihan pendapat mereka, maupun mencapai kesepakatan.

Kehidupan dunia adalah latar belakang dari proses mencapai saling memahami, melalui tindakan komunikatif. Dimana kehidupan dunia itu sendiri tersusun dari kultur, masyarakat, dan kepribadian. Kultur sangat erat kaitannya dengan tindakan manusia, tindakan manusia mengakibatkan terbentuknya pola-pola hubungan sosial (masyarakat) yang sesuai (sebaliknya), daripadanya dapat



Syaykh Al-Zaytun, Dr Abdussalam Panji Gumilang.

terlihat seperti apa kepribadian dan perilaku mereka.

Kehidupan itu merupakan dunia mikro tempat individu berinteraksi dan

MANUSIA



foto-foto: berindo wilson

berkomunikasi. Daripadanya tumbuh kebiasaan (habitus), yaitu bangunan mental atau kognitif yang diinternalkan, dengan melaluinya individu dapat

diinternalisasikan memahami kehidupan sosial. Kebiasaan (habitus) menghasilkan dan dihasilkan oleh aktivitas bermasyarakat.

Sejalan dengan hakikat kejadian manusia yang intinya adalah makhluk rasional, individu selalu membangun kehidupan dunia secara rasional (rasionalisasi), membangun kebiasaan rasionalisasi kehidupan dunia yang termasuk di antaranya komunikasi rasional. Tatkala komunikasi rasional menjadi suatu kebiasaan (habitus) yang semakin meningkat dalam kehidupan dunia, diyakini bahwa semakin rasional kehidupan sehari-hari, makin besar kemungkinan interaksi akan dikendalikan oleh motivasi rasional untuk saling memahami.

Itulah bentuk metoda rasional untuk mencapai konsensus, yang selanjutnya mewujudkan kebiasaan penampilan argumen yang lebih baik.

Dalam uraian terdahulu telah dikatakan bahwa kehidupan dunia itu tersusun dari kultur, masyarakat, dan kepribadian. Dimaksud dengan kultur adalah peradaban, yakni kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin. Berupa hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa (ummat manusia). Kemajuan dan peningkatan peradaban ummat manusia maupun bangsa mampu menghantarkan mereka ke arah perubahan, tentunya perubahan positif. Karenanya perubahan itu berlanjut seiring dengan kemajuan peradaban. Peradaban mendominasi perubahan dalam cara mengendalikan gerak hati manusia. Yang selanjutnya tercipta perubahan cara individu berpikir, bertindak, dan berinteraksi.

Kunci proses peradaban adalah pengendalian diri. Pengendalian diri dimulai dengan cara pengendalian melalui orang lain dari berbagai segi, kemudian diubah menjadi pengendalian diri. Kemudian aktivitas manusia yang bebas berdasar naluri didesak ke belakang panggung kehidupan komunal manusia yang selanjutnya ditanamkan menjadi perasaan malu, kemudian diciptakan cara, norma umum masyarakat yang terus menerus dipengaruhi oleh pengendalian diri yang makin lama makin stabil dan mumpuni.

Jaringan hubungan mendasar yang berasal dari keinginan dan tindakan berbagai individu ini dapat berubah menjadi aturan bersama dan terpol, yang tak dapat lagi dikatakan sebagai rencana atau ciptaan manusia individual. Dari saling ketergantungan individual inilah timbul peraturan sui generis, peraturan yang lebih memaksa

dan lebih kuat daripada kemauan dan nalar individu yang membentuk jaringan hubungan itu. Peraturan itulah yang menjalin kemauan dan aktivitas manusia, peraturan sosial ini yang menentukan jalannya perubahan historis, ia melandasi proses peradaban.

Dalam aspek ajaran Islam, hal itu adalah tuntutan-tuntutan etis dalam pola kehidupan masyarakat manusia dengan ciri-ciri kemajuan dan peradaban yang tinggi. Dan itulah Thaibatul Madinah yang dibangun oleh Nabi Saw. Orang menyimpulkan bahwa ajaran dan praktek Nabi Saw, pada esensinya bersifat tatanan kota (urban) secara radikal. Program-program Nabi di Madinah sangat radikal dibanding dengan pola hidup orang-orang Arab jahiliyah ialah tiadanya keteraturan, dengan ciri menonjol tiadanya pranata kepemimpinan masyarakat yang mapan, yang menjadi kebutuhan masyarakat maju, yang ada hanyalah pranata kepemimpinan atas dasar kesukuan dan keturunan saja. Maka yang diwujudkan oleh Nabi Saw adalah pola hidup sosial dengan pranata kepemimpinan yang mapan dan rasional.

Yang menjadi inti ajarannya adalah perubahan dari kehidupan "liar" menjadi pola kehidupan beradab, dengan dukungan-dukungan sistem tertib hukum dan kekuasaan. Setiap anggota masyarakat diwajibkan menghormati dan menjalankan hukum yang dianutnya dengan tulus dan setia hati, sebab hanya dengan cara itu suatu kehidupan yang lebih tinggi dapat diwujudkan.

Manusia dalam kehidupannya adalah pembuat sejarah, walaupun tidak dapat dibuat dengan sesuka hatinya, mereka ciptakan berdasar keadaan yang langsung mereka hadapi, mereka terima, sebagai lanjutan dari masa lalu. Yang dimaksud dengan itu semua adalah aktivitas dan pemikiran manusia itulah yang kelak akan menjadi suatu sejarah yang mereka ciptakan. Aktivitas yang kemudian menjadi sesuatu yang bersejarah bukanlah dihasilkan sekali jadi oleh pelakunya, tetapi secara terus menerus mereka ciptakan ulang melalui suatu cara, dengan cara itu juga mereka menyatakan dan dinyatakan sebagai pelaku sejarah.

Dalam kaitan ini bimbingan ke arah tumbuh suburnya motivasi dan kreativitas mesti seimbang, sebagai potensi untuk bertindak. Motivasi menyediakan rencana menyeluruh untuk bertindak, sekalipun banyak tindakan manusia tidak termotivasi secara langsung. Meski tindakan tertentu tidak dimotivasi dan motivasi

“Ada suatu adagium: “Kerelaan semua manusia sesuatu yang tak mungkin dicapai.”

Karenanya: “Kerjakan sesuatu yang baik itu sekalipun tidak mendapatkan persetujuan dari segala lapisan manusia.” Kita tidak boleh canggung, seperti canggungnya sang penunggang keledai (sudahpun binatang tunggangannya keledai canggung pula, apa jadinya?)”



Sebagai ummat beragama, kita memiliki sandaran kokoh yaitu ridla Allah.

seseorang umumnya tidak disadari, namun motivasi memainkan peran penting dalam tindakan manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, atau suatu usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya.

Membangun Peradaban

Kini, apa yang sedang kita lakukan dan terus kita lakukan, adalah membangun peradaban menuju perubahan sosial yang terhormat. Dalam kaitan ini (perubahan sosial) kita tidak melihat selalu berlangsung secara mulus, dalam prosesnya terkadang terhenti dan mulai lagi. Namun, karena memiliki motivasi yang jelas, maka membangun peradaban yang kita

lakukan ini kita yakini akan terus bergerak dan tidak pernah terhenti. Dalam kaitan ini, kita telah memiliki kapital (modal) dengan berbagai jenisnya, baik kapital ekonomi, kapital kultural, kapital sosial, bahkan kapital simbolik.

Semua kapital yang kita miliki harus kita arahkan untuk meraih masa depan yang bermakna. Masa depan yang bermakna tidak dapat ditunggu bahkan tidak dapat ditemukan kembali. Maksudnya, bahwa kita takkan menemukan masa depan itu di masa lalu, dan kita tidak boleh berdiam pasif menunggu nasib kita. Masa depan mesti ditemukan, diciptakan, ditulis dalam apa yang kita kerjakan kini. Untuk meraihnya, sebenarnya tidak ada jawaban tunggal, namun semua kita berhak menjawabnya dengan berbagai jawaban, yang kemudian kita rangkum sebagai jawaban bersama, dan itulah





wujud dari kepribadian yang mesti kita pegang teguh.

Dalam hal ini tak perlu lagi kita mempertanyakan siapa diri kita namun sebaliknya pikirkan dan lakukan perbuatan apa yang terbaik untuk meraih masa depan yang terhormat, dan terus berbuat dan bekerja.

Beraktivitas untuk mencapai masa depan yang terhormat, memerlukan pengendalian diri, masing-masing pada proporsinya. Itulah wujud saling ketergantungan satu dengan lainnya (interdependensi) dalam beraktivitas. Semakin panjang rantai saling ketergantungan, individu makin banyak belajar mengendalikan dirinya sendiri, dan individu semakin terbebas dari nafsunya sendiri. Makin panjangnya rantai saling ketergantungan, tak hanya berkaitan dengan makin kuatnya pengendalian atas kemauan individual, tetapi juga berkaitan dengan makin

meningkat kepekaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Makin tingginya derajat kepekaan ini merupakan aspek kunci proses peradaban dan menjadi penyumbang utama perkembangan peradaban selanjutnya.

Memasuki masa depan yang bermakna adalah kemampuan dan kepiawaian kita men-solving problem masa kini. Kita katakan sebagai kepiawaian, sebab untuk menanggulangi berbagai macam masalah memang tidak ada jawaban rasional tunggal, karenanya diperlukan berbagai jawaban yang rasional.

Agaknya jawaban-jawaban rasional yang harus ditampilkan untuk memasuki masa depan terhormat tentunya meniti pada kapital-kapital yang telah kita miliki, yang semua kapital-kapital itu harus diperkuat dengan ilmu pengetahuan, yang dapat memperhalus kepekaan kita terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi atas pendirian-pendirian yang tak mau dibandingkan.

Kita yakin masyarakat kita (Indonesia) akan terus berkembang maju secara evolusioner menuju ke kepribadian dan moral yang ideal, setelah melewati berbagai fase yang mendahuluinya. Dari masyarakat militan menuju kepada masyarakat "pendidikan".

Masyarakat militan yang dimaksud adalah masyarakat yang tersusun sebagai militer, guna melakukan berbagai rangkaian pengawasan terhadap kehidupan bangsa. Struktur masyarakat dari tingkat atas sampai kepada lapisan paling bawah tersusun sebagai militan (militer) yang bertugas "perang" mempertahankan stabilitas. Pendekatan semacam ini membawa efek yang sangat mendalam, yang sisa-sisanya tidak dapat terselesaikan dalam tempo singkat. Tindakan-tindakan kekerasan sosial dalam berbagai macam bentuknya (sekalipun beralasan kebebasan dan demokrasi), itu semua merupakan cerminan akibat dari pada fase masyarakat militan yang telah kita lalui.

Namun kita sadari bahwa perubahan sosial tidak dapat sekali jadi, memerlukan ketekunan dan ke-lumintuan kemauan dan tindakan. Pendekatan kita terhadap masa lalu harus arif, sehingga dapat kita jadikan sesuatu yang tetap bermanfaat. Mari kita jadikan masa lalu itu sebagai kumulasi pundak raksasa yang daripadanya kita dapat berdiri di atasnya untuk memandang masa depan yang ideal itu.

Jika kita katakan gerak perubahan

dari masyarakat militan menuju masyarakat pendidikan, itu yang dimaksudkan adalah: masyarakat militan yang bercirikan kekerasan (yang memang kekerasan dan pemaksaan pendapat masih sering terdemonstrasikan di masyarakat Indonesia). Karenanya perlu dirancang dan disebarluaskan suatu bentuk pendidikan untuk belajar hidup bersama dalam damai dan harmoni. Suatu bentuk pendidikan pengembangan belajar hidup bersama dengan orang lain, dengan semangat menghormati nilai-nilai pluralisme dan kebutuhan untuk saling pengertian, toleransi, dan damai. Proses belajar hidup bersama yang akan memungkinkan terhindarnya pertikaian atau memungkinkan penyelesaian pertikaian secara damai. Hidup bersama semacam ini memerlukan suatu proses yang dinamis, holistik, sepanjang hayat melibatkan warga bangsa secara keseluruhan.

Apa yang kita tekuni kini (masyarakat pendidikan) merupakan citra mendasar tentang apa yang menjadi masalah pokok di masa kini bangsa kita, dan itu kita jadikan kerangka pikir kita (paradigma). Sebagai umat beragama, kita memiliki sandaran kokoh yaitu ridla Allah. Untuk mendapatkannya merupakan suatu keniscayaan. Karenanya mari kita gantungkan segala daya dan upaya kita untuk mendapat ridla-Nya semata-mata.

Mengemban tugas suci dan mulia ini tidak boleh ada suatu keraguan dan canggung, dengan kepribadian yang utuh, dalam perjalanan, kita pasti dapat menilai segala yang bernilai baik maupun sebaliknya. Kita harus selalu arif dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Jiwa besar mesti kita internalisasikan ke dalam diri kita. Menjalankan tugas mulia memang sepertinya menjadi sangat baik bila mendapatkan kesepakatan semua manusia, namun itu merupakan sesuatu yang mustahil. Ridla Tuhan jauh lebih "gampang didapat" daripada kerelaan semua manusia. Namun jangan pernah berhenti mengemban tugas mulia ini hanya karena tidak mendapatkan kesepakatan dari semua manusia (yang mustahil itu).

Ada suatu adagium: "Kerelaan semua manusia sesuatu yang tak mungkin dicapai." Karenanya: "Kerjakan sesuatu yang baik itu sekalipun tidak mendapatkan persetujuan dari segala lapisan manusia."

Kita tidak boleh canggung, seperti canggungnya sang penunggang keledai

“Kemajuan dan peningkatan peradaban umat manusia maupun bangsa mampu menghantarkan mereka ke arah perubahan, tentunya perubahan positif. Karenanya perubahan itu berlanjut seiring dengan kemajuan peradaban. Peradaban mendominasi perubahan dalam cara mengendalikan gerak hati manusia. Yang selanjutnya tercipta perubahan cara individu berpikir, bertindak, dan berinteraksi!”



Makan bersama di Gedung Al-Akbar yang diiringi alunan musik gamelan.

(sudahpun binatang tunggangannya keledai canggung pula, apa jadinya?). Alkisah, seorang bapak dan anak sedang menempuh perjalanan pengembaraan, berkendaraan keledai. Tat kala di perjalanan yang jauh dari keramaian mereka (bapak, anak, dan keledai) berjalan dengan semangat dan riang gembira diatas keledai tunggangannya. Begitu memasuki keramaian kota, banyak manusia berkomentar, bermacam-macam komentarnya. Yang paling direspon oleh sang penunggang adalah kritik orang jalanan yang mengatakan: “Wah, itu orang tidak berperikemanusiaan, keledai begitu kecilnya kok ditunggangi oleh dua penumpang”.

Karenanya, turunlah sang ayah dan menuntun keledai sambil membiarkan anaknya tetap di punggung keledai. Dalam perjalanan selanjutnya didengar pula kritik dari orang yang mengaku ahli dalam etika dan sopan santun, apa katanya: “Anak tak tahu diri, orang tua disuruh berjalan sambil menuntun keledai sedang dia duduk di punggung keledai”.

Direspon pula kritik itu oleh sang anak, kemudian mereka berjalan bersama, bapak, anak, dan keledai. Tak lama kemudian berpapasanlah mereka dengan seorang pedagang yang selalu berhitung untung rugi, dan berkata penuh kritik: “Ah, bodoh kali kalian ini, cuaca panas seperti ini kamu berjalan kaki tanpa terumpah lagi” (padahal mereka memakai sandal usang).

Mendengar kritik berbau penghinaan ini, bapak dan anak mengambil keputusan fatal, mereka anggap akan lebih etis dan berperikemanusiaan tindakan yang akan dia ambil, yaitu: Mereka ikat kaki keledai itu selanjutnya mereka gotong dengan pikulan, dan mereka pikul sambil meneruskan perjalanan di keramaian manusia. Tentunya semua yang melihat menjadi bertanya-tanya, tertawa melihat kelakuan seperti itu.

Itulah contoh tamsil orang yang kurang teguh pendirian. Mengapa tidak teguh pendiriannya? Karena kurang modal ilmu, keledai mampu mengangkat beban dua kali lipat berat badannya. Andainya sang bapak dan anak tadi mengetahui berat badan keledai mereka taklah mungkin terjadi peristiwa yang menggelikan tadi. Padahal dari jalan cerita tadi, sepanjang perjalanan sebelum masuk kota kekuatan keledai telah teruji. Namun karena sang bapak dan anak ternyata kurang percaya diri, bukan ridla Tuhan yang dicari, namun puja-puji manusia yang didengar, akhirnya fatal maupun celaka. Sudahpun berkendaraan keledai, celaka pula yang didapat.

Semoga kita terjauh dari tamsil sang penunggang keledai tersebut. Dan dalam kesempatan 'Idul Fithri ini kami menyampaikan Selamat ber-'Idul Fitri, semoga amal darma bakti kita diterima oleh Tuhan Allah Subhanahu Wata'ala, dan maaf lahir batin atas segala kekhilafan yang kami lakukan. ■



Darah Kembali Tumpah di Poso

Aksi teror kembali terjadi di Poso. Warga terlibat bentrok dengan Brimob. Jusuf Kalla pun "turun gunung".

Darah kembali tumpah di Poso. Kota kabupaten di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang sempat tenang pascakonflik, yang ditandai dengan Deklarasi Malino tahun 2001, sejak dua bulan terakhir ini kembali memanas.

Minggu (22/10) malam, puluhan anggota Brimob bentrok dengan warga Kelurahan Gebangrejo, Poso. Kerusuhan mengakibatkan Syafuddin (22) tewas dan seorang warga lainnya, Muh.Rizki (27), luka kena tembak. Esok harinya, ratusan warga yang mengantar jenazah Syafuddin ke pemakaman kembali berbenturan dengan polisi. Kejadian ini mengakibatkan dua warga luka tembak.

Bentrok antara polisi dan warga Gebangrejo itu merupakan yang kedua kalinya terjadi di Poso dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, pada akhir September, massa di Kecamatan Pamona Timur, Poso, tiba-tiba melempari helikopter yang ditumpangi Kapolda Sulteng. Massa juga merusak Mapolsek Pamona Timur serta membakar sejumlah sepeda motor dan mobil polisi.

Rangkaian peristiwa kekerasan di Poso ini pun merambah ke Palu, ibukota Sulteng. Pada 16 Oktober, Sekretaris Umum Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Pendeta Irianto Kongkoli tewas ditembak saat berbelanja bersama anak dan isterinya.

Kondisi yang mencekam di Poso dan kemudian menyebar ke Palu, mendorong Wapres Jusuf Kalla kembali "turun gunung". Sebelumnya, saat menjabat Menko Kesra pada tahun 2001 lalu, Jusuf Kalla berhasil mempertemukan mereka yang bertikai dan melahirkan kesepakatan damai melalui Dekla-

rasi Malino.

Kerusuhan Poso yang berlangsung sejak tahun 1998 itu awalnya hanya pertikaian dua kelompok pemuda yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan sektarian. Yakni antara kelompok merah (Kristen) dan kelompok putih (Islam).

Dengan disertai Menko Polhukam Widodo AS, Menkum & HAM Hamid Awaludin, Mendagri M.Maruf, dan Kapolri Jenderal Pol.Sutanto, Minggu (29/10) terbang ke Palu. Selain berhalal bihalal dengan Muspida dan tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda dan perempuan, Wapres secara terpisah juga mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama Islam dan Kristen. Pihaknya berusaha membantu memulihkan keamanan di Poso dengan menyerap aspirasi dari masyarakat menyelesaikan masalah secara adil dan bermartabat.

"Dengan kebersamaan, penyelesaian Poso dapat terlaksana, dan tercipta suasana yang aman dan damai sebagaimana yang diharapkan masyarakat Poso," ujarnya. Ia pun yakin aparat kepolisian dan TNI akan bisa menyelesaikan persoalan ini. (*Indo Pos*, 30/10).

Mengenai kerusuhan yang terjadi di Poso belakangan ini, Jusuf Kalla menilainya bukan lagi konflik antarwarga. Melainkan tindakan teror yang dilakukan orang-orang tidak bertanggungjawab dan menginginkan Poso kembali rusuh. Wapres mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan pelaku teror sebagai musuh bersama.

"Walaupun bukan lagi konflik, peristiwa itu membuat warga Poso yang masih trauma susah tidur, tidak dapat be-



Massa menuntut kasus Poso dituntaskan.

kerja dengan baik, dan memiliki banyak masalah. Ini membuat masyarakat menderita. Karena itu pelaku teror di Poso harus menjadi musuh kita semua," tegasnya. (*Kompas*, 30/10). Dia pun meminta aparat keamanan segera mencari akar masalah teror dan menangkap para pelakunya. Bahkan kalau perlu memberlakukan UU Anti Teror.

Gubernur Sulteng HB Paliudju juga menyampaikan bahwa masyarakat akar rumput di Poso menginginkan suasana damai seperti dulu, saling menghargai dan saling menyayangi. "Berkali-kali masyarakat tingkat bawah menyampaikan itu kepada kami," tambahna.

Pertemuan Wapres dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama Poso di Palu, menyepakati empat hal. Pertama, masalah diselesaikan secara damai dengan dialog semua pihak. Untuk upaya ini Kelompok Kerja Malino dihidupkan guna meningkatkan dialog dan mempererat silaturahmi.

Kedua, teror merupakan musuh bersama karena membahayakan kedua belah pihak, baik komunitas Islam maupun

Kristen. Tindakan hukum untuk mengatasinya dilakukan secara terbuka oleh aparat kepolisian bantu masyarakat.

Ketiga, untuk insiden di Tanah Runtu, pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) yang diketuai unsur dari Kementerian Polhukam dengan melibatkan Polri, TNI dan MUI Poso. TPF diharapkan keterbukaan semua saksi dan langkah Polri menegakkan hukum. Masyarakat akan dilibatkan untuk pencarian fakta.

Keempat, karena konflik masa lalu, perekonomian Poso tidak berkembang. Banyak anak muda menganggur dan berpotensi memunculkan masalah baru. Untuk itu Mensos dan Menteri PU akan ke Poso guna menghidupkan kegiatan sosial dan ekonomi. Pemerintah Pusat mendukung pendanaannya.

Soal tuntutan warga masyarakat agar Brimob yang di BKO kan di Poso segera ditarik, Wapres menyatakan hal itu akan dilakukan jika keamanan pulih dan masyarakat tidak lagi khawatir. "Bisa minggu depan, bisa bulan depan," tegasnya. ■ SP

Sekali setahun, setiap menjelang Idul Fitri, mudik punya daya tarik magis dan ritual. Jutaan muslim harus berdesak-desakan di terminal bus, stasiun kereta api, di bandar udara, pelabuhan dan jalan raya untuk merayakan Idul Fitri—lebih dikenal dengan Lebaran—di kampung halaman bersama sanak saudara. Mereka tak peduli berapa pun uang dikuras dari kantong dan tabungan, bahkan ada yang menyabung nyawa, asalkan bisa shalat Ied dan bersilaturahmi di kampung. Di antara para pemudik—dari lapisan mana pun—di balik nilai ritual, terpendam kebanggaan untuk memamerkan keberhasilan mereka di Jakarta, ibukota negara yang penuh pergulatan dan persaingan.

Kecenderungan dalam dua tahun terakhir, terutama para pemudik yang berasal dari daerah-daerah di Jawa, mudik bersama keluarga dengan sepeda motor. Bisa dibayangkan betapa letihnya dan berisikonya bersepeda motor dalam jarak ratusan kilometer. Namun keinginan untuk berlebaran dan bertemu sanak keluarga di kampung mengalahkan kelelahan dan risiko di jalan raya.

Tak pelak lagi, di balik kegiatan mudik terpendam motif bisnis. Banyak perusahaan memanfaatkan momentum mudik sebagai sarana promosi produk-produk mereka untuk menjalin hubungan yang berbau bisnis dengan para konsumen dan relasi. Puncak kegiatan mudik menjadi tontonan dan fokus liputan pada semua stasiun televisi, pemberitaan di radio dan media cetak.

Suratkabar harian terkemuka, *Kompas*, menurunkan laporan utama dan foto yang menonjol di halaman satu sejak edisi 18 Oktober. Suasana mudik sudah terasa di Bandara Soekarno-Hatta serta di sejumlah stasiun kereta api dan terminal bus, demikian tulis harian yang beroplak lebih dari 500.000 eksemplar tersebut. Perkiraan *Kompas* tidak meleset bahwa lonjakan penumpang yang mudik terjadi pada H-4 dan H-3 Lebaran atau pada Jumat dan Sabtu. Shalat Ied tahun ini berlangsung hari Senin (22/10) untuk versi Muhammadiyah dan Selasa (23/10) untuk versi pemerintah. *Kompas* mencatat, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta hingga Rabu pukul 18.00 sudah mencapai 30.737 orang untuk tujuan domestik, meningkat dari 26.717 orang pada keberangkatan sehari sebelumnya.

Juga dilaporkan, sekitar 17.000 pedagang jamu se-Jabodetabek menikmati sajian panggung hiburan sebelum mudik lebaran gratis ke kampung halaman masing-masing yang digelar produsen jamu PT Sido Muncul di arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta, Rabu (18/10). *Kompas* masih mengulas tradisi mudik



Kepadatan arus lalu lintas arus mudik di jalan tol.

Mudik Lebaran Cermi

Tradisi mudik Lebaran tak terbendung. Jumlah pemudik bermudik ria dengan sepeda motor. Di balik motivasi ritual, terdapat...

dalam tajuk rencana (19/10), berjudul: Mengatur Mudik yang Aman. Tulis *Kompas*, apa boleh buat itulah yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa lagi kita mengharapkan pemerintah bisa menangani semua persoalan. Kita hanya akan merasa kecewa kalau mengharapkan pemerintah akan bisa menangani semua persoalan mudik dengan baik. Sebab, pertama, efektivitas pemerintahan, khususnya dukungan dari birokrasi, memang tidak berjalan dengan baik. Kedua, cara dan kultur bekerja kita yang selalu *ad hoc* belum juga berubah. Karena itu, surat kabar yang beredar luas dan sangat berpengaruh ini menilai kesiapan fisik dan kesiapan alat transportasi menjadi kata kunci. Apalagi jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor diperkirakan meningkat 40%. "Mari kita jadikan Idul Fitri kali ini sebagai Idul Fitri yang aman," tulis *Kompas* dalam tajuknya.

Pada edisi 31 Oktober, *Kompas*, menurunkan laporan di halaman dua, berjudul: *Bandara Kelebihan Beban*. Mengutip Dirjen Perhubungan Udara M. Ikhsan Tatang melaporkan sebagian besar Bandara di Indonesia sudah kelebihan beban penumpang, terutama pada momentum Lebaran. Pada arus puncak mudik dan balik, ribuan penumpang harus berdesakan di ruang-ruang tunggu Bandara. Idealnya, seorang penumpang membutuhkan ruang selebar 10 meter persegi di Bandara

domestik, sekarang kurang dari 5 meter persegi. Kapasitas terminal Bandara Soekarno-Hatta 18 juta penumpang per tahun, namun pada hari-hari menjelang Lebaran memuncak sampai 26 juta lebih. Selain Soekarno-Hatta, Bandara-Bandara lain yang perlu perluasan, termasuk Surabaya, Palembang, Balikpapan, Makassar, Padang dan Palangkaraya.

Di sisi lain, *Kompas* menulis di halaman yang sama, minat orang untuk menggunakan moda angkutan kapal laut sebagai angkutan mudik Lebaran semakin menurun sejak tahun 2000. Penyebab kecenderungan penurunan ini, sudah lebih banyak orang yang memilih angkutan udara. Di Pelabuhan Tanjung Priok (30/10), KM Sinabung dari Makassar, tangga kapal masih lengang. Kapal laut yang berkapasitas 2.500 orang ini hanya memuat penumpang arus balik 1.006 orang. Menurut data PT Pelindo II, jumlah debarkasi dan embarkasi di terminal Tanjung Priok, tahun 2001 mencapai 1,7 juta orang. Jumlah ini merosot dari tahun ke tahun: tahun 2002 sebanyak 1,43 juta orang, tahun 2003 turun jadi 837.810 orang, turun lagi menjadi 619.995 pada tahun 2004, berkurang menjadi 577.021 orang tahun 2005. Tetapi melonjak jadi 746.110 orang pada tahun 2006.

Bandara Tertutup Asap

Sementara itu, surat kabar pro-Golkar, *Media Indonesia* edisi 20 Oktober, me-



foto: berindo wilson

in Sukses dan Prestise

tambah dari tahun ke tahun. Belakangan muncul fenomena
resembunyi kebanggaan memamerkan kesuksesan di kampung
man.

muat foto utama di halaman satu setinggi tiga per empat halaman, menggambarkan konvoi ribuan mobil merambat beriringan di sepanjang jalan tol Jakarta-Cikampek. Foto utama halaman satu lainnya, yakni pada edisi 23/10 memanjang enam kolom, merekam gambar ratusan pemuda bersepeda motor yang sedang antri mengisi bensin di SPBU Pamanukan, Jabar. Pompa bensin itu diserbu oleh para pemudik hanya sehari sebelum Idul Fitri 1427 H, Selasa (24/10).

MI memperkirakan, tahun ini tiga juta pemudik mengendarai sepeda motor. Harian milik petinggi Golkar, Suryo Paloh, ini juga menengarai adanya fenomena baru bahwa para pemudik menyerbu kapal laut tujuan Pontianak. Akibatnya, KM Lawit harus mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Kapasitas kapal milik Peln ini hanya 1.700 orang, tetapi Rabu (18/10) KM Lawit yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok, dijejali 1.900 penumpang. *MI* mengutip seorang penumpang, Leny (31) mengatakan, dia bersama keluarganya terpaksa mudik dengan kapal laut karena penerbangan ke Pontianak terganggu asap. Sebanyak 8.000 penumpang pesawat gagal berangkat karena Bandara Cilik Riwit tidak bisa didarati. Juga 7.000 penumpang Jakarta-Jambi, Jambi-Jakarta, tidak bisa terbang karena Bandara Sultan Thaha tertutup asap.

MI, edisi 22 Oktober, juga menurunkan berita utama halaman satu, berjudul:

Selatan Kian Padat. Tulis *MI*, arus mudik di kawasan timur P. Jawa melalui jalur utara dan selatan hingga Minggu malam semakin padat. Antrian kendaraan dari Jakarta memasuki pintu tol Cikampek, terjadi sejak Jumat malam. Mereka melanjutkan perjalanan melalui jalur Pantura. Sedangkan pada edisi sehari sebelumnya (21/10), *MI* menurunkan laporan utama di halaman satu tentang puncak arus mudik (Jumat), khususnya dengan kapal laut dan kereta api. Hari itu, sebanyak 11.000 penumpang berangkat dari Tanjung Priok menuju Batam, Belawan, Ambon dan Pontianak. Total pemudik dengan kapal laut mencapai 746.110 orang meningkat dari 710.581 tahun lalu. Malam harinya, pemudik yang menumpang kereta api menuju Jateng dan Jatim mencapai 50.000 orang.

MI juga melaporkan kecelakaan yang terjadi di dua lokasi, menewaskan 12 orang. Kecelakaan di Indramayu menelan 8 korban tewas, dan di jalur selatan, Jalan Raya Ciamis, menelan 4 nyawa. Harian *Indo Pos* (26/10) juga melaporkan kecelakaan di tempat rekreasi di Baturaden pasca-Lebaran. Jembatan gantung Baturaden putus, menewaskan 11 orang yang sedang menikmati wisata lebaran. Demikian juga di Danau Singkarak Sumatra, dua orang tewas karena perahu mereka terbalik.

Koran *Bisnis Indonesia*, edisi Minggu (22/10), dalam berita utama halaman satu menyorot perjalanan mudik dari aspek

bisnis. Laporan utama koran milik pengusaha papan atas Sahid Gitosardjono ini menurunkan berita utama berjudul: *Layani Mudik Sambil Promosi*. Tulis *BI*, sejumlah perusahaan berlomba memberikan pelayanan kepada para pemudik. Mulai dari bus sampai bengkel siaga 24 jam, travel pribadi dan tempat istirahat. Beberapa perusahaan yang menyelenggarakan program tersebut, antara lain: PT Indofood Sukses Makmur, PT BNI, PT Telkomsel, Sari Wangi, PT Gudang Garam dan PT Jaya Board. BNI saja tahun ini memberangkatkan 5.500 nasabah dengan biaya Rp 1 miliar. Indofood menyelenggarakan program mudik bersama sejak tahun 1994. Tahun ini memberangkatkan 8.885 pemudik pedagang mie dari wilayah Jabodetabek, Serang dan Karawang dengan menggunakan 161 bus. Sedangkan Sari Wangi dari PT Unilever, menyediakan 100 Kijang Innova bagi para konsumen. Program ini berlaku bagi para pemudik dari P. Jawa, Madura dan Lampung.

Harian berhaluan Islam, *Republika* edisi 20 Oktober, menurunkan berita utama halaman satu berjudul: *Puncak Mudik Mulai Malam Ini*. Menurut koran ini, lonjakan arus mudik berbagai moda transportasi, baik darat, laut, udara terjadi sejak Kamis (18/10). Di jalur Pantura, data kendaraan bermotor yang melewati Indramayu (pukul 6.00-12.00 WIB): sepeda motor 11.150 unit dan mobil pribadi 4.471 unit. Sehari sebelumnya: sepeda motor 15.189 unit dan mobil pribadi 8.460 unit. Di Bandara, lonjakan penumpang terjadi rata-rata 10.000 per hari, sebagian besar menuju Jawa. Demikian juga mereka yang menggunakan kereta api dan kapal laut.

Kemudian pada edisi Minggu (22/10), *Republika* menempatkan kecelakaan yang merenggut 8 nyawa pada berita utama halaman satu. Tulis *Republika*, jalur Pantura meminta korban jiwa delapan orang. Mereka tewas dalam tabrakan maut antara mobil Isuzu Panther dan Bus Pariwisata Tanijaya di ruas jalan Desa Santing, Losarang, Indramayu. Sopir Isuzu Panther Sartono (49), warga Kali-anyar Jakbar diduga mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi saat peristiwa itu terjadi. Akibatnya, tidak bisa mengendalikan mobilnya sehingga nyelonong ke jalur seberang. Pada saat yang bersamaan muncul bus Pariwisata. Tabrakan tak terhindarkan.

Harian sore, *Suara Pembaruan*, menurunkan berita utama halaman satu (22/10) dengan judul: *Susahnya Mudik Nyaman*. Koran ini melengkapi berita utamanya dengan grafik arus mudik-balik kendaraan bermotor. Arus lululintas kendaraan bermotor (tanpa sepeda motor) tahun 2005 sebanyak 1.581.983, turun

menjadi 1.471.300. Terbanyak lewat Pantura (Cikampek): arus mudik 216.654, arus balik 188.902 (2005). Tahun 2006, mudik 195.396, balik 194.324.

SP mengutip Menteri Perhubungan Hatta Rajasa mengakui, angkutan Lebaran tahun ini masih memiliki persoalan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Juga dikutip pernyataan anggota DPR dari Komisi V, Aswar Anas yang menyayangkan belum adanya kebijakan radikal pemerintah untuk mengubah pola angkutan Lebaran. "Problemnya bukan hanya soal transportasi, tetapi juga prasarana dan manajemen," kata Aswar. Angkutan mudik Lebaran menurut Aswar masih diwarnai kemacetan, kecelakaan, penumpukan penumpang di terminal bis, stasiun kereta api, pelabuhan dan Bandara. Menurut data yang diperoleh SP, tahun ini, angkutan darat (mobil) sebanyak 6,83 juta, kereta api 2,76 juta, sungai,

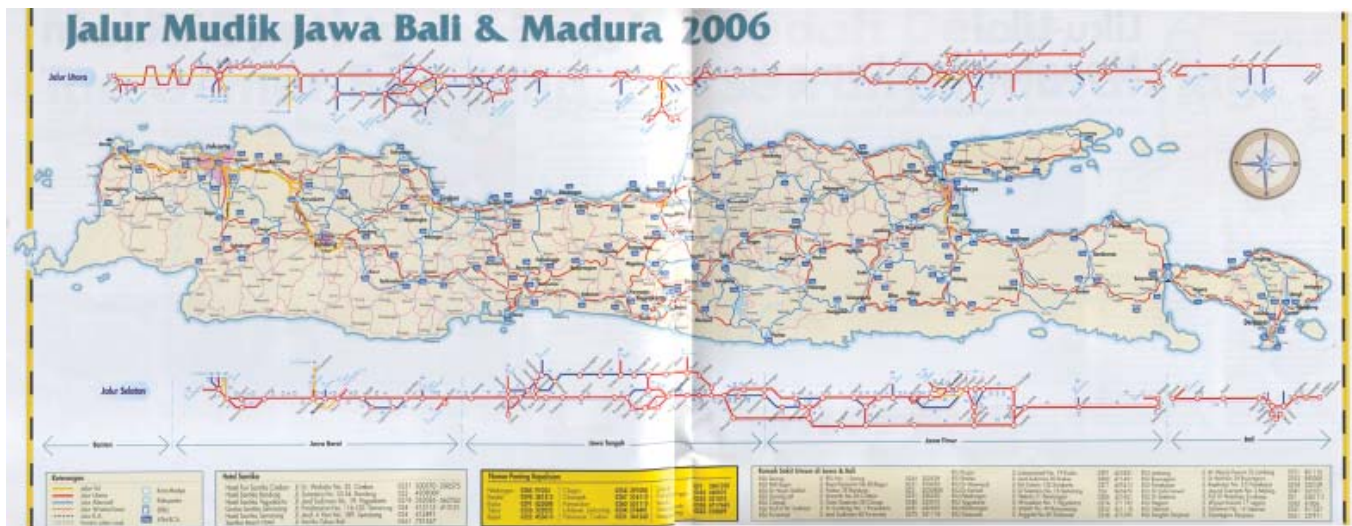
dikalikan dua orang menjadi 3 juta orang yang menuju Jawa Tengah.

SP masih merasa perlu menurunkan tajuk rencana untuk menekankan pentingnya pengamanan dan kenyamanan angkutan mudik Lebaran. Agaknya koran ini mewakili aspirasi para pemudik, menulis tajuk dengan judul: *Kapan Bisa Mudik Aman dan Nyaman?* Tulis SP, berbagai jenis kendaraan, seperti bus, kendaraan serba guna dan bak terbuka semuanya penuh dengan pemudik beserta barang bawaan mereka. Semua berjalan lambat karena padatnya lalu lintas di jalan tol. Kendaraan umumnya penuh sesak dengan penumpang, termasuk bak terbuka yang ditutup dengan terpal. Dari segi kenyamanan, tentunya semua jauh dari yang diharapkan, karena kondisi kendaraan yang digunakan terlihat tidak nyaman, penuh sesak dengan orang dan barang.

Karena itu harian ini menyampaikan sa-

but. Karena kepadatan jalur utama—Pantura dan Selatan—para pemudik ada yang menempuh jalur alternatif, tetapi kebanyakan rusak parah. "Indo Mie dan Sido Muncul berlomba membikin Posko di sepanjang jalur mudik," tulis *Koran Tempo*.

Perjalanan mudik memang sudah berakhir. Maka yang terjadi hari-hari ini adalah banjir arus balik dari kampung menuju Jakarta. Namun masih banyak pemudik yang memperpanjang masa liburan mereka di kampung. Pada edisi 29 Oktober, *KT* menurunkan berita utama halaman tiga berjudul: *Puncak Arus Balik*. Tulis *KT* melaporkan, arus balik pemudik menuju Jakarta mencapai puncak Minggu (28/10), dan Senin (30/10). Stasiun kereta api dan terminal bus tampak dipenuhi lautan manusia. Sedangkan ruas-ruas jalan di Pantura Jawa, Puncak dan jalan tol, dipadati kendaraan pemudik yang kembali ke ibukota.



danau dan penyebrangan 2,59 juta, dan udara 1,47 juta. Angkutan laut 746.110.

Hari berikutnya, Sabtu (21/10), SP masih menurunkan berita utama halaman satu berjudul: *Jakarta-Indramayu Tujuh Jam*. Puncak arus mudik terjadi Sabtu (21/10). Arus lalu lintas di jalur Pantura, Jabar macet total. Menurut SP, kemacetan mulai terjadi di pintu tol Cikampek sampai Indramayu. Akibatnya waktu tempuh Jakarta-Indramayu yang biasanya paling lama tiga jam bertambah menjadi tujuh jam lebih. Kecepatan kendaraan pemudik hanya sekitar 10 KM per jam. Koran sore ini juga merekam komentar beberapa pemudik bahwa kemacetan sudah dimulai di pintu tol Jatibening, Bekasi sampai pintu tol Cikampek. Selepas daerah Patrol, tepatnya di Kampung Eretan Kulon, kemacetan total terjadi. Kendaraan pemudik nyaris tidak bergerak. Tahun ini, para pemudik yang menggunakan sepeda motor 1,5 juta orang, jika

ran, kondisi seperti ini membuat kita harus mengkaji ulang apa yang sebenarnya telah kita lakukan untuk memberi keamanan dan kenyamanan kepada rakyat yang setiap tahun melakukan kegiatan yang sama, yaitu mudik Lebaran. Setiap tahun kita juga melihat bahwa keamanan belum menjadi prioritas angkutan mudik Lebaran. Dalam hal mereka yang menggunakan sepeda motor, pemerintah semestinya tidak bangga. Ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah memberi pelayanan kepada masyarakat yang bermudik Lebaran. Sementara itu tradisi mudik tidak mungkin bisa dihilangkan. "Karena tidak ada jalan lain, pemerintah harus terus memperbaiki pelayanan angkutan lebaran," tulis SP.

Surat kabar harian berbentuk tabloid mini milik Tempo Grup, *Koran Tempo*, pada berita utama halaman satu (19/10), membuat peta P. Jawa dan jalur mudik untuk semua daerah di Jawa. Peta ini sekaligus menjadi foto utama koran terse-

Jubir PT KAI Daerah Operasi I Jakarta Akhmad Sujadi yang dikutip *KT*, diperkirakan 55.000 penumpang kemarinnya telah diangkut dengan 63 gerbong KA reguler dan delapan KA tambahan. Hari Senin mencapai 70.000 pemudik yang kembali ke Jakarta. Arus balik pemudik yang menggunakan bus juga membludak. Di terminal bus Lebak Bulus, Jakarta Selatan, jumlah penumpang bus pada hari Minggu diperkirakan 4.775 orang. Mereka tiba dengan 347 bus. Di terminal Kalideres, Jakarta Barat, arus balik tercatat 2.358 penumpang. Di terminal Pulogadung 27.200 penumpang. Total arus balik mencapai 78.194 orang diangkut oleh 2.930 bus.

Sedangkan arus balik dengan kendaraan pribadi dan sepeda motor memadati jalur Pantura. Sampai Minggu siang, arus balik mencapai 34.892 kendaraan, separuhnya sepeda motor. PT Jasa Marga mencatat kendaraan yang melewati jalan tol rata-rata 130-150 per menit. ■ SH

61 Tahun Korps Marinir Bukan Terbesar Tapi Terbaik

Korps Marinir terus mengembangkan dirinya sesuai tuntutan dan harapan bangsa. Pasukan elit Angkatan Laut ini tidak pernah melalaikan tugas utamanya, menjaga dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan NKRI.

Boleh dibbilang Korps Marinir menjadi unsur utama TNI-AL, kesatuan yang berada setingkat di atas divisi dan di bawah Komando Tempur, bertanda taktis XXX. Di dalam tubuh TNI-AL, Korps Marinir menjadi elemen utama, selain satuan Pelaut, Teknik, Elektro, Supply, Khusus, Kowal dan Kesehatan. Dalam struktur organisasi TNI-AL, kedudukannya sebagai Komando Utama (Kotama), sejajar dengan Koarmatim, Koarmabar, Kolinlamil, Kodikal, Seskoal dan AAL.

Korps Marinir lahir dari patriotisme pemuda yang menginginkan patahnya belenggu, dan eksis sejak berkecamuknya perang merebut kemerdekaan. Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu tanggal 22 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk tiga badan: Komite Nasional

Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP).

Dalam lingkungan BPKKP, dibentuk satu badan keamanan, yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tanggal 10 September 1945, untuk pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban di pantai, lautan dan daerah-daerah pelabuhan maka dibentuk BKR Laut. Presiden Soekarno, 5 Oktober 1945, mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) untuk mengganti BKR. Kemudian BKR Laut berubah menjadi TKR Laut. Tanggal 15 Nopember 1945, Corps Mariners dikukuhkan di Pangkalan IV ALRI, Tegal, Jawa Tengah. Tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Korps Marinir. Pernah berubah menjadi Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), tetapi kembali menggunakan nama Korps Ma-



Prajurit: Kami bangga menjadi Marinir.

foto: berindo wilson

rinir.

Seiring perkembangan zaman, terutama untuk menuju terbentuknya organisasi militer yang modern dan profesional, Korps Marinir, baik secara organisatoris maupun pembinaan kekuatan, mengalami beberapa perubahan. Perubahan itu mulai dari penyebutan unsur kekuatan, likuidasi beberapa satuan, penambahan kekuatan satuan, baik di lingkup Komando Pelaksana (Kolak) maupun Satuan Pelaksana (Satlak) dan pola pembinaan personel. Di bidang organisasi, perubahan terakhir terjadi tahun 2004, terbentuknya Pasmar-II dan Brigif-3 Marinir.

Korps Marinir dikenal sebagai pasukan pendarat yang profesional dan dicintai

rakyat, dengan mengemban misi: (1) Menyiapkan kesatuan operasional. (2) Meningkatkan profesionalisme. (3) Meningkatkan kesejahteraan prajurit. Korps Marinir tidak pernah absen di dalam setiap operasi militer. Juga untuk memelihara perdamaian dunia, Korps Marinir mengirim para prajuritnya untuk bertugas bersama pasukan pemelihara perdamaian PBB di Libanon.

Di masa mendatang, Korps Marinir senantiasa menjadikan prestasi yang terbaik itu sebagai bagian dari tradisi Korps, dengan semboyan: *"Kami bukan yang terbesar, Tapi kami berusaha menjadi yang Terbaik dan kami tidak memiliki apa-apa selain Kebanggaan menjadi Marinir!"* ■ **SB, SH**

Marinir Dalam Berbagai Tugas

- ▶▶ Operasi Aman (Andi Aziz, DI/TII Kahar Muzakar) 1951
- ▶▶ Operasi Indra (DI/TII Karto Suwiryono) 1953
- ▶▶ Operasi keamanan di KDMA Ambon 1955
- ▶▶ Operasi DI/TII Daud Beureueh 1955 Aceh
- ▶▶ Operasi Gunung Gede (Jabar 1957 DI/TII)
- ▶▶ Operasi Djaya Sakti DI/TII 1957 (Makasar)
- ▶▶ Operasi Tegap (PRRI Pekan Baru) 1957
- ▶▶ Operasi 17 Agustus 1958 (Padang)
- ▶▶ Operasi Mena 1958 Permesta (Morotai)
- ▶▶ Operasi Merdeka 1958 (Sulut)
- ▶▶ Operasi Merdeka II 1958 (Sulut) Permesta
- ▶▶ Operasi Mega 1958
- ▶▶ Operasi Kurusetra 1959 (PRRI)
- ▶▶ Operasi Gondomono 1959
- ▶▶ Operasi Alugoro Jabar DI/TII 1960/1961
- ▶▶ Operasi Pasopati 1961
- ▶▶ Operasi Alugoro I (Aceh Timur) DI/TII 1961
- ▶▶ Operasi Tumpas (DI/TII) 1964 Makasar
- ▶▶ Trikora 1962
- ▶▶ Dwikora 1964

- ▶▶ Operasi Penegak PKI 1965
- ▶▶ Operasi Sapu Bersih Kalimantan/PKI 1967
- ▶▶ Operasi Satgas Hiu 1974 (Opsih PGRS/Paraku, sisa G 30 S/PKI)
- ▶▶ Operasi Seroja Timtim (1975) Pasmar I- XI Satgas Parikesit 1978, Satgas Trisula 1980, Satgas Kikis 1981, Satgas Mar 1982, Satgas Pamungkas 1982, Satgas Petir 1984, Satgas Rencong 1983, Satgas Mar 1984, Satgas Tombak 1984, Satgas Keris 1984, Satgas Gada, Satgas Badik 1984, Satgas Pasopati 1985, Satgas Sapu Jagad 1986, Satgas Guruh 1988, Satgas Rajawali I-IV, Satgas Pemburu IV, Satgas Mar Pam Dili
- ▶▶ Satgas Marinir Rencong Sakti Aceh I-XII
- ▶▶ Rensa Pamungkas A 1999-2000 Rensa XIII
- ▶▶ Rensa Pamungkas B 2000- 2004 Rensa XIV - Rensa XVIII
- ▶▶ Rensa XVIII A s/d Rensa XXIII 2003 - sekarang
- ▶▶ Satgas Mar Ambon I - IV 1999
- ▶▶ Satgas Pam Maluku Tenggara dan Halmahera

1999-2000

Tugas International

- ▶▶ Kongo (Garuda II 1960)
- ▶▶ Timur Tengah (Garuda VI-VIII 1975-1979)
- ▶▶ Vietnam (Garuda IV, V, VII 1973/74)
- ▶▶ Namibia (Garuda XI 1989)
- ▶▶ Irak-Iran (Garuda IX 1-2 1988)
- ▶▶ Kamboja (Garuda XII B dan XII D 1992 /1993)
- ▶▶ Somalia (Garuda XIII-1 1992-1993)
- ▶▶ Yugoslavia (Garuda XIV-1 1993-1994, Garuda XIV-2 1994-1995 dan Garuda XIV-6 1994-1995)
- ▶▶ Bosnia (Garuda XII A 1994-1995, Garuda XIV-E 1995-1996, Garuda XIV-D 1996-1997)
- ▶▶ Georgia (Garuda XV Nopember 1994-Nopember 1995)
- ▶▶ Filipina (Garuda XVII-1/ PGS Oktober 1994-Oktober 1995)
- ▶▶ Kontingen MILAN 2003 Garuda XX - 4 2003.
- ▶▶ Kontingen Garuda XXIII-4 Libanon 2006.

Terkait Klaim *Cost Recovery*

Negara Banyak Dirugikan Kontraktor Migas

Hasil audit BPK menyebutkan lima dari 43 perusahaan kontraktor migas berpotensi merugikan negara Rp 13,3 triliun. Padahal, *cost recovery* kendati setiap tahun terus saja naik, kontribusi pendapatan dari migas terhadap keuangan negara justru menurun. BPK memperkirakan kerugian negara ini akan semakin besar di masa-masa mendatang apabila model kontrak kerjasama migas tak diubah secara total. Karena itu BPK merencanakan BP Migas termasuk institusi yang turut akan diaudit.



Besarnya *cost recovery* membuat biaya produksi minyak Indonesia tergolong termahal di dunia.

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menganggarkan, selama tahun 2007 Pemerintah harus mengeluarkan biaya sebesar 9 miliar dollar AS sebagai biaya pemulihan atas setiap produksi minyak dan gas (migas), yang biasa dikenal sebagai *cost recovery*.

Akan tetapi hasil audit terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menghasilkan temuan yang mencengangkan. Berdasarkan Surat Ketua BPK Anwar Nasution kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 69/S/I-XV/08-2006, tentang hasil pemeriksaan atas *lifting* dan *cost recovery* kepada lima dari 43 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode tahun 2004 hingga semes-

ter pertama 2005, di situ disebutkan negara berpotensi mengalami kerugian keuangan sebesar 1,473 miliar dollar AS, atau setara Rp 13,3 triliun.

Kelima perusahaan yang berpotensi merugikan keuangan negara itu adalah PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Conoco-Phillips-Grissik (COPI-Grissik), PetroChina International Jabung Ltd (PIJL), PT Medco E&P Rimau, dan BOB Pertamina Hulu-PT Bumi Siak Pusako (PSP). BPK masih berencana melakukan audit terhadap sebelas KKKS lainnya, diperkirakan selesai Maret 2007, yaitu Total, Impact, Unocal East Kaltim, Cenoc, Vico, Exxon-Mobile, dan Conoco South Natuna. Dan yang tak kalah penting, BPK juga akan melakukan audit atas

BP Migas.

Pemeriksaan dilakukan untuk menilai kewajaran jumlah produksi migas atau *lifting*, dan biaya-biaya operasional yang dapat dibebankan kepada pemerintah atau *cost recovery*. BPK memperoleh kesimpulan, sebagaimana dilaporkan harian *Kompas* (21/10), potensi kerugian negara itu berupa kontrak pertukaran gas antara COPI dan CPI sebesar 5,467 juta dollar AS, dan penyediaan listrik antara BSP dan CPI senilai 20,04 juta dollar AS. Kemudian, kontrak penyediaan listrik antara CPI dan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) sebesar 210 juta dollar AS dan 1,233 miliar dollar AS, serta pertukaran minyak Duri dengan gas antara CPI dan COPI-Grissik senilai 4,22



Anwar Nasution

juta dollar AS.

Biaya Produksi Minyak Termahal

Cost recovery merupakan pengeluaran negara untuk membiayai investasi pengembangan lapangan migas. Bila diperinci *cost recovery* tahun 2007, untuk minyak diperkirakan mencapai 5,4 miliar dollar AS, dan untuk gas 3,6 miliar dollar AS.

Setelah angka ini diamati dari tahun ke tahun terus melonjak tajam. Pada tahun 2004 *cost recovery* minyak bumi dan gas (migas) masih sangat rendah, hanya 4,99 miliar dollar AS, tetapi tingkat produksinya justru tinggi, menghasilkan hingga 1,096 juta barel perhari.

Memasuki tahun 2005 total *cost recovery* migas mendadak naik tajam, menjadi 7,53 miliar. Bila diperinci untuk minyak bumi saja mencapai 4,19 miliar dollar AS, atau membengkak 30,8% dari sebelumnya tahun 2004 hanya 2,90 miliar dollar AS. Tetapi pada tahun 2005 jumlah produksi minyak justru turun tajam, menjadi hanya 1,060 juta barel per hari. Pada tahun 2006 *cost recovery* diperkirakan tetap naik menjadi 8 miliar dollar AS.

Besarnya *cost recovery* membuat biaya produksi minyak Indonesia tergolong termahal di dunia, untuk tahun 2007 diperkirakan menjadi rata-rata 14,8 dollar AS per barel. Padahal rata-rata biaya produksi minyak negara lain hanya 6 dollar AS per barel. Bersamaan itu, selama 2007 *lifting* minyak mentah Indonesia tetap saja rendah hanya 1 juta barel per hari, atau total hanya 365 juta barel per tahun.

Tingginya *cost recovery* pada 43 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas menjadi persoalan yang sangat kru-



Kardaya Warnika

sial sekali. Selain tak sebanding dengan jumlah produksi minyak dan gas yang terus menurun, kenaikan *cost recovery* juga tak memberikan tambahan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan kotor dari produksi minyak dan gas.

Pendapatan kotor dari produksi minyak dan gas selama tahun 2007 diperkirakan hanya mencapai 32,9 miliar dollar AS, atau Rp 305 triliun terdiri dari minyak 23 miliar dollar AS dan dari gas 9,9 miliar dollar AS. Selama 2007 penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas hanya Rp 147,2 triliun. Demikian pula pendapatan pajak penghasilan (PPh) selama tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp 41,2 triliun saja, sudah termasuk didalamnya PPh Migas Pertamina Rp 3,4 triliun.

KKKS yang *cost recovery*-nya tergolong sangat tinggi terdapat pada *joint operation body* (JOB) Amerada Hess, berlokasi di lapangan Jambi Merang, Jambi yang mencapai 54,35 dollar AS per barel produksi minyak. Disusul pada JOB Golden Spike di lapangan Raja Pendopo, sebesar 50,47 dollar AS per barel, JOB CIGL di lapangan Gebang 48,77 dollar AS per barel, PetroChina Bangko di lapangan

Bangko 46,25 dollar AS per barel, dan Chevron Makassar di Selat Makassar 45,44 dollar AS per barel.

Dianggap Fenomena Global

Kepala BP Migas Kardaya Warnika kepada *Bisnis Indonesia* (13/6) menjelaskan, *cost recovery* mengalami pembengkakan karena di dunia termasuk Indonesia terjadi peningkatan biaya dalam kegiatan perminyakan dunia. Tingginya harga migas di dunia mengakibatkan perusahaan minyak berlomba-lomba meningkatkan kegiatan agar dapat menambah produksi, atau mencari sumber cadangan baru.

"Hal itu menyebabkan permintaan akan peralatan, jasa dan tenaga kerja di industri perminyakan meningkat tajam. Sebagai contoh, tarif sewa rig pengeboran lepas pantai mengalami kenaikan lebih dari 300% dalam dua tahun terakhir, dan ongkos pabrikasi naik lebih dari 100%," urai Kardaya Warnika.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BP Migas adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Kepala BP Migas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dalam melaksanakan tugas ia bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Kardaya Warnika kelahiran Cirebon 17 Agustus 1952, dilantik menjadi Kepala BP Migas oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro atas nama Presiden RI pada hari Selasa, 12 April 2005.

Auditor Utama BPK, J Widodo H Mumpuni mengatakan, seluruh potensi kerugian negara ini sebenarnya sudah terealisasi. Tetapi pemerintah tak bisa berbuat banyak sebab seluruh klaim *cost recovery* KKKS dibenarkan dalam kontrak. Sebagai solusi, menurut Widodo, dalam rekomendasinya BPK meminta agar BP Migas mengubah seluruh kontrak dengan KKKS.

"Jika pemerintah tetap menggunakan model kontrak yang sudah digunakan puluhan tahun ini, kerugian negara akan terus berlanjut," kata Widodo kepada *Kompas*. ■ HT

Tahun	Cost Recovery (miliar dollar AS)	Produksi Minyak (juta bph)
2004	4,99	1,96
2005	7,53	1,06
2006	8,00	1
2007	9,00	1

Keterangan: Tahun 2006 dan 2007 merupakan perkiraan
 Sumber: *Bisnis Indonesia*, Kamis 28/9

Hingga Kuartal-3 2006 Fungsi Intermediasi Perbankan Jalan di Tempat

Sejumlah bank perusahaan terbuka (Tbk) mengumumkan laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2006. Terlihat cantik, sebab berhasil membukukan keuntungan yang menggiurkan pemegang saham. Tetapi sekaligus menggelikan sebab mereka memperoleh keuntungan sebagai pemburu rente.

Bank-bank terbukti masih lebih suka membungakan uang. Dana pihak ketiga (DPK) bukannya disalurkan kembali ke masyarakat, atau pengusaha, sebagai kredit atau modal kerja. Tetapi diendapkan di Bank Indonesia (BI) untuk memburu kelebihan bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

BI pun terlihat masih saja mengkondisikan bank-bank menjadi rentenir kerah putih. Sebab, BI masih memberikan *rate* yang tinggi di atas 10% pada SBI (saat ini 10,75%). Padahal perbankan hanya memberikan bunga kepada nasabah 5% saja per tahun.

Tak heran bila pendapatan terbesar bank-bank diperoleh dari selisih bunga, biasa dikenal sebagai margin bunga bersih atau *net interest margin* (NIM). Akumulasi NIM tergambarkan pada pendapatan bunga bersih atau *net interest income* (NII). Fungsi intermediasi perbankan masih jalan di tempat, tak senafas cetakbiru Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang didengung-dengungkan.

Bank Terbesar Pelopornya

Bank swasta terbesar Indonesia, Bank Central Asia (BCA), diakui oleh Presdirnya DE Setijoso, BCA menempatkan sejumlah besar DPK di SBI. Itu, katanya, merupakan pilihan terakhir, melompati pilihan utama lain untuk penyaluran kredit, serta pembelian obligasi korporasi dan obligasi perusahaan.

Berdasarkan data BI, sebagaimana ditulis *Kompas* Sabtu (21/10), per Juli 2006 BCA menempatkan dana di SBI Rp 16,512 triliun, naik dibanding Juni bulan sebelumnya Rp 12,132 triliun.

Wapresdir BCA Jahja Setiaatmadja mempunyai kalkulasi menarik soal pemburuan rente ini. Hasilnya, menempatkan dana di SBI jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan disalurkan sebagai kredit.

Dihitung Jahja, selama kuartal-3 2006 BCA memperoleh tambahan DPK berbentuk tabungan Rp 3 triliun. Jika dana

ini ditempatkan di SBI diperoleh bunga 10,75%. Padahal kepada nasabah sebagai pemilik dana, BCA hanya memiliki beban biaya untuk jenis tabungan ini 5% per tahun.

Berarti, BCA memperoleh *net interest margin* (NIM) 5,75% (10,75%-5%). NIM 5,75% dikalikan Rp 3 triliun hasilnya diperoleh Rp 175 miliar sebagai pendapatan bunga bersih (*net interest income*, NII).

Pada waktu yang sama berbentuk giro BCA juga memperoleh DPK sebesar Rp 1,6 triliun. Bila dana ini ditempatkan di SBI diperoleh tambahan pendapatan NII Rp 136 miliar.

Maka bila semua DPK tersebut ditempatkan di SBI akan diperoleh NIM sebesar Rp 311 miliar per tahun. Mudah sekali, bukan?

Akan tetapi jika BCA ingin memperoleh tambahan pendapatan sebesar sama Rp 311 miliar dari penyaluran kredit, dan dengan asumsi bunga kredit untuk korporasi 13-14%, maka besar kredit yang harus dikururkan paling tidak mencapai Rp 13,8 triliun.

Dengan perhitungan untung-rugi, Jahja mengakui pertumbuhan kredit BCA selama tahun 2006 sangat lambat, hanya tumbuh Rp 2 triliun atau kurang dari 5% dibanding tahun 2005.

Perbandingan antara dana simpanan (DPK) dengan kredit yang diberikan, atau *loan to deposit ratio* (LDR) juga turun. Per September 2005 LDR BCA masih 40%, tahun ini 38,3%. Total kredit BCA per September 2006 Rp 53,746 triliun, turun 0,8% dibanding tahun 2005.

Kinerja Bank Lain Sama

Wajah laporan keuangan kuartal-3 2006 pada bank lain hampir sama.

PT Bank Century Tbk, bila pada September 2005 membukukan margin bunga bersih (NIM) 0,36%, tahun ini membaik menjadi 3,24%. Kenaikan memberi lonjakan pendapatan bunga bersih (NII) hampir sepuluh kali lipat, total menjadi Rp 251,16 miliar.



BI terus menggenjot pertumbuhan kredit.

PT Bank PAN Indonesia Tbk (Panin) hingga September 2006 berhasil mengumpulkan DPK Rp 22,8 triliun, 43% diantaranya berbentuk tabungan dan giro. Dari dana itu Rp 7,1 triliun ditempatkan di SBI dan antar bank, melonjak dari tahun sebelumnya Rp 1,4 triliun.

Tak mengherankan apabila hingga September 2006 bank Panin berhasil membukukan margin bunga bersih 4,86%, naik dari 4,11% akhir tahun lalu. Bank Panin mencatat pendapatan bunga bersih sebesar Rp 1,07 triliun, sementara pendapatan bukan bunga (*fee based income*) hanya Rp 378 miliar. Panin memperoleh peningkatan laba operasional 33%, menjadi Rp 813 miliar.

PT Bank NISP Tbk hingga kuartal-3 2006 membukukan laba Rp 171,5 miliar, naik 105% dibanding tahun lalu. Presdir bank NISP, Pramukti Surjaidaja, mengakui kenaikan laba disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga bersih, ditambah pendapatan bukan bunga.

Bank NISP mengalami peningkatan pendapatan bunga bersih 21%, menjadi Rp 638,2 miliar, dari sebelumnya Rp 528,4 miliar. Pendapatan non bunga, walau naik 29%, relatif masih kecil dari Rp 102,5 miliar menjadi Rp 132,1 miliar.

PT Bank BNI Tbk hingga kuartal-3 2006 memperoleh kenaikan pendapatan bunga bersih 3,7%, menjadi Rp 5,5 triliun, dan kenaikan *fee based income* 43% menjadi Rp 1,8 miliar. BNI membukukan laba bersih Rp 1,4 triliun, naik 13,85% dibanding tahun lalu Rp 1,23 triliun.

BNI mengalami kenaikan dana pihak ketiga 13%, menjadi Rp 126,3 triliun, dengan komposisi deposito 44%, tabungan 29%, dan giro 27%. Walau DPK pada



bank BNI tinggi, margin bunga bersih justru turun 0,55%, menjadi 5,46%.

Presdir PT Bank Niaga Tbk, Peter B Stok, mengatakan, bank Niaga memperoleh kenaikan laba bersih berasal dari *net interest income* 30%, dan dari keuntungan penjualan surat berharga serta pengelolaan biaya operasional secara efisien. Bank Niaga memperoleh laba bersih setelah konsolidasi Rp 537,84 miliar, naik 23% dibanding periode sama tahun 2005 yang sebesar Rp 435,98 miliar.

PT Bank BRI Tbk tergolong tinggi menempatkan dana di SBI, menurut *Kompas Sabtu* (21/10) mencapai Rp 13,316 triliun. Akan tetapi, masih dihari yang sama, harian sore *Suara Pembaruan* justru menulis BRI dan PT Bank Bukopin Tbk sebagai bank yang berhasil membuktikan kenaikan laba sebagian besar berkat kontribusi dari pendapatan bunga kredit.

Laba bersih BRI hingga kuartal-3 2006 tercatat Rp 3,1 triliun, meningkat 23,56% dibanding tahun sebelumnya Rp 2,51 triliun. Peningkatan laba didorong oleh pendapatan bunga yang tumbuh 23,30%, dari Rp 12,63 triliun menjadi Rp 15,57 triliun.

"Pendapatan bunga BRI sebagian besar atau 74,34% berasal dari pendapatan bunga kredit," kata Dirut BRI Sofyan Basir kepada *Suara Pembaruan*.

Bank Bukopin, kata Dirut Glen Glenardi, juga mengalami peningkatan laba yang ditopang oleh pendapatan bunga bersih seiring dengan penyaluran kredit di segmen usaha menengah, kecil, dan mikro.

Bank Bukopin mencatat pertumbuhan laba sebelum pajak Rp 344,95 miliar, naik Rp 67,66 miliar atau 24,4% dibanding periode sama 2005. ■ HT

Bank BII dan Bank Mandiri Genjot Pertumbuhan Kredit

Sama seperti bank lain, PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) juga mengalami peningkatan pendapatan ini. BII bersama Bank Mandiri hanya sedikit diantara bank yang masih aktif menjalankan fungsi intermediasi.

Dalam siaran pers yang diterima *Berita Indonesia*, disebutkan, hingga kuartal-3 2006 BII mengalami peningkatan pendapatan. Pendapatan bunga bersih (*net interest income, NII*) tumbuh 13%, menjadi Rp 2,082 triliun, dari tahun



Sukatmo Patmosukarso

sebelumnya Rp 1,842 triliun. Pendapatan operasional lain naik 5%, menjadi Rp 795 miliar. BII mencatat peningkatan margin bunga bersih (*net interest margin, NIM*) menjadi 5,35%.

BII juga berhasil membuktikan kemampuan mengelola biaya secara efektif, jumlahnya hingga September 2006 Rp 1,758 triliun. *Cost to Income Ratio* BII terus saja membaik, dari tahun sebelumnya 66,44% menjadi 61,12% pada September 2006. Perbaikan ini akan terus berlanjut hingga menjadi 50% di tahun 2008.

Ini menunjukkan BII mampu mengelola biaya secara efektif dalam melakukan investasi strategis guna mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan.

BII mampu bertahan dan mencatat kinerja yang cukup baik, walau laba bersih konsolidasi pada September 2006 hanya Rp 517 miliar, turun 12% dibanding tahun sebelumnya, atau turun 6% dibanding kuartal sebelumnya.

BII mengalami penurunan profitabilitas karena mencatatkan total biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sebesar Rp 543 miliar, meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya hanya Rp 98 miliar.

BII hingga kuartal-3 2006 berhasil meningkatkan pertumbuhan kredit hingga mencapai 18%, dari sebelumnya Rp 21,320 triliun menjadi Rp 25,154 triliun. Komposisi terdiri dari kredit korporasi 34%, kredit UKM/Komersial 34%, dan kredit konsumen 35%.

Pertumbuhan kredit BII yang sedemikian tinggi berhasil menaikkan rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK), atau *loan to deposit ratio* (LDR), dari sebelumnya 54,66% menjadi 61,43%. Akan tetapi peningkatan LDR turut pula diikuti peningkatan kredit bermasalah, atau *non performing loan* (NPL) (gros) menjadi 4,78%, dibanding tahun sebe-

lumnya 2,85%. NPL (net) BII berada pada posisi 3,38%.

Total aktiva dan kewajiban BII relatif stabil, masing-masing Rp 49,167 triliun dan Rp 44,043 triliun. Hingga September 2006 total kewajiban BII terutama berasal dari simpanan nasabah Rp 35,039 triliun, terdiri dari deposito 61% sisanya tabungan dan giro 39%.

Genjot Pertumbuhan Kredit

Menjawab pertanyaan perihal visi perusahaan ke depan, Sukatmo Patmo-

sukarso, Direktur BII, Kamis (2/11), kepada *Majalah Berita Indonesia* mengatakan BII akan tetap menggenjot pertumbuhan kredit.

"Kami akan terus genjot pertumbuhan kredit. Diharapkan kondisi makro akan lebih kondusif ke depan," ujar Sukatmo.

"Saat ini konsentrasi kami di sektor kredit konsumsi adalah meningkatkan *collection* di *consumer loans*. Ekspansi di sektor SME (UKM, *Red*), komersial dan korporasi akan kami percepat dengan menambah *officer* kredit di 10 sentra kredit di seluruh Indonesia dan di kantor pusat. Kami juga akan meluncurkan kredit program untuk SME sehingga proses kredit bisa lebih dipercepat," kata Sukatmo.

Sukatmo Patmosukarso memastikan sejumlah sektor industri tertentu telah diidentifikasi untuk menjadi titik pertumbuhan kredit korporasi. "Misal pertambangan, transportasi, infrastruktur, perdagangan dan beberapa sektor penunjangnya," ujarnya.

Senada dengan langkah BII, manajemen Bank Mandiri telah menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 16-18%, dan menekan rasio kredit bermasalah (NPL) di bawah 10%.

Hingga kuartal-3 2006 Bank Mandiri menyalurkan kredit Rp 100,85 triliun, naik 0,53%. Rasio LDR menjadi 53%, naik dari sebelumnya 49%. Rasio NPL turun menjadi 14%, dari sebelumnya 16%. Bank Mandiri fokus pada penyaluran kredit di segmen konsumen, kredit UKM, kredit korporasi, dan kredit komersial.

"Secara *gross* walaupun pertumbuhan kredit perbankan agak lamban, tapi fungsi intermediasi kami tetap jalan. Tadinya orang memprediksi akan terjadi konsolidasi, sehingga kredit sepanjang 2006 akan turun, tapi ternyata kami masih bisa mempertahankan pertumbuhan kredit," kata Agus Martowardojo, Dirut PT Bank Mandiri Tbk kepada *Investor Daily Selasa* (31/10). ■ HT

Ir. M. Hatta Radjasa

Jadikan Angkutan Lebaran Lebih Baik

Sebagai Menteri Perhubungan, Ir. M. Hatta Radjasa dengan tulus bersedia menjalani kesibukan yang lebih ekstra selama pelaksanaan angkutan lebaran 2006.

Bukan hanya menjadi anggota Menteri tersibuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), pria kelahiran Palembang 18 Desember 1953 yang selalu berpenampilan kalem, namun dikenal luas sebagai pengelola manajemen yang terbilang sukses, ini juga rela tak turut berlebaran ke kampung halaman.

Hatta Radjasa, insinyur lulusan Teknik Perminyakan ITB Bandung yang mantan aktivis Masjid Salman, sebelum diangkat menjadi Menteri Ristek/Kepala BPPT pada Kabinet Gotong Royong tahun 2001, sudah terbentuk sebagai pengusaha dan CEO yang sukses. Ia memulai karir sebagai Teknisi Lapangan PT Bina Patra Jaya (1977-1978), kemudian Wakil Manager Teknis PT Meta Epsi, sebuah perusahaan pengeboran minyak (1980-1983), dan Presiden Direktur Arthindo (1982-2000).

Ketika reformasi sosial politik bergulir, suami dari drg. Oktiniwati Ulfa Dariah ini lantas terjun menjadi politisi. Pengagum tokoh kaliber dunia Bung Karno dan Conrad Adenaur, Kanselir pertama Jerman pasca PD-II, ini tampil sebagai politisi yang piawai menjalankan komunikasi politik. Ia bisa dengan mulus menyelesaikan kebuntuan politik dengan membangun komunikasi yang terbuka terhadap semua elemen. Di area politik, Hatta adalah *the man of the crisis*.

Hatta Radjasa terbentuk menjadi politisi religius penganut paham pluralisme, membuatnya layak disebut sebagai negarawan. Sebagai contoh, sejak memasuki ruangan kerja kementeriannya, saat itu pula masa berakhirnya peran dia sebagai politisi. Di situ ia pasti akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, dan melepaskan kepentingan partai, golongan dan pribadi.

Ayah dari Reza, Aliya, Azimah, dan Rasyid ini sejak kecil sudah terlatih bekerja keras, jujur, mandiri dan saling bekerjasama. Tak mengherankan apabila ia berhasil menunjukkan integritas dan kapasitasnya saat ditunjuk menjabat

Menristek/Kepala BPPT.

Dan selama dua tahun terakhir menjabat Menteri Perhubungan, Hatta Radjasa sesungguhnya bukannya tak pernah menghadapi persoalan klasik yakni terjadi kecelakaan transportasi. Kecelakaan bisa saja mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia dan kerugian material dalam jumlah besar.

Akan tetapi Hatta selalu hadir menampakkan diri di setiap peristiwa itu. Hatta menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang paling bertanggungjawab atas setiap kecelakaan. Lalu dengan lugas Hatta berbicara kepada wartawan, detil menjelaskan perkiraan sebab-musabab kecelakaan, sehingga terhindarlah opini yang menyesatkan atau kemungkinan spekulasi penyebab kecelakaan. Para korban lantas memperoleh empati yang dalam, merasa sangat diperhatikan oleh pemegang otoritas transportasi.

Angkutan yang Nyaman-Aman

Sebagai Menteri di sebuah negeri yang setiap tahun rutin menghadapi persoalan angkutan mudik lebaran, Hatta memulai langkah pertamanya dengan membuat kebijakan filosofis, berlanjut ke kebijakan operasional, hingga memperhitungkan teknis pelaksanaan operasional di lapangan.

Semua ia tuangkan dalam payung hukum yang mengikat semua orang. Maka muncullah Inpres No. 3/2004 tentang Koordinasi Angkutan Lebaran, Keputusan Menteri No. KM.291/2006 tentang Angkutan Lebaran Terpadu, serta Perhub No. KM 48/2006 tentang Rencana Operasional Penyelenggara Angkutan Terpadu.

Kepada **Samsuri** dari Majalah *Berita Indonesia*, Hatta Radjasa dalam berbagai kesempatan mengatakan, pelaksanaan angkutan lebaran walau sangat berat namun begitu mulia. Sebab untuk tahun 2006 ini, misalnya, jumlah pemudik yang harus diberangkatkan sekitar 15 juta orang, naik 5,3% dibanding tahun sebelumnya.

Dengan penanganan yang terencana,



Ir. M. Hatta Radjasa

angkutan lebaran tahun ini terasa jauh lebih baik. Arus lalu lintas relatif lancar. "Indikatornya, semua pengguna jasa selama angkutan lebaran berhasil terangkut, dan perjalanan mereka berjalan dengan aman dan lancar. Tidak ada penumpang arus mudik yang tidak terangkut," jelas Hatta. Kata dia, jumlah kecelakaan lalu lintas juga menurun jauh, termasuk angka korban jiwa meninggal dunia dan luka-luka turut menurun.

Hatta mengakui menemukan sejumlah faktor penghambat namun itu berada di luar jangkauan insan Perhubungan. Seperti, kabut asap akibat kebakaran hutan yang menyelimuti beberapa daerah Indonesia, atau pendangkalan air sungai karena kemarau berkepanjangan seperti di Sungai Barito. "Termasuk akibat lumpur di Sidoarjo yang kemungkinan mengganggu arus mudik di sana. Tetapi pada saat angkutan lebaran lalu lintas masih lancar."

Segala penghambat, walau berada di luar jangkauan, berhasil diantisipasi secara merata. Masalah asap di wilayah pulau Sumatera misalnya. Karena Bandara Sultan Thaha Jambi diselimiuti asap



foto: dok. ti

yang pekat penumpang tujuan kota Jambi dialihkan ke Bandara Sultan Machmud Badaruddin II, Palembang, lalu diteruskan dengan perjalanan darat menuju Jambi. Bandara Sultan Thaha ditutup sembilan hari karena asap, 90 penerbangan mengalami pembatalan.

Begitu pula di wilayah Kalimantan. Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya tertutup asap, tetapi penumpang bisa meninggalkan Kalimantan melalui Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin. Bandara ini ditutup selama 15 hari karena asap, 75 penerbangan harus dibatalkan.

Secara umum moda transportasi udara mengalami perbaikan signifikan, terlebih disiapkannya *extra-flight* oleh para operator. Tambahan frekuensi penerbangan sangat ekonomis sebab terpakai hingga 80 persen. Ini, sebuah pelajaran berharga bagaimana menghadapi *peak season* termasuk Natal-Tahun Baru.

Kesiapan infrastruktur jalan tak luput dari perhatian Hatta. Ia mengecek langsung kondisi ruas jalan raya di jalur Pantura dan jalur selatan pulau Jawa, serta Jalintim dan Jalinteng di Sumatera. Semua jalur ekonomis ini memperoleh

prioritas penanganan, perbaikan, hingga peningkatan kapasitas serta pengaturan manajemen lalu lintas yang optimal.

Perhatian yang sama dia curahkan pada jalur penyeberangan antar pulau Merak-Bakauheni, Ujung-Kamal Madura, dan Ketapang-Gilimanuk. Masalah klasik di sini adalah waktu tunggu sejak membeli tiket hingga naik ke kapal ferry. Di Merak-Bakauheni waktu tunggu rata-rata masih 5 jam, Ujung-Kamal Madura 4 jam, dan Ketapang-Gilimanuk 2,5 jam. Selain soal waktu tunggu, sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan belum mampu menampung volume angkutan yang tinggi yang datang secara bersamaan, ditambah masih kurang disiplinnya pengguna jasa penyeberangan.

Hatta sangat memaklumi tingginya penggunaan sepeda motor pada mudik lebaran tahun 2006 ini. Jumlahnya 1.786.073 sepeda motor, meningkat tajam dibanding tahun lalu 1.252.812 juta sepeda motor. Demi menjamin keselamatan dan kelancaran berlalu lintas sepeda motor, Hatta berpendapat perlu dicari formula baru mengakomodasi pemudik yang menggunakan sepeda motor.

"Kita menyadari, meski penyelenggara angkutan lebaran tahun ini berjalan dengan baik, saya berharap penyelenggaranya pada tahun-tahun mendatang bisa lebih baik dan lebih lancar lagi. Kecelakaan lalu lintas baik kuantitas maupun kualitasnya dapat ditekan seminimal mungkin," simpul Hatta Radjasa.

Hasil evaluasi angkutan lebaran tahun ini menunjukkan, secara umum pelayanan kepada masyarakat jauh lebih baik. Hal itu tak lepas dari semakin baiknya tingkat koordinasi dan aplikasi lapangan yang terintegrasi secara baik.

"Sebelumnya, berbagai kemungkinan sudah kita antisipasi bagaimana supaya pemudik bisa sampai ke tempat tujuannya. Pelaksanaan angkutan lebaran 1427 H berjalan tuntas dan paripurna," tukas anggota Penasehat DPP PAN ini.

Fokus Membangun Kereta Api

Hatta Radjasa merupakan Menteri Perhubungan yang sangat obsesif membangun industri jasa perkeretaapian Indonesia yang baik. Pembahasan revisi UU No. 13/1992 tentang Perkeretaapian, diperkirakan selesai awal tahun 2007, adalah momentum yang pas untuk mewujudkan obsesi supaya memacu pertumbuhan kereta api di masa mendatang.

Kondisi perkeretaapian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sudah jauh lebih baik. Namun Hatta tetap mengakui pembangunan kereta api sangat terlambat. Bila tak segera dibangun secara berkelanjutan sejak sekarang, Hatta memastikan perkembangan in-

dustri jasa perkeretaapian Indonesia akan semakin tak kondusif.

Selain menyiapkan perangkat hukum berupa revisi UU Perkeretaapian Indonesia, Hatta sudah pula mengalokasikan anggaran yang besar bahkan yang terbesar di lingkungan Departemen Perhubungan. Jumlahnya untuk tahun 2006 ini Rp 2,8 triliun.

Dalam visinya, Hatta ingin membangun sarana dan prasarana perkeretaapian secara *all out* di semua bidang. Volume penumpang angkutan didesain sesuai *supply* dan *demand* untuk memacu terselenggaranya angkutan kereta api yang ideal, handal, dan memenuhi faktor keamanan dan kenyamanan perjalanan.

"Komitmen kita adalah membangun transportasi publik yang handal. Secara bersama, pemerintah, masyarakat dan seluruh *stakeholder* akan membangun industri jasa kereta api yang dapat dibanggakan," jelas Hatta.

Karena komitmennya yang tinggi Hatta tak pernah bosan mengirim pesan singkat SMS ke Dirjen Perkeretaapian, atau kepada Dirut PT Kereta Api Indonesia supaya mewaspadai sejumlah pencurian prasarana kereta api, seperti KA-Klip (penambat rel). Pencuri tidak menyadari harga benda itu tak seberapa, tetapi bila tercuri dampaknya fatal buat kereta api.

Hatta juga berpesan agar selalu diantisipasi kemungkinan terjadi sabotase. Terkadang sebuah persoalan yang sangat kecil, tetapi dalam hitungan waktu per jam, per menit, bahkan per detik bila salah melakukan perhitungan bisa berakibat fatal. Hatta sangat apresiatif, fokus, perhatian serta melakukan antisipasi dini terhadap segala hal yang mungkin terjadi. ■ RI/HT

Biodata:

Nama : Ir. M. Hatta Radjasa
Lahir : Palembang, 18 Desember 1953
Agama : Islam
Isteri : Drg. Oktiniwati Ulfa Dariah Radjasa
Anak : Reza, Aliya, Azimah dan Rasyid

Pendidikan:
Insinyur Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB)

Pekerjaan:
Menteri Perhubungan RI (2004-2009)

Alamat Rumah:
Perumahan Executive Golf Mansion Kav.26
Jl. RS Fatmawati Jakarta 12430

Alamat Kantor:
Departemen Perhubungan RI
Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat

Duel Demokrat vs Republik

Saling Menjatuhkan Lewat Iklan Politik

Menyongsong pemilu sela 7 November, Partai Demokrat maupun Republik mengerahkan semua daya dan upaya untuk meraih simpati pemilih. Kedua kubu menggunakan iklan sebagai cara untuk saling menjatuhkan. Tapi pada pemilu kali ini kubu Demokrat lebih baik dalam mengatasi iklan-iklan serangan dari kubu Republik.

Pertama-tama, kubu Republik berusaha menyerang kubu Demokrat dengan menyinggung masalah keamanan nasional, karena Demokrat dianggap terlalu lembut dalam mengatasi masalah terorisme. Namun cara seperti itu tidak berhasil, karena George W. Bush sendiri belum dapat menyelesaikan masalah terorisme. Lalu selanjutnya, Republik berusaha menyerang Demokrat dengan mengatakan Demokrat tidak bersikap tegas dan keras terhadap permasalahan imigran ilegal. Tetapi itu juga tidak berhasil karena Bush sendiri juga bersikap "ramah" terhadap masalah imigrasi, dan selain itu, orang-orang Republik yang ada di kongres juga gagal membuat persyaratan yang keras mengenai keimigrasian.

Beberapa minggu menjelang pemilu sela, kubu Republik membuat iklan yang mengatakan kalau Demokrat akan menaikkan tarif pajak. Tetapi

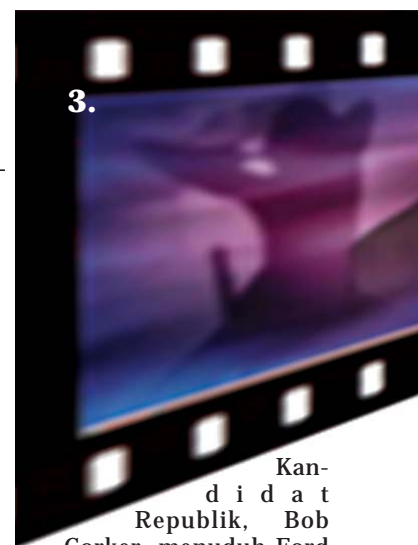
usaha tersebut tidak berhasil mempengaruhi para pemilih, karena para pemilih memfokuskan perhatian mereka kepada masalah Irak dan Mark Foley. Kemudian Republik kembali mengeluarkan iklan yang lebih keras lagi yaitu iklan yang menggambarkan Demokrat sebagai gila seks, pendukung homoseksual, pembaca pornografi, dan dalam kasus salah satu kandidat senat dari Demokrat, Jim Webb, yang juga seorang penulis novel disebut sebagai penulis cerita porno yang menyebarkan. Iklan-iklan yang dikeluarkan oleh Republik menjadi bukti bahwa ancaman tidak selalu dapat mengarahkan perhatian. Terkadang iklan-iklan seperti itu hanya mengarah kepada kegilaan, keputusan.

Banyak media yang memusatkan perhatian pada kandidat senat dari Demokrat yang berasal dari Tennessee, Harold Ford Jr. Dia masih muda, menarik, dan berkulit hitam. Kesalahan Ford yang menjadi

sasaran kubu Republik adalah kedatangannya, bersama-sama 3.000 orang ke pesta Super Bowl yang disponsori oleh Majalah Playboy tahun lalu. Hal ini menginspirasi kubu Republik untuk membuat iklan yang menampilkan seorang wanita berpakaian seksi yang mengaku bertemu dengan Ford di pesta itu dan lalu, pada kalimat terakhir dalam iklan itu, wanita itu mengecupkan bibirnya, mengedipkan matanya, dan berbisik, "Harold, telepon aku."

Iklan Republik berikutnya menyerang Ford dengan mengatakan Ford memiliki "nilai-nilai Hollywood," karena ucapannya yang mendukung pernikahan gay dan pendistribusian pil pencegah kehamilan bagi para remaja. Dengan munculnya iklan itu, Ford tidak tinggal diam dan segera memberi respon dengan iklan yang menampilkan penduduk Tennessee yang mengekspresikan kejiikan mereka atas kubu Republik. Seorang wanita bernama Maura Satchell mengatakan, "Hidup anak saya sedang dipengaruhi di Irak, dan mereka memasang iklan ini hanya untuk mengecoh perhatian kita saja."

Respon yang cepat kepada serangan Republik menjadi kunci keberhasilan Ford untuk mendapatkan kekuatan suara di Tennessee. Pada awal bulan Oktober ini, sebagai contoh,



3.

Kandidat Republik, Bob Corker, menuduh Ford mendukung pemberian keringanan hukuman bagi para imigran. Ford segera memberi respon dengan membuat iklan yang mengklaim Perusahaan Konstruksi milik Corker telah mempekerjakan imigran asing. Respon yang cepat adalah peraturan yang saya buat bagi seluruh kandidat pada tahun ini," ujar Senator Charles Schumer dari New York, seorang dewan direksi Komite Kampanye Kesenataran Demokrat. "Jika anda menginginkan dukungan finansial dari kami, anda harus memberi respon dalam 24 jam setelah anda diserang."

Sungguh jelas, kubu Demokrat telah belajar dari kesalahan yang dilakukan kandidat presiden dari Demokrat, John Kerry, pada tahun 2004 yang bertindak lambat ketika merespon terhadap serangan Republik. Tetapi Schumer belajar sesuatu dari perjalanannya ke kursi senat yang ia lakukan pada tahun 1998 dimana ia bersaing melawan Alfonse D'Amato. "Fonzi menyerang saya karena saya dianggap tidak tegas terhadap kejahatan, dan





kami kembali menyerang dia dengan serangkaian iklan yang keras dengan kalimat: Alfonse D'Amato: terlalu banyak kebohongan selama ini." Schumer mengatakan bahwa iklan terpenting yang dibuat oleh Demokrat pada tahun ini adalah iklan yang muncul pada bulan Juli dalam persaingan perebutan kursi Senat di Ohio. Kandidat dari Republik, Mike DeWine, memasang iklan yang intinya mempertanyakan catatan kandidat dari Demokrat, Sherrod Brown, pada masalah keamanan nasional dengan menampilkan Gedung World Trade Center dalam keadaan diserang teroris. Republik menggunakan iklan seperti itu karena Brown adalah orang yang selalu berulang-ulang kali memilih tidak menaikkan dana bagi keintelijenan. Namun kubu Demokrat telah dapat memprediksi iklan seperti itu. "Para kandidat kami merasa kuatir mengatasi kubu Republik yang mengung-

k i t m a s a l a h k e m a n a n n a s i o n a l," ujar J.B. Poersch, direktur eksekutif Komite Kampanye Kesenatoran Demokrat. "Iklan seperti ini berhasil mengalahkan kami pada tahun 2002 dan 2004."

Tetapi Brown memberikan perlawanan dengan iklan yang dimulai dengan kalimat: "Sungguh menyedihkan. Mike DeWine mengeksploitasi peristiwa 9/11 untuk memfitnah Sherrod Brown..." dan selanjutnya iklan itu beralih pada topik yang menjadi kesukaan Brown: (DeWine) mendukung perjanjian dagang dengan Cina, meskipun setelah ribuan orang kehilangan pekerjaan dan pemindahan sejumlah teknologi militer yang sensitif..." Hasilnya polling menunjukkan iklan itu memiliki pengaruh yang menyebar.

"Kandidat kami yang lain melihat keberhasilan Brown," ujar Poersch, "dan sekarang mereka percaya diri kalau mereka dapat mengatasi Republik apabila mereka kembali menggunakan isu keamanan nasional. Sebagai hasilnya, fenomena iklan politik pada tahun 2006 ini merupakan serangan balik kubu Demokrat. ■ DAP, MLP

Rakyat Amerika Memilih

Rakyat Amerika Serikat Selasa (7/11) memberikan suaranya dalam pemilihan umum sela untuk mengisi 435 kursi di DPR (House of Representatives) dan 33 kursi Senat. Lebih dari 200 juta warga AS berhak memilih dalam pemilu kali ini, namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, jumlah pemilih yang datang ke TPS kurang dari 50 persen, kecuali pemilu presiden tahun 2004 di mana jumlah pemilih mencapai 63 persen. Pemilu sela tahun ini tampaknya sedikit "istimewa" karena banyak yang menganggapnya sebagai "referendum" terhadap kepemimpinan Bush sebab rakyat AS telah menanggapi serangkaian kekecewaan terhadap pemerintahan Bush. ■



Tiga Iklan Politik 'Terpanas'

1. "Lawan politikku berpesta bersama 'kelinci' model playboy yang berpakaian dalam! Dan kemudian pergi ke Gereja!"

Kalimat di atas adalah pesan iklan politik yang menyerang kandidat senat kubu Demokrat dari Tennessee, Harold Ford. Iklan ini merupakan iklan balasan dari kubu Republik terhadap iklan kubu Demokrat sebelumnya. Iklan Demokrat sebelumnya itu menampilkan Ford sedang berjalan di antara kursi-kursi Gereja. Ford kemudian berkata, "Di sini saya belajar mengenai mana yang benar dan mana yang salah," ucapnya dengan menampilkan wajah yang tulus. Kemudian Ford menjelaskan mengenai lawan politiknya dari kubu Republik, Corker, yang berkata hal-hal bohong mengenai dirinya.

Kubus Republik membuat iklan balasan: "Orang seperti apa yang pergi berpesta dengan model playboy berpakaian dalam dan kemudian membuat iklan di antara kursi-kursi Gereja? Iklan ini menyindir Ford yang beberapa bulan lalu pergi ke pesta yang diadakan oleh Majalah Playboy. Iklan ini kemudian dibalas lagi oleh iklan dari kubu Demokrat yang menunjukkan kekayaan yang dimiliki Corker tetapi tidak memberi apa-apa kepada polisi dan pemadam kebakaran.

2. "...Kita akan semakin bahagia!"

Mike DeWine dari kubu Republik suka berkata: "Kita semua harus bekerja sama: Demokrat dan Republik. Kemudian kubu Demokrat membuat iklan yang menyinggung perkataan DeWine tersebut. Iklan ini dimulai dengan sebuah kalimat: "Senator DeWine menghabiskan 92% waktunya dengan Presiden Bush." Kemudian diikuti dengan paduan suara anak-anak yang bernyanyi: "Semakin kita bekerja sama, kita akan semakin bahagia." Selanjutnya tampak wajah DeWine sedang merangkul Presiden Bush yang disertai tulisan: Hutang Negara Meningkatkan 9 Triliun Dollar, Pemotongan Pajak Bagi Perusahaan Minyak, Pemotongan Pajak Bagi Perusahaan Yang Bekerja di Luar Negeri, dan diakhiri dengan: Mike DeWine senang dapat bekerja sama dengan George Bush.

3. "Hi, seksi!"

Sebuah bayangan penari seronok yang kemudian disusul dengan gambar Michael Arcuri sedang tersenyum, seorang kandidat dari kubu Demokrat. Kemudian terdengar suara yang berkata: "Nomor telepon layanan percakapan fantasi muncul di dalam tagihan telepon Michael Arcuri ketika ia menginap di Hotel New York untuk keperluan bisnis. Siapa yang menelepon percakapan fantasi dan membebani pembayar pajak? Lalu terdengar suara penari seronok: "Telepon nakal!"

Apa yang tidak dikatakan oleh iklan itu adalah bahwa panggilan telepon itu hanya berlangsung kurang dari semenit, dan sebenarnya panggilan tersebut terjadi karena Arcuri salah menekan nomor. Arcuri sebenarnya ingin menelepon Departemen Keadilan, yang secara kebetulan bernomor sama dengan layanan telepon fantasi tapi berbeda kode area. ■

Menguak Misteri Leonardo da Vinci

Selama setengah milenium, sudah ada beberapa penulis yang berusaha keras memahami misteri dari seorang Leonardo Da Vinci. Apakah sosok yang membuat lukisan Mona Lisa itu adalah seorang seniman? Atau apakah dia seorang penemu yang aneh atau seorang ilmuwan? Apakah dia seorang yang memiliki pandangan ke depan yang layak disebut sebagai seorang visionaris atau dia hanyalah seseorang yang memiliki masa kecil yang traumatik.

Para ahli intelektual mulai dari Johann Wolfgang von Goethe hingga Sigmund Freud telah berusaha memahami karakter dari orang yang sangat penting yang pernah hidup pada masa Renaissance. Baru-baru ini, sebuah buku yang berjudul *The Da Vinci Code* yang ditulis oleh Dan Brown, menceritakan sisi lain dari Da Vinci. Dalam buku itu dikatakan bahwa Da Vinci memberikan petunjuk-petunjuk mengenai konspirasi yang terjadi di dalam Gereja Roma Katolik ke dalam lukisan "Perjamuan Terakhir".

Buku *The Da Vinci Code* karangan Dan Brown hanyalah sebuah buku fiksi. Tetapi penelitian terbaru menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat menjelaskan apa sebenarnya yang membuat Da Vinci menjadi sangat terkenal. Sejak tahun 1880-an,



Penelitian Leonardo tentang Embrio.

sebanyak 6.000 naskah milik Da Vinci telah dipublikasikan dan diterjemahkan, sehingga membuat dunia tahu mengenai kejeniusan seorang Leonardo Da Vinci.

Semuanya itu menjadi dasar bagi dimulainya pertunjukan baru di *Victoria and Albert Museum* yang berada di London. Pertunjukan yang diberi nama "Leonardo Da Vinci: Experience, Experiment, and Design" resmi dibuka pada tanggal 14 September 2006. Pertunjukan ini menampilkan naskah-naskah dan lukisan-lukisan karya Da Vinci yang jarang diperlihatkan di depan umum, dan juga rancangan-rancangan buatan Da Vinci yang sudah diperbesar ukurannya dan ditampilkan dengan bantuan animasi komputer. Pertunjukan ini telah memunculkan kembali proses berpikir Da Vinci.

"Seperti Shakespeare atau Newton, seperti tokoh-tokoh hebat lainnya yang pernah hidup, Da Vinci terus-menerus membuat kejutan," ujar Martin Kemp, seorang kurator dalam pertunjukan itu. "Anda melihat lukisan-lukisan aslinya dan semuanya mengagumkan."

Pertunjukan karya Da Vinci ini terbagi ke dalam empat bagian. Pertunjukan ini dimulai dengan "The Mind Eye", sebuah eksplorasi terhadap pekerjaan Da Vinci yang isinya mengenai hubungan antara mata dan pikiran, dan penelitiannya yang sangat detil mengenai hubungan proporsional antara bagian-bagian wajah, batang tubuh, dan lengan.

Da Vinci tidak pernah mendapatkan pendidikan yang cukup dalam bidang filsafat klasik dan natural yang justru dinikmati oleh beberapa orang yang hidup di zaman yang sama dengannya. Da Vinci selalu menekankan bahwa dia adalah "orang yang belajar dari pengalaman," seseorang yang "tanpa buku pelajaran". Dan justru

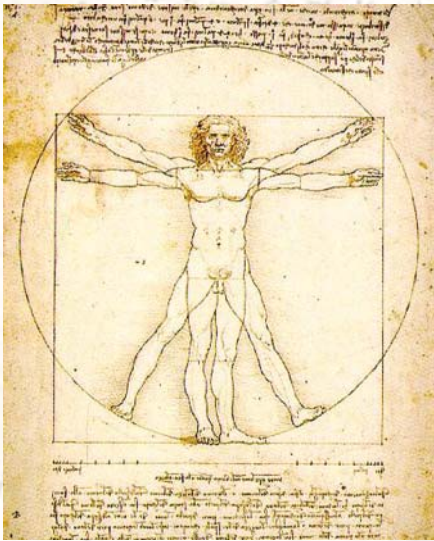


Leonardo da Vinci

karena kurangnya pendidikan yang ia terima, membuat keinginannya menjadi sangat kuat untuk memahami hukum-hukum alam melalui observasi langsung.

Da Vinci juga sering melakukan introspeksi. Hal ini terlihat dari bagian kedua dari pertunjukan ini "The Lesser and Greater Worlds", yang memperlihatkan eksplorasi Da Vinci terhadap gagasan kuno mengenai mikrokosmos dan makrokosmos, yaitu suatu filosofi bahwa tubuh manusia mengandung model miniatur dunia dan alam semesta. Bersama-sama dengan observasinya terhadap alam, filosofi itu membuat Da Vinci menghasilkan loncatan intelektual yang menarik perhatian hingga sekarang ini. Misalnya, Da Vinci menerapkan penelitiannya mengenai sungai dan aliran air ke dalam penelitiannya mengenai bagaimana aliran darah mengalir melalui jantung. Dia menyimpulkan bahwa darah akan mengalir melalui katup dan menghasilkan pusaran, yang kemudian menyebabkan katup itu menjadi tertutup. Pada pertunjukan ini diperlihatkan perbandingan antara proses yang digambar oleh Da Vinci dengan proses yang dibuat melalui teknologi modern, dimana hasilnya membuktikan bahwa teori yang dibuat oleh Da Vinci adalah benar.

Gagasan-gagasan Da Vinci yang pragmatik menyatakan kepeduliannya terhadap



'The Vitruvian Man', penelitian Leonardo tentang bagian-bagian dari tubuh manusia.

manusia yang pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk menghasilkan sesuatu. Da Vinci percaya bahwa dengan mempelajari hukum-hukum alam secara detil dan memahaminya, maka apa yang dipahami itu dapat diciptakan ulang untuk kebaikan umat manusia. Melalui pertunjukan karya-karya Da Vinci di *Victoria and Albert Museum* dapat terlihat kalau inilah yang menjadi "benang merah" dari karya-karyanya, mulai dari karyanya seperti rancangan mesin pesawat terbang dan lukisannya yang sangat terkenal, Mona Lisa.

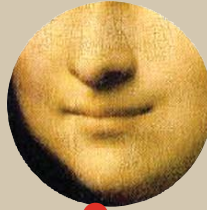
Untuk mengetahui bagaimana caranya manusia dapat terbang, Da Vinci membuat burung buatan. Dia juga membuat sketsa dan mempelajari segala hal mengenai burung untuk mencari tahu bagaimana cara burung menggerakkan sayap dan ekornya. Semuanya itu diperlihatkan dalam ukuran besar dalam pertunjukan ini. Bagian ketiga dan keempat dari pertunjukan ini memfokuskan pada rancangan Da Vinci yang memperlihatkan gagasan-gagasannya yang lebih praktik seperti jam air dan air mancur, dan gambar-gambar arsitektur.

"Seorang pelukis yang hebat harus dapat melukis dua hal mendasar, yaitu manusia dan apa yang dipikirkannya," tulis Da Vinci dalam salah satu tulisannya yang berjudul "Treatise on Painting." "Yang pertama itu mudah dan yang kedua itu sulit".

Pertunjukan karya-karya Da Vinci di *Victoria and Albert Museum* yang berada di London ini hanya menampilkan sebagian dari kejeniusan seorang Leonardo Da Vinci. Karya-karya Da Vinci yang melingkupi berbagai macam aspek mulai dari matematika, botani, hingga seni membuat Leonardo Da Vinci tak akan pernah habis menjadi pusat perhatian manusia sepanjang zaman. ■ DAP, MLP

Rahasia Mona Lisa

Bukan hanya senyumannya saja yang menarik perhatian, tetapi juga mata, dan bahkan suaranya. Itulah Mona Lisa, lukisan karya Leonardo da Vinci yang menyimpan misteri, atau mungkin juga semacam kode rahasia?



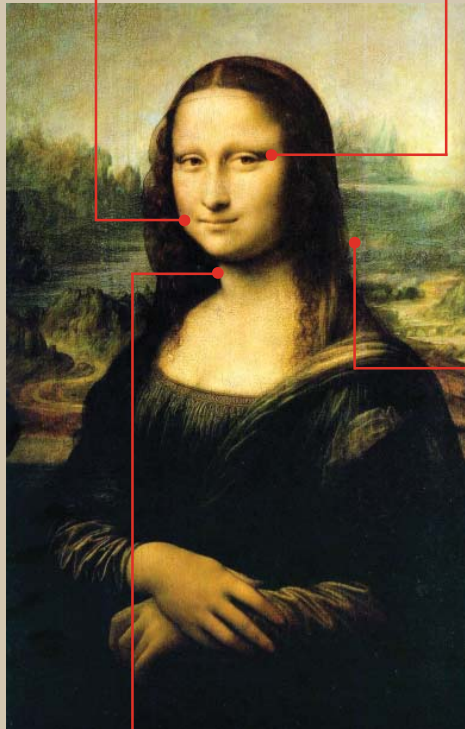
SENYUMAN MONA LISA

Suatu program buatan Belanda yang dapat mengenali emosi menyatakan bahwa senyum Mona Lisa terdiri 83% emosi bahagia, 9% emosi jijik, 6% emosi takut, dan 2% emosi marah.



TATAPAN MATANYA

Seorang peneliti yang berasal dari Italia mengatakan bahwa Leonardo menggunakan teknik mengaburkan yang disebut sfumato, dimana Leonardo menggunakan titik-titik mikroskopik untuk menciptakan bayangan abu-abu pada sekitar mata dan mulut Mona Lisa sehingga membuat tatapan Mona Lisa menjadi sangat misterius.



MONA MIA

Seorang lulusan Harvard yang ahli dalam memecahkan simbol berhasil mengartikan sebuah anagram yang tersebar secara acak dan ditulis dengan tinta yang tidak terlihat di sekitar wajah Mona Lisa. Penemuannya menunjukkan akan adanya semacam perkumpulan rahasia yang bertujuan melindungi ... eh, tunggu dulu, bukankah ini yang kita lihat dalam sebuah film?

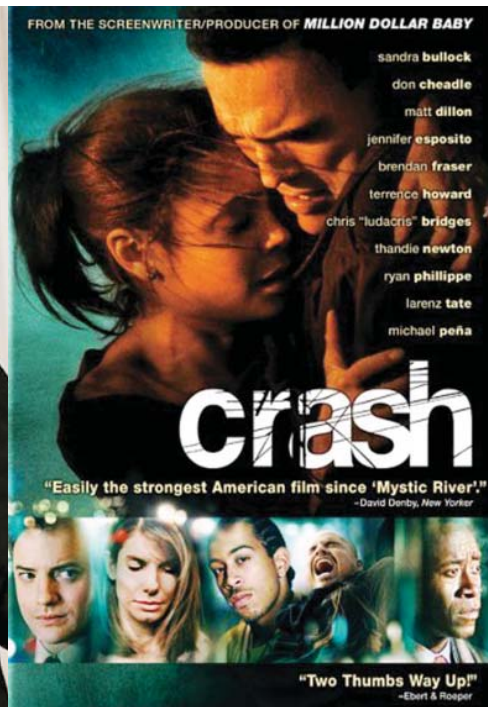


SUARANYA

Ahli forensik yang berasal dari Jepang mengatakan bahwa dengan menganalisa struktur tengkorak dari Mona Lisa maka dapat diketahui seperti apa suara Mona Lisa, yang hasilnya menunjukkan kalau Mona Lisa memiliki suara yang cukup rendah bagi seorang wanita.



Bobby dan Paul Haggis menerima penghargaan Oscar.



Bobby Moresco, penulis film layar lebar Teguh Pada Pilihan Hidupnya

Bobby Moresco besar di New York, di daerah bernama Hell Kitchen, sebuah lingkungan yang dihuni oleh para pekerja keras, di sebelah barat Manhattan. Tidak jauh dari tempat ia tinggal, ada suatu tempat yang menarik perhatian Bobby sewaktu ia masih remaja, tempat itu bernama Broadway. Rupanya cahaya hingar bingar Broadway telah membuat Bobby yang masih remaja ingin menjadi seorang pemain sandiwar. Sayangnya, menjadi seorang pemain sandiwar bukanlah hal yang umum di lingkungan tempat tinggal Bobby. Kebanyakan para penghuni Hell Kitchen bekerja sebagai polisi, pekerja bangunan, buruh, dan penjahat. Tidak ada yang ingin menjadi seorang aktor. Karena itu, Bobby memendam sendiri keinginannya itu. Ia tidak mau teman-temannya tahu dan kemudian akan mengejek dirinya. Ketakutannya terhadap ejekan orang membuat dia tidak memberitahu siapapun ketika ia mengambil pelajaran acting pada usia 17 tahun, termasuk kepada pacarnya.

"Aku bukanlah aktor yang baik, tetapi aku memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dalam hidupku," ucap Bobby. Bobby lalu pindah ke Hollywood dan di sana ia menjadi supir taksi dan bekerja sebagai bartender. "Ayah saya berkata, 'Berhenti melakukan kegilaan ini, dan carilah pekerjaan, kau sudah memiliki istri dan anak.'" Tetapi Bobby tetap melakukan pekerjaan yang menjadi pilihannya.

Lalu pada tahun 1983, adik laki-lakinya terbunuh. Bobby kembali ke lingkungannya yang lama dan mulai menulis sebagai cara untuk menggali rasa sakit dan kondisi kehidupan di Hell Kitchen. Pada tahun 1988, cerita Bobby yang berjudul *Half-Deserted Streets*, ditulis berdasarkan pembunuhan adiknya, dipentaskan di sebuah panggung tidak resmi di Broadway. Seorang produser film Hollywood melihat pementasan itu dan ke-

mudahan meminta Bobby menulis untuk film layar lebar.

Reputasi Bobby sebagai seorang penulis menjadi bertambah baik. Dia pun mendapat tawaran pekerjaan yang membawa dirinya kembali lagi ke Hollywood. Pada tahun 2003, ketika Bobby tidak memiliki pekerjaan dan kehabisan uang, Bobby mendapat telepon dari Paul Haggis, seorang sutradara dan juga temannya. Haggis membutuhkan bantuan untuk menulis sebuah film mengenai kondisi Amerika setelah peristiwa 11 September. Ke dua orang itu kemudian mengerjakan dan menyelesaikan naskah film tersebut, tetapi tidak ada satupun studio film yang mau menerimanya. Pihak eksekutif studio mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang ingin menonton kehidupan sebenarnya, gambaran nyata mengenai bangsa yang diwarnai ketakutan dan kehidupan yang tak serasi di Amerika yang modern.

Bobby merasa yakin sekali akan naskah film tersebut sampai-sampai ia mau menjual rumahnya dan meminjam uang. Bobby dan Haggis terus berusaha memfilmkan naskah film mereka. Sampai akhirnya ada seorang produser film independen yang mau mengambil tawaran tersebut tetapi dengan uang muka yang diberikan sangat kecil sekali, sehingga Bobby rela gajinya ditangguhkan terlebih dulu.

Film *Crash* muncul di teater-teater pada bulan Mei 2005, dan banyak menerima pujian. Pada ajang Academy Awards, film ini mendapat 6 nominasi dan berhasil memenangkan 3 nominasi, yaitu Gambar Terbaik, Penyuntingan Film Terbaik, dan Naskah Terbaik oleh Paul Haggis dan Bobby Moresco.

Pada usia 54 tahun kini Bobby telah menjadi orang yang sukses. "Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kau lakukan dalam hidupmu, jangan pikirkan masalahnya, pikirkan bagaimana cara mencapainya." ■ DAP-MLP

Mer Kata Ak Tid Bis

Kisah dua orang yang ingin menenun mengejar mereka.

Pemberi bagi ind rika yan demy A adakan pada bu yang lalu menyin narik dari orang hasil membawa p diberi nama Oscar Moresco dan Re termasuk di dal yang berhak memi berbentuk manu dengan emas dan but. Bobby Mores car untuk katego dari film yang l sedangkan Rees menerima Oscar Terbaik dalam p June Carter Cash Walk The Line. perjalanan hidup sebut dalam men reka, yang mere tidak mudah nam menyerah.

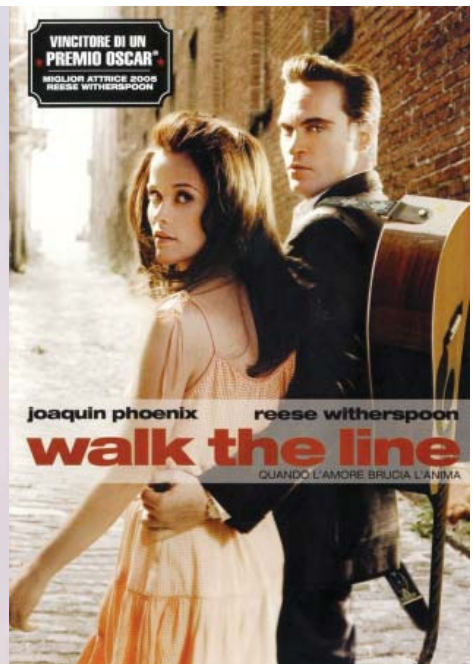
Reese
Witherspoon
tidak
menyerah
impian

g tidak
menyerah
impian

ian penghargaan
dustri film di Ame-
rica bernama Aca-
demy Awards yang di-
adakan Maret 2006
mpan kisah me-
orang yang ber-
pulang piala yang
tersebut. Bobby
Witherspoon
m deretan nama
bawa pulang piala
usia yang dilapisi
n perunggu terse-
sco menerima Os-
car Naskah Terbaik
berjudul *Crash*,
Witherspoon
r sebagai Aktris
perannya sebagai
n di film berjudul
Ini adalah kisah
kedua orang ter-
gejar impian me-
Reese lalu dengan
n mereka tidak



Reese Witherspoon menerima penghargaan Oscar.



Reese Witherspoon, Aktris Tidak Mudah Menyerah

Seorang remaja putri dari Tennessee, Amerika Serikat, berdiri di atas panggung pementasan drama kemping musim panas di New York. Hari itu adalah hari yang indah. Tetapi gadis kecil itu tidak merasa keindahan itu di dalam dirinya. Dia bukanlah tipe gadis Hollywood. Dia tidak memiliki kaki yang panjang, dan penampilan yang mewah. Bahkan sebenarnya, dia menggambarkan diri sebagai seorang yang sederhana.

Sejak berumur 6 tahun, Reese Witherspoon ingin menjadi penyanyi country. Dan Dolly Parton adalah penyanyi country kesukaannya. Tetapi gadis yang berdada rata ini bukanlah Dolly Parton. Walaupun demikian, selama musim panas ini dia berakting, menari, dan menyanyi, dengan seluruh kemampuan terbaiknya.

Setelah tiga tahun mengikuti pelajaran menyanyi, pada akhir masa belajar, guru-gurunya berkata agar dia melupakan usahanya menjadi seorang penyanyi. Guru-gurunya menyarankan agar dia memikirkan karir lain yang sesuai dengan dirinya. Menurut mereka, jika gadis ini memiliki talenta menyanyi tentu talenta itu tersembunyi di balik tubuhnya yang kurus, tidak menarik, dan dalam botol minuman gelas yang ia minum. Gadis itu memasukkan perkataan gurunya tersebut ke dalam hatinya. Lagipula, bukankah dia harus mempercayai kata-kata seorang yang profesional?

Tetapi ketika ia kembali ke rumahnya di Nashville, ibunya - seorang perawat yang optimis, lucu, dan gembira - tidak membiarkan anaknya bersedih hati. Ayahnya, seorang dokter, mendorong dirinya untuk berprestasi di sekolah. Kemudian gadis itu bekerja dengan keras di segala sesuatu yang ia kerjakan dan hasilnya ia diterima bersekolah di Universitas Stanford.

Pada usia 19 tahun, dia mendapat peran di sebuah film

berbiaya rendah berjudul *Freeway*. Dari situ ia kembali bermain film dengan peran yang lebih penting di film berjudul *Pleasantville*. Tetapi film yang membuat dia menjadi terkenal adalah ketika mendapat peran utama di film berjudul *Legally Blonde*.

Dia memutuskan, apabila dia tidak bisa menyanyi dan tidak berpenampilan mewah, dia harus menggunakan kelebihan yang ia miliki. "Jika kamu ingin terjun ke dalam bisnis ini, bukan berarti kamu harus berpenampilan seksi, atau berpenampilan yang bukan dirimu sebenarnya. Lebih baik fokuskan pada apa yang menjadi kelebihanmu dan banggalah akan kelebihanmu itu.

Lalu datanglah suatu penawaran yang membawa dirinya kembali pulang ke kampung halamannya, Nashville. Ia mendapat peran sebagai istri dari penyanyi country Johnny Cash. Sebuah peran dimana ia akan beryanyi, peran yang menjadi impiannya selama ini.

Dengan seketika ketakutan terhadap kegagalan masa lalu datang kembali. Dia sangat gugup ketika berada di tempat pengambilan gambar. Seorang reporter melaporkan bahwa dia selalu membawa kantong muntah di dekatnya, dan akan segera pergi ke belakang panggung dengan tubuh bergetar setelah selesai melakukan adegan menyanyi. Tetapi dia tidak menyerah terhadap dirinya sendiri dan perannya dalam film tersebut.

Dorongan semangat dan humor yang ia peroleh dari orang tuanya membuat dia dapat mengatasi keraguan dirinya. Dia kembali mengikuti pelajaran menyanyi selama enam bulan. Dan kerja keras yang ia lakukan membuat kepercayaan dirinya tumbuh kembali.

Pada bulan Maret 2006 yang lalu, Reese Witherspoon berjalan di atas panggung, Kodak Theatre di Hollywood dan menerima penghargaan Oscar sebagai Aktris Terbaik untuk akting menyanyinya dalam perannya sebagai June Carter Cash di film berjudul *Walk the Line*. ■ DAP-MLP

Psikopat di Sekitar Kita

Hati-hati, siapa tahu seorang psikopat mungkin sedang ada dalam kehidupan anda!

Ada beberapa cerita yang telah ditulis oleh para penulis dan difilmkan oleh para sutradara, yang menceritakan mengenai seorang psikopat, atau seseorang yang tidak memiliki hati nurani. Misalnya, film *Silence of The Lambs* (1991) yang menceritakan tentang seorang pembunuh berantai bernama Buffalo Bill, yang suka menyiksa korban-korbannya. Juga, film *Collateral* (2004) yang dibintangi oleh Tom Cruise, menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang ditugasi untuk membunuh lima orang saksi yang akan bersaksi melawan kelompok perdagangan obat bius. Tokoh-tokoh dalam film-film itu adalah tokoh-tokoh fiksi yang menggambarkan kehidupan sebenarnya dari para penjahat yang pernah ada di muka bumi ini seperti Ted Bundy, seorang pembunuh berantai; Dennis Rader, seorang pembunuh yang selalu mengikat dan menyiksa korbannya terlebih dahulu sebelum dibunuh; dan Ahmad Suradji, seorang dukun asal Indonesia yang mengaku telah memotong-motong 40 wanita. Dr David Robinson, seorang psikiater dan penulis buku *Disordered Personalities* mengatakan, "Ada hal yang menarik sekaligus menakutkan, dari orang-orang tersebut."

Para filsuf Yunani kuno menyebut mereka sebagai "orang yang tidak memiliki pertimbangan moral," dan seorang dokter asal Inggris dari abad 19 menyebut mereka dengan julukan "kegilaan moral" yang menandakan ketidakmampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tanpa disertai tanda-tanda penyakit mental. Namun, tidak semua psikopat adalah seorang pembunuh. Daniel Sylvester dari Ontario, AS, membunuh tetangganya, Alicia Ross karena, menurut pengacaranya, hati nuraninya mengatakan hal tersebut adalah benar. Jadi tidak

semua psikopat adalah seorang pembunuh. "Psikopat dapat ditemukan dimanapun di dalam masyarakat," ujar Robert Hare, seorang profesor psikologi dan penulis buku "Snakes in Suits: When Psychopaths Go To Work."

Apakah pernyataan itu hanya sensasi belaka? Tidak, sama sekali. "Hanya saja, kini kita telah memiliki alat yang dapat mendefinisikan dan mendiagnosa seperti apa seorang psikopat itu, sehingga kita dapat mengenalinya ketika kita bertemu dengan orang seperti itu." Alat yang dimaksud oleh Robert Hare adalah alat yang dikembangkan olehnya yang disebut *Psychopathy Check List Revised (PCL-R)*. Alat ini telah menjadi standar pengukuran tanda-tanda psikopat yang diakui secara internasional. Alat tersebut telah digunakan dalam sistem penegakan keadilan dan juga telah memunculkan minat untuk melakukan penelitian mengenai gejala psikopat. Selain itu, Hare dan rekan sekerjanya, dengan menggunakan suatu alat yang dapat mengetahui gelombang otak menemukan bahwa kata-kata yang bernada negatif seperti kanker, pemerkosaan, atau pembunuhan akan meningkatkan aktivitas otak bagian emosi pada orang-orang yang hati nuraninya berkembang secara normal, tetapi tidak pada seorang psikopat.

Namun, beberapa ketidakpastian melingkupi area psikologi yang satu ini, dan para ahli belum memiliki kesepakatan mengenai apakah ada suatu unit ukur dari gejala psikopat. Martha Stout, seorang profesor dari Universitas Harvard, mengatakan bahwa "hati nurani itu seperti tangan kiri, apakah kamu memilikinya atau tidak memilikinya" sementara Hare mengatakan berdasarkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa apakah seorang itu psikopat atau tidak bukanlah mengenai ada atau tidak adanya hati nu-



rani, melainkan bersifat dimensional: tanda-tanda psikopat dapat muncul dalam berbagai tingkat mulai dari ringan hingga berat. Dan, dia juga menambahkan, apa yang membedakan orang yang "normal" dengan seorang psikopat adalah "kebanyakan orang akan mempertimbangkan kembali tindakannya begitu mereka menyadari kalau tindakan mereka menyakiti perasaan orang lain," sedangkan seorang psikopat tidak peduli, atau bahkan merasa senang atas kesengsaraan yang mereka buat terhadap orang lain.

Serigala Berbulu Domba

Apakah mungkin kita bisa mengetahui siapa saja orang-orang di sekitar kita yang merupakan seorang psikopat? Tidak selalu. Tetapi ada petunjuk yang dapat kita gunakan. Seorang psikopat seringkali dapat meyakinkan orang lain kalau mereka dapat berempati atau menyesal. Namun hanya masalah waktu saja kepura-puraan mereka akan terbongkar. Marianne (bukan nama sebenarnya), menceritakan bagaimana pacar anak perempuannya yang bernama Ted (bukan nama sebenarnya) pada awalnya terlihat sebagai orang yang sensitif bagi kebutuhan orang lain. Anak muda itu akan pergi ke rumah tetangga dan akan berbincang-bincang dengan mereka.

Marianne mulai curiga ketika dia mendapati anak muda itu tanpa tahu malu berbohong mengenai pekerjaannya. Anak muda itu juga meminta kepada anak



perempuannya agar membantunya membayar sejumlah uang yang telah ia pinjam. Rupanya sudah menjadi semacam pola, kalau anak muda itu senang berteman dengan orang lain dengan tujuan agar dapat mendapatkan uang dari mereka. Marianne akhirnya bisa bernafas lega ketika setelah delapan bulan, hubungan pacaran antara anaknya dan pemuda itu berakhir. Orang seperti anak muda itu adalah seorang aktor yang berbakat, sehingga mereka selalu bisa lolos dari perbuatan mereka.

Apakah dengan berbuat seperti itu kita dapat mengatakan kalau anak muda itu adalah seorang psikopat? Apabila cerita yang diberikan oleh Marianne adalah benar, Robinson memperkirakan, hal itu adalah mungkin. "Saya dapat melihat ada suatu eksploitasi yang tidak diikuti dengan perasaan bersalah," katanya menjelaskan. Ia kemudian menambahkan, "Orang seperti itu dapat tampil mempesona, tetapi apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan adalah mengintai mangsa mereka. Cepat atau lambat, biasanya dalam hitungan minggu atau bulan, akan terlihat jelas bahwa apa yang mereka inginkan adalah mengambil keuntungan dari orang lain."

Menurut Martha Stout, tidak hanya laki-laki yang memainkan permainan seperti itu. Perempuan mungkin tidak terlihat secara kasat mata karena mereka cenderung tidak melakukan tindakan kasar seperti laki-laki," jelasnya. "Apabila



kita memiliki diagnosis yang baik, maka saya memprediksi tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan."

Untuk mengelabui korbannya agar tidak sadar kalau mereka sedang dieksploitasi, seorang psikopat menggunakan daya tarik dirinya dan melibatkan dirinya dalam kehidupan mangsanya secara berlebih. Philip Montecor (bukan nama sebenarnya), seorang pengusaha, yakin bahwa istrinya adalah seorang psikopat. Dia ingat bagaimana pada awalnya istrinya sangat baik sekali. Ketika mereka baru pertama kali berpacaran, istrinya memberikan sebuah hadiah berupa keranjang buatan tangan. Istrinya juga awalnya sangat baik kepada anak-anak mereka. Namun segala sesuatu mulai berubah. Istrinya berhenti dari pekerjaannya dan menonton TV sepanjang hari. "Apabila dia tidak suka dengan keberadaan kami di dalam rumah, maka dia akan mengunci kami di luar rumah," ucap Montecor.

Selama perkawinan mereka dilanda masalah, Montecor tidak menyadari kalau istrinya memiliki emosi yang tidak sehat. "Ketika teman baiknya meninggal dunia, dia tidak menangis sama sekali," seingatnya. Sifat buruk istrinya benar-benar tampak ketika proses perceraian sedang berjalan, dia meninggalkan Montecor dalam keadaan bangkrut.

Dalam pandangan Robinson, kasus ini tidak jelas. "Pada umumnya seorang psikopat yang sangat parah tidak dapat bertahan di dalam suatu pernikahan sampai 13 tahun," catatnya. "Dia mungkin seorang psikopat, tetapi mungkin juga dia hanya tamak dan malas daripada seorang yang suka memanipulasi orang lain secara kasar."

Penyebab dan Pengobatan

Sudah jelas, untuk menentukan mana

orang yang psikopat dan tidak bukanlah suatu ilmu pasti. Bahkan tidak jelas darimana hati nurani itu berasal. Salah satu teori mengatakan bahwa orangtua menanamkan rasa empati dan kewajiban di dalam diri anak mereka. "Pada waktunya nanti," kata Robinson, "Anak-anak akan memiliki perasaan seperti itu bahkan ketika orang tuanya tidak ada di sekelilingnya. Anak-anak itu mungkin terdorong untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi hati nurani mereka mencegah mereka berbuat seperti itu.

"Faktor genetik sangat berpengaruh sekali. Empat penelitian telah menunjukkan adanya hubungan antara genetik dan kepribadian psikopat," ujar Adele Forth, seorang profesor psikologi dari Universitas Carleton di Kanada, yang ahli dalam melakukan pengukuran dan penelitian mengenai kepribadian psikopat. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap yang tidak berperasaan setidaknya diwariskan sebagian. Forth kembali melanjutkan bahwa gaya pengasuhan yang diberikan orang tua bukanlah penyebab dari sikap yang tidak berperasaan yang dimiliki si anak.

Menurut Robinson, tanda-tanda seperti tidak merasa cemas, pengendalian impuls yang lemah, dan kecenderungan mencari hal-hal berbahaya dapat meningkatkan kemungkinan seseorang akan menjadi psikopat di masa depan. Apakah ada tanda-tanda dari masa kecil lainnya? Membuat kebakaran, mengencingi pakaian orang lain dengan sengaja, memaksa orang lain membersihkan kotoran, dan kekejaman terhadap binatang, bisa menjadi tanda.

"Saya tidak sedang berbicara tentang anak yang bereksperimen satu dua kali dengan mencabut sayap belalang," ucapnya. "Saya berbicara tentang anak yang menaruh kucing di dalam mesin cuci dan menontonnya berputar-putar dengan mata yang dingin." Para ahli sepakat bahwa orang yang tidak memiliki hati nurani cenderung untuk tidak berubah. "Tetapi," ucap Hare, "Anda mungkin bisa mengubah perilaku orang tersebut dengan menunjukkan kepada mereka bagaimana kondisi yang mereka alami itu dapat bekerja untuk kebaikan mereka."

Dalam hal ini, kita belum bisa memprediksi apakah ilmu pengetahuan suatu hari nanti dapat mengembangkan sebuah penangkal bagi keadaan psikopat karena kita masih terlalu sedikit mengetahui mengenai gejala psikopat. Adele Forth berspekulasi, "Mungkin suatu saat nanti kita akan mengetahui lebih banyak mengenai cara kerja saraf dan cairan tubuh dari gejala psikopat, sehingga kita akan mampu membuat obat untuk menangani keadaan psikopat. Tetapi untuk saat ini, obat seperti itu belum ada." ■ **DAP, MLP**



foto: berindo sl pohan

Irigasi: Warga desa Long Pari menunggu lahan sawah.

Petani Tanpa Sawah

Alam Kabupaten Bulungan yang memiliki sumber daya alam yang dominan untuk pertanian belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain minimnya SDM yang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, perhatian pemerintah pun masih setengah-setengah.

Matahari belum beranjak ke peraduan, saat *speedboat* yang membawa Wartawan Berita Indonesia tiba di Long Pari. Sebuah desa di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, yang akhir-akhir ini didengung-dengungkan, mampu berswasembada pangan beras.

Keberhasilan masyarakat di desa yang terletak di pinggir Sungai Kayan ini, seperti diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Drs. Med Vet Indrawanto, tidak terlepas dari bimbingan dan penyuluhan yang telah dilakukan lewat 'Sekolah Lapangan'. "Mereka dilatih dan diajari untuk menggunakan semua fasilitas pertanian, mulai dari menggunakan dan merawat traktor tangan, mengolah tanah, pemupukan, sampai penanganan hama," katanya.

Hasilnya? Sudah tentu, jawabnya - meningkat. "Sebab, jika sebelumnya, petani hanya memperoleh gabah 2 (dua) ton per hektar (Ha), sekarang naik menjadi 4 (empat) ton, atau berhasil seratus persen. Kami

(Dinas Pertanian Bulungan, Red) saat ini sedang melakukan hal yang sama (sekolah lapangan, Red) di Desa Mara, Kecamatan Tanjung Palas Barat dan Desa Tana Merah, di Kecamatan Tanah Lia," kata Med Vet Indrawanto.

Bagaimana komentar penduduk Desa Long Pari? Beberapa petani yang ditemui media ini di lahan persawahan, yang lebih tepat disebut ladang kering, nampak kebingungan. Karena mereka sendiri, baru tahun ini menanam padi di tanah datar yang disebut sebagai areal persawahan tanpa air, dan jenis padi yang ditanam pun menggunakan padi gunung atau yang bisa dipanen hanya sekali dalam setahun. "Bagaimana bisa dikatakan hasilnya meningkat, rumputnya saja lebih cepat tumbuh dari padi," kata beberapa penduduk desa di tengah lahan.

Menurut seorang warga yang enggan ditulis namanya, beberapa penduduk termasuk dirinya, memang pernah mengikuti sekolah lapangan yang diadakan Dinas Pertanian Bulungan di desa Long Pari. "Jika tidak salah ingat, itu dilaksa-

nakan selama tiga bulan, dari September sampai Desember 2005 lalu. Setiap Sabtu siang, petugas dari Dinas Pertanian Bulungan datang ke sini. Itu, lahan tempat kami praktek," kata seorang petani sambil menunjuk lahan 50 x 20 meter yang kelihatan persis seperti lapangan bola.

Dikatakan, boleh jadi, panen dari lahan percontohan inilah yang kemudian menjadi bahan laporan Dinas Pertanian Bulungan bahwa hasil panen persawahan para petani di Desa Long Pari berhasil. Padahal, seperti diceritakan penduduk kepada Berita Indonesia, tidak ada peningkatan panen yang berarti. Memang benar, Dinas Pertanian Bulungan memberi penyuluhan. Tapi, seperti disampaikan penduduk, apakah dengan cara itu, bisa dijamin bahwa masyarakat sudah mampu menyerap pelajaran yang diberikan? Begitu pula dengan hasil panen, apakah hanya dengan *sample* lahan seluas 50 x 20 meter bisa diketahui bahwa hasil pertanian masyarakat meningkat menjadi 7,2 ton gabah kering per Ha. "Setelah padi yang ditanam di lahan 50 x 20 meter itu bisa dipanen, padi dipotong dari lahan 4 x 4 meter, hasilnya itulah yang kemudian dijadikan patokan bahwa hasil pertanian masyarakat meningkat menjadi 7,2 ton gabah per Ha," kata penduduk.

Menurut masyarakat desa yang dihuni suku Dayak Kenyah, sampai sejauh ini masyarakat belum pernah mengajukan protes. Sebab menurut mereka, apapun yang dikatakan oleh pemerintah, seperti masyarakat sudah bisa berswasembada beras, panen sawah melimpah ruah, tidak menjadi soal, karena yang dibutuhkan masyarakat sekarang, Pemerintah lancar mendistribusikan "beras miskin". Sementara untuk lahan persawahan yang hingga saat ini belum terealisasi, begitu pula dengan irigasi yang ada, sudah banyak yang sudah rusak, masyarakat berharap agar Bupati Bulungan, Drs H Budiman Arifin, MSI dan wakilnya, Drs Liet Ingai, MSI menepati janjinya.

Soal Dinas Pertanian Bulu-

ngan yang mengatakan, bahwa panen padi petani meningkat, tidak akan dipermasalahan masyarakat, sebab yang menilai kinerja mereka, masih ada Bupati dan DPRD. "Tidak baik menyalahkan orang, kami sendiri pun hingga saat ini masih tetap menanam padi secara tradisional, yang oleh orang kota juluki "ladang berpindah-pindah," kata salah seorang warga. Itulah mengapa Harian Sinar Pagi *Baru* pada Edisi No 364/September lalu menulis, "Dimana ada "panen raya" sebagai hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah?" Menurut koran terbitan Jakarta ini, panen raya yang ditunjukkan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan kepada Bupati Bulungan dalam kunjungan kerjanya, adalah hasil kerja petani tradisional.

Rupanya, proyek-proyek yang berkaitan dengan pertanian di Kabupaten Bulungan tidak hanya membuat masyarakat petani risih, bahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten induk yang berada di Wilayah Utara, Kaltim ini menyoroti kinerja para pejabat di Kabupaten Bulungan. "Bupati jangan cuma dengar laporan dari anak buah, perlu turun ke lapangan," kata Drs Henock Merang dan E. Daud Larung, keduanya anggota DPRD Bulungan di Tanjungselor kepada SL Pohan dari Berita Indonesia.

Menurut kedua anggota DPRD dari Komisi III yang membidangi pembangunan ini, Dewan akan melakukan pemanggilan berkaitan dengan pertanian, mulai dari pencetakan sawah, pembelian traktor tangan, dan pembangunan irigasi. "PU Provinsi Kaltim sendiri, sudah sejak tahun 2003 lalu membangun irigasi pengairan di 11 (sebelas) lokasi, lengkap dengan mesin pompa airnya yang mampu mengairi 2.000 Ha lahan persawahan. Apa masalahnya sehingga sampai sekarang pencetakan sawah belum dilakukan. Kenapa irigasi belum dapat dimanfaatkan para petani, kita perlu kejelasan. Bila perlu, kita minta supaya masalah ini dilakukan pengu-

sutan," tegasnya. ■ SLP

Menelikung Pengedar Narkoba

Berkat kerja keras dan bantuan masyarakat, polisi berhasil meringkus agen obat-obat terlarang berikut kurir penerimanya. Sebuah prestasi, tentunya.

Wanita paruh baya itu, sebenarnya sudah lama diintai polisi dengan ketat. Maklum, perempuan berusia 47 tahun bernama Fatimah binti Abdullah ini, sudah pernah menghuni LP (Lembaga Pemasyarakatan) Tarakan selama sembilan bulan. Pada tahun 2000 lalu, karena tersangkut tindak pidana penjualan obat-obat terlarang, yang kemudian ditenagai masih terus melakukan kegiatannya memasok barang haram tersebut kepada kurirnya di Kota Tarakan dan Malinau, Kabupaten Malinau.

Itu sebabnya, begitu polisi mendapat sinyal dari masyarakat, pengintaian ekstra sabar dan hati-hati dilakukan, sampai janda beranak empat ini benar-benar berada di rumahnya di kawasan Selumit Pantai RT 2 No. 58 Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan Kalimantan Timur. Tim Buser (Buru Sergap) bersama petugas Badan Narkotika Polresta Tarakan lantas menyerbu masuk. Tanpa kesulitan, Fatimah dan dua tersangka lainnya, Edi bin Jafar (29) yang tinggal serumah, serta Aisyah bt Usman (48) yang tinggal hanya bersebelahan rumah dengan Fatimah, yang disangka sebagai kurir - diringkus berikut 18.000 butir "LL" (double "L") sebagai barang bukti, sementara 2.000 butir LL sudah sempat diedarkan. "Dari hasil pengembangan, petugas kemudian berhasil menemuk Al-fonsus alias Aco (29) tersangka lain, di rumahnya di Jl Mulawarman RT 16 Karang Anyar Pantai, Tarakan Barat," kata

AKBP Drs Haryanto, Kapolresta Tarakan.

Menurut Haryanto, didampingi Ajun Komisaris Polisi Nurkotip, Kasat Narkoba Polresta Tarakan, mereka tidak mendapat kesulitan saat melakukan penangkapan. Informasi yang masuk dari Bulungan, wanita yang sudah bolak-balik membawa obat terlarang ini sudah tiba di Tanjungseler dari Samarinda dan langsung berangkat dengan taxi air menuju Tarakan. Setelah Fatimah sampai di rumahnya, pengawasan dilakukan secara ketat dan melahat. "Soalnya, di bulan suci Ramadhan ini kami tidak mau penangkapan itu sampai mengganggu masyarakat di sekitarnya yang sedang menjalankan ibadah puasa," katanya kepada Berita Indonesia, Kamis dua pekan lalu.

Sampai minggu lalu, keempat tersangka masih diperiksa polisi. Seperti kasus yang sudah-sudah, tersangka Fatimah mengaku hanya sebagai kurir belaka dan melakukannya karena terpaksa untuk menghidupi keluarga. Tetapi, yang membuat bulu kuduk merinding adalah; perempuan yang pernah menghuni *hotel Prodeo* selama 9 bulan, dan makan-minumnya dijamin negara, dalam tahun ini saja sudah tujuh kali bolak-balik Samarinda-Tarakan membawa narkoba jenis LL. Fatimah mengaku, ia membawa 15.000 sampai 20.000 butir dengan harga beli Rp 300 ribu per seribu butir. Ini pun baru sekali bawa dari Samarinda. "Saya bisa jual Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu untuk setiap se-



foto: berindo sl pohan

AKBP Drs Haryanto: Sebuah prestasi Polresta Tarakan tahun ini.

ribu butir," aku Fatimah kepada polisi yang memeriksanya.

Agaknya, Kalimantan Timur Wilayah Utara menjadi sasaran empuk peredaran narkoba jenis LL bagi para 'pebisnis' yang diancam hukuman penjara selama lima tahun ini. Soalnya, seperti diungkapkan AKBP Drs Haryanto, peredarannya sudah sampai ke pelosok. Padahal, katanya lagi, pihaknya tidak henti-hentinya melakukan penyuluhan lewat Badan Narkotika Daerah (BND). "Upaya yang dilakukan, seperti penyuluhan lewat Bina Mitra di sekolah-sekolah, paguyuban, dan LSM serta melakukan razia secara rutin dan terpadu di tempat-tempat hiburan," ujarnya.

Kok peredarannya masih marak? Haryanto, menolak jika dikatakan marak karena upaya yang dilakukan sudah maksimal. Kapolresta Tarakan ini melihat peredaran narkoba jenis LL tidak saja di

kalangan orang dewasa, tetapi juga di kalangan remaja sampai pada usia anak sekolah. "Ini, sangat mencemaskan. Orangtua harus mengawasi anak-anaknya," katanya. Harga narkoba jenis LL ini sangat murah, hanya Rp 1.000,- per butir. Dengan menelan dua butir saja, pengguna sudah memperoleh rasa nikmat. Kemudian, mudah dikonsumsi tanpa menggunakan alat bantu, dan orang yang memakan atau mengkonsumsinya pun tidak mencurigakan.

Itu sebabnya, bagi Kapolresta Tarakan sendiri, penangkapan Fatimah bersama ketiga kurir dan barang bukti yang cukup banyak merupakan suatu prestasi untuk tahun ini. Pihak kepolisian Tarakan sudah mengantongi nama dan alamat bandarnya di Samarinda. Menurutnya, keberhasilan ini tentu tidak bisa terlepas dari dukungan masyarakat yang memberi informasi. ■ SLP

BE 200 Mulai Beraksi



Pesawat BE 200 asal Rusia saat mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumsel.

foto: repro indopos

Pesawat canggih asal Rusia itu mulai beraksi. Menumpahkan puluhan ton air di sejumlah titik api. Aburizal mengusulkan untuk membeli.

Kabut asap masih menyelimuti udara di atas perairan Selat Bangka Rabu (1/11) siang lalu. Namun tanpa ragu pesawat canggih BE 200 dari Rusia itu menukik tajam dan meluncur di permukaan air. Sambil meluncur, pesawat menyedot air laut sekitar 10 – 12 ton. Tak sampai 20 detik, pesawat itu kemudian terbang dengan kecepatan 150 km per jam ke Ogan Komering Ilir (OKI). Menumpahkan air dari dalam perutnya di atas lahan gambut yang terbakar, antara lain di Tulung Selapan, Cengal dan Air Sugihan.

Tim pemadam kebakaran dari Rusia yang mengoperasikan pesawat jenis *amphibi fix wing* BE 200 itu dipimpin Komandan Kepala Zakirov Rafaili. Kedua pesawat pemadam api yang disewa dari Rusia hari itu masing-masing melakukan delapan dan sembilan kali penyedotan dan menaburkannya di kawasan lahan yang terbakar.

Pemerintah memutuskan menyewa kedua pesawat canggih tersebut karena "kewalahan" memadamkan titik api yang membakar hutan dan la-

han di Sumatera dan Kalimantan. Terlebih setelah pemerintah Singapura dan Malaysia melayangkan protes karena terganggu dengan kiriman asap dari Indonesia. Presiden SBY pun sempat meminta maaf kepada PM Singapura atas merembahnya asap dari Indonesia ke negeri pulau itu. Untuk keperluan itu pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 100 miliar. Menggunakan sisa dana bencana yang masih ada.

Pesawat itu disewa selama 1,5 bulan seharga 5,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 47 miliar. Selain untuk memadamkan titik api di Sumsel selama 10 hari, kedua pesawat itu juga akan melakukan tugas yang sama di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan, selain kedua pesawat itu dikerahkan pula dua helikopter MI-8 masing-masing berkapasitas 800 liter dari Malaysia dan Hongkong.

Gubernur Kalimantan Tengah A Teras Narang berharap pesawat asal Rusia itu sudah dapat digunakan pekan ini juga untuk mengatasi kebakaran hutan di daerahnya. "Karena saat ini kebakaran lahan atau hutan sudah membuat kabut

asap tebal dan mengganggu transportasi udara, darat dan sungai. Juga mengganggu kesehatan masyarakat," keluhnya seperti diberitakan *Media Indonesia* (1/11).

Asisten Pemadam Kebakaran dari Kedubes Rusia di Jakarta, Alexey Sapozherkav menjelaskan, pesawat yang mampu mendarat di daratan dan perairan ini sering digunakan untuk memadamkan kebakaran hutan di negaranya. Selain itu juga pernah memadamkan kebakaran hutan di Yunani, Portugal dan Italia. Sedangkan Indonesia merupakan yang pertama kalinya di kawasan Asia.

Gangguan kabut asap terjadi setiap tahun di Sumatera dan Kalimantan sejak tahun 1997. Pada saat giat-giatnya dilakukan pembukaan hutan untuk hutan tanaman industri dan perkebunan. Di Sumsel tahun ini kebakaran hutan dan lahan cukup marak. Selama bulan Agustus tercatat 2.112 titik api. Meningkat menjadi 6.235 titik di bulan September dan 6.976 pada Oktober lalu.

Untuk memadamkan api yang menimbulkan kabut asap di Sumsel, selain menyewa dua pesawat BE 200, pemerintah mengerahkan enam pesawat B-105 berkapasitas 400 – 750 liter, sebuah pesawat Hughes 500 berkapasitas 400 liter dan satu helikopter Puma untuk

memonitor titik api. Juga dikerahkan dua kapal cepat (*speedboat*) dan dua kapal patroli keamanan laut, tim Manggala Agni, dibantu tiga satuan setingkat kompi (SSK) dari Kodam II Sriwijaya dan dua SSK Polda Sumsel.

Ingin beli pesawat

Menko Kesra Aburizal Bakrie yang menyaksikan efektivitas pesawat itu memadamkan api berniat mengusulkan untuk membelinya. "Di masa mendatang kami akan mengusulkan pembelian ini ke DPR. Harga satu pesawat sekitar 40 juta dolar AS atau sekitar Rp 400 miliar," ujar Tcal di Palembang.

Sayangnya, pemadaman api ini justru baru dilakukan di akhir musim kemarau. Seperti diberitakan *Kompas* (2/11), kota Palembang sejak Selasa (31/10) diguyur hujan deras disertai guntur dan petir. Rabu siang juga turun hujan lebat.

Peneliti dari *Wetlands Internasional Indonesia Programme (WIIP)*, Irwansyah Reza Lubis menyatakan, pemerintah seharusnya lebih berkonsentrasi mencegah kebakaran di lahan gambut sejak jauh-jauh hari. Dia pun menyarankan agar tata guna lahan harus ditinjau. Karena banyak hutan gambut selama ini justru dikonservasi untuk areal budi daya hutan industri dan perkebunan atau permukiman rakyat. ■ SP



foto: berindo sl pohan

Jalan. Pembuatan jalan secara semena-mena akan menimbulkan erosi dan tanah longsor serta merusak ekosistem hutan.

Hutan Dibabat, Malinau Kiamat

Penelitian di Malinau menunjukkan, penebangan kayu, perkebunan, pembangunan jalan dan tambang dapat dengan mudah mengakibatkan erosi dan tanah longsor. Nah, ini sebuah peringatan.

Pemerintah Pusat atau tepatnya Menteri Kehutanan, dan Menteri Pertambangan, tentunya harus rela meninjau ulang dan membatalkan seluruh ijin dan kebijakan yang diberikan terhadap perusahaan-perusahaan yang akan melakukan pembalakan kayu, perkebunan kelapa sawit dan penambangan batubara di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Sebab jika tidak, kawasan yang dijadikan wilayah konservasi ini akan menandai kehancuran.

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Sebuah lembaga internasional, *Center for International Forestry Research (CIFOR)* membuktikan lewat hasil penelitian selama bertahun-tahun di Kabupaten Malinau. Dalam laporannya setelah mempelajari tanah dan kesesuaian lahan misalnya, Lembaga Internasional Penyelidikan Hutan yang berkantor di Jl Situ Gede, Sindang Barang, Bogor, Jawa Barat, ini menunjukkan, hanya sedikit daerah yang sesuai untuk dijadikan lahan pertanian.

CIFOR membuat 200 petak

penelitian tersebar di tujuh kampung di hulu Malinau dan mengambil contoh tanah. Selanjutnya, contoh tanah itu diperiksa di laboratorium di Bogor. Hasilnya menunjukkan bahwa tanah di Kabupaten Malinau memiliki keterbatasan, seperti tanah kurang subur, bersifat asam, curam, lapisan tanah tipis, mudah terkikis, berbatu, kandungan A13+ tinggi sehingga bersifat racun.

Hasil pemeriksaan itu menunjukkan, kandungan tanah untuk dijadikan tempat menanam tanaman kelapa sawit, lada, kakao, kopi, kemiri, karet, kacang tanah, tidak ada yang sesuai. Lahan di Kabupaten Malinau hanya cocok dikembangkan melalui usaha di sektor kehutanan yang berkelanjutan. Lereng tanah di Malinau sangat terjal. Penebangan kayu, perkebunan, pembangunan jalan dan tambang dapat dengan mudah mengakibatkan erosi dan tanah longsor.

"CIFOR hanya sebatas memberi masukan. Keputusan ada di tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malinau," papar

Kresno Dwi Santoso peneliti CIFOR di kantornya, Jl Pandita Teluk Sanggan, Malinau kepada SL Pohan dari Berita Indonesia, Rabu, dua pekan lalu.

Kresno Dwi Santoso menolak jika pihaknya dikatakan berseberangan dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Kehutanan, yang telah memberi ijin kepada beberapa perusahaan kayu di Malinau. "CIFOR hanya melakukan penelitian bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Malinau. Dan, yang menyatakan tidak boleh itu bukan kami, tapi hasil penelitian," ungkapnya seraya menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa strata dua (S2) Universitas Mulawarman Samarinda yang berakhir bulan lalu.

Oleh karena itu, dengan adanya hasil penelitian ini, Pemda Malinau bersama seluruh masyarakat, diharapkan bisa menyadari, bahwa Kabupaten Malinau tidak sama dengan daerah lain yang memiliki berbagai sumber daya alam. Malinau hanya memiliki daya saing hutan yang dijadikan sebagai hutan konservasi internasional. Hutan di Malinau harus dijaga dan dilestarikan. "Jika hutannya diganggu, Kabupaten Malinau bisa kiamat," kata Kresno Dwi Santoso dengan nada sedikit meninggi.

Suhud (46) penduduk Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Malinau, mendukung hasil penelitian CIFOR. "Pengalaman menunjukkan, *fee* IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu, red) yang diberikan perusahaan kayu kepada masyarakat sama sekali tidak berguna. Biar jumlahnya segudang, manfaatnya tidak kelihatan. Sedang jika hutan lestari, kami bisa menikmati hasilnya sampai anak cucu.

Jadi, hutan dengan segala isinya lebih penting dan berarti bagi kami," katanya. Itu pula sebabnya, pengumpul hasil hutan gaharu dan rotan ini begitu geram melihat kegiatan perusahaan kayu PT Inhutani II yang beroperasi di daerah Sungai Tubu dan PT Angels di Mentarang. "Saya tidak tahu apakah kedua perusahaan ini sudah memiliki ijin tebang atau tidak. Katanya, membuat koridor (jalan) tetapi kayu yang diambil di atas dua kilometer dari pinggir jalan," katanya.

Maraknya pembalakan kayu di daerah hulu Malinau, kata beberapa penduduk Desa Pulau Sapi yang menemani Suhud ketika diwawancarai media ini sudah pernah dilaporkan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi, seperti dikeluhkan warga desa yang diapit dua Sungai Malinau dan Sungai Mentarang ini, jawaban dari Bapak Mertua Annisa Pohan ini hanya ucapan "Terima kasih." Lha, kok tau? "Soalnya, kami melaporkan lewat SMS (*Short Message Service*) yang kemudian dijawab dengan sms dari Bapak Presiden," kata Suhud.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau, Ir. Gerard A Silooy, MSc yang dihubungi, tidak berkenan memberi keterangan. "Saya lagi sibuk. Saya sudah ditunggu di ruang rapat, bagaimana kalau besok pagi. Saya jamin, besok pagi kita bisa ketemu. Salah-salah kalau saya diminta penjelasan sekarang," katanya berjanji. Namun besoknya, dari pagi hingga siang media ini *nyang-gong* di depan pintu kerjanya, lelaki bertubuh besar berkulit gelap ini tidak pernah nongol di kantornya. Sementara pegawainya tak seorang pun yang mau buka mulut. Ada apa ya? ■ SLP



foto: berindo sl pohan

Sembunyi. Para pekerja sembunyi masuk hutan ketika media ini berusaha mengambil foto kegiatan mereka.

LINTAS MEDIA DAERAH



Pemko Diminta Serius Tanggapi Peringatan BMG

DPRD Medan meminta Pemko menanggapi serius peringatan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). Berbagai upaya untuk menghindari terjadinya korban jiwa masyarakat harus dilakukan. Ketua Komisi B DPRD Medan Drs H. Adi Munasip, MM, menilai positif peringatan yang dikeluarkan BMG Sumut tentang kemungkinan terjadinya banjir kiriman sehubungan masuknya musim hujan saat ini.

Disebutkan Adi, mengatasi banjir kiriman sangat tidak mungkin dilakukan. Air sungai yang meluap sewaktu-waktu oleh hujan yang terjadi di daerah pegunungan pasti akan mengejangi rumah warga yang berada di daerah aliran sungai (DAS). Hal yang bisa dilakukan, menurutnya, adalah bagaimana mengupayakan agar korban jiwa tidak terjadi akibat banjir itu.

Untuk mengantisipasi hal itu kata Adi, Pemko Medan harus membuat antisipasi yang diprioritaskan dalam bentuk-bentuk persiapan banjir yang disiagakan di daerah-daerah rawan banjir. Misalnya persiapan Posko baik untuk dapur umum, dan Posko medis.

Kabag Humas Pemko Medan Drs H. Arlan Nasution, MAP, yang ditemui terpisah mengaku telah melakukan antisipasi. Itu dilakukan Pemko Medan sejak pihaknya membaca surat kabar tentang prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMG Sumut bulan lalu.

Katanya, Walikota Medan Drs H. Abdillah, Ak. MBA, telah mengeluarkan instruksi kepada camat, lurah dan kepala lingkungan yang berada di daerah rawan banjir untuk tetap waspada dan selalu mengingatkan masyarakat akan kemungkinan terjadinya banjir kiriman. Demikian tulis *Waspada* Kamis (2/11). ■ SB



Krisis Air Bersih Meluas

Beberapa daerah di Jawa Barat mengalami krisis air bersih. Di Garut, bahkan nyaris terjadi baku hantam karena rebutan air minum. Krisis air di Kabupaten Indramayu, Kuningan, dan Sukabumi, kemarin tambah parah. Warga makin didera kesulitan untuk memperoleh air. Sementara itu, kemampuan PDAM melayani kebutuhan masyarakat terus merosot. Debit air yang masuk ke sejumlah fasilitas PDAM juga kian menyusut.

Sedikitnya, terdapat lebih dari 100 desa di Kabupaten Indramayu mengalami kesulitan air bersih. Tak hanya di desa-desa terpencil, warga di perkotaan Indramayu juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sampai Kamis (2/11) lalu, air tidak bisa lagi *ngocor* secara normal ke keran-keran warga pelanggan PDAM.

Di Kuningan, juga terjadi hal serupa. Perubahan fungsi lingkungan sekitar sumber air dan kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan stok air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kuningan berkurang secara drastis. Akibatnya, pasokan air untuk konsumen, khususnya di wilayah perkotaan dan sekitarnya, terancam.

Akibat krisis air di PDAM Kuningan, lokasi yang bakal terancam tidak mendapatkan air bersih antara lain cabang Kuningan untuk wilayah utara dan barat, Pramuka, Pasapen III, dan Siliwangi Utara. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan tersebut PDAM memanfaatkan sumber air dari daerah Cigugur.

PDAM Kab. Sukabumi akan membuat bendungan di Sungai Citepus serta mengambil sumber mata air di daerah Kalapanunggal, Kec. Kandangan guna mengantisipasi krisis air bersih di Palabuhanratu. Krisis air tersebut salah satunya diakibatkan terbatasnya pasokan air ledeng PDAM, terutama di musim kemarau yang berkepanjangan sekarang ini. Demikian tulis *Pikiran Rakyat*, terbitan Jumat (03/11). ■ SB



AIR PDAM Dicuri

Maraknya pencurian air bersih di PDAM Surabaya mengundang perhatian khusus Direktur Lembaga Pengawas Perusahaan Daerah (LP2D) Jatim, Fatkhul Hadi. Apalagi, pencurian itu diduga ada sindikat orang dalam PDAM. Fakhul malah meminta agar pembobol air diumumkan seperti selebritis di televisi.

Dugaan orang dalam PDAM terlibat semakin kuat, sebab beberapa pelaku mengerti seluk beluk kinerja PDAM Surabaya

"Kalau ada warga yang mengetahui pencurian, segera laporkan. Kami akan memberikan hadiah Rp 200.000 setiap laporan. Identitas pelapor akan kami rahasiakan," tegas Anshari Siregar, Direktur Distribusi PDAM Surabaya, Kamis (2/11).

Diakuinya, ada beberapa karyawan PDAM yang terlibat dan sudah ditangani Polresta Selatan. Selain itu, ada juga anak mantan pejabat PDAM yang terlibat pencurian air ini. Mereka beralih sebagai karyawan PDAM dan mendatangi pelanggan untuk menawarkan penghematan air. Caranya, memperlambat pencatat meteran. Bahkan, mereka juga menawarkan jasa membobol air dengan cara aman.

"Kami akan pangkas dan cari siap saja karyawan PDAM yang terlibat. Orang dalam harus dibersihkan agar pelanggan juga bersikap bersih terhadap PDAM," tegas Anshari.

Kecurigaan terhadap orang dalam ini semakin kuat, saat diketahui informasi keluhan pelanggan selalu bocor. Dari informasi keluhan pelanggan ini, petugas gadungan mendatangi pelanggan dan menawarkan jasanya. "Pasti ada agen informasinya, ini harus dicari sampai ketemu," kata Anshari. Demikian tulis *Koran Surya* terbitan Surabaya Kamis (2/11). ■ SB

Syarat Untuk Tommy

Tommy Soeharto bebas bersyarat. Ia langsung menggugat Bank Mandiri.

Dengan senyum khasnya yang mirip dengan senyum ayahnya, Tommy Soeharto melangkah keluar dari Lapas Cipinang, Senin, (30/10). Akhirnya ia menghirup udara bebas setelah resmi menjalani pembebasan bersyarat. Sebelumnya, ia harus meringkuk dalam penjara sejak 28 November 2001.

Beberapa media massa menjadikan berita pembebasan bersyaratnya sebagai headline. Koran Tempo, 31 Oktober 2006, memuat headline berjudul "Bebas." *Indo Pos*, di hari yang sama, memuat laporannya berjudul "Ingin berse-nang-senang dan umrah dulu." Menurut *Indo Pos*, Tommy sekarang menjadi klien Balai Pemasarakatan (Bapas) Jakarta Pusat. Statusnya tetap narapidana, tapi bukan warga binaan lagi. Ia menjadi tanggung jawab Bapas sampai bebas murni Juli 2009.

Setelah menandatangani berita acara, putra bungsu mantan Presiden Soeharto ini hanya memberi pernyataan singkat bahwa ia akan pergi umrah dan bersenang-senang dulu.

Sementara itu, seperti dikutip *Suara Merdeka*, 29 Oktober 2006, Kepala LP Narkotika Cipinang, Wibowo Joko Harjono menyatakan, Tommy telah memenuhi syarat untuk memperoleh status bebas bersyarat. Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan diatur bahwa untuk

mendapatkan pembebasan bersyarat, napi harus menjalani masa pidana sekurang-kurangnya dua per tiga dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Selain itu, napi yang mendapatkan pembebasan bersyarat itu juga tercatat berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya sembilan bulan terakhir dihitung sebelum tanggal habisnya dua per tiga masa pidana.

Pada tahun 2002, PN Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun terhadap Tommy Soeharto karena terbukti melakukan empat tindak pidana yaitu kepemilikan senjata api dan amunisi, pembunuhan berencana terhadap Hakim Agung Syafuddin Kartasasmita dan sengaja melarikan diri. Pada 2005, Mahkamah Agung mengurangi hukuman itu menjadi 10 tahun.

Putra bungsu Soeharto itu ditangkap pada November tahun 2001 dan mulai menjalani pidananya di LP Batu, Nusakambangan, Jawa Tengah sejak 16 Agustus 2002 dan dipindahkan ke LP Narkotika Cipinang, Jakarta pada April 2006.

Sejak dipenjara pada tahun 2001, Tommy telah mendapatkan lima kali remisi yang totalnya mencapai 31 bulan, termasuk remisi lima bulan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini dan remisi satu



Tommy Soeharto. Bebas bersyarat.

bulan 15 hari pada Hari Raya Idul Fitri 1427 Hijriah. Dengan potongan itu, Tommy yang seharusnya bebas pada 2011, keluar dari penjara pada Oktober 2008.

Indo Pos juga memberitakan sidang gugatan Tommy yang diwakili tim pengacaranya terhadap Bank Mandiri, di hari kebebasannya, soal pencairan uang Rp 1 triliun milik PT Timor Putra Nasional yang diblokir.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Andi Samsan Nganro, pihak Tommy

menilai Bank Mandiri telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi tanggung jawabnya. Padahal seharusnya yang menyerahkan dana tersebut adalah Bank Mandiri.

Tommy menggugat Bank Mandiri dengan harapan dana Rp 1 triliun itu dapat segera dicairkan. Sementara itu, Bank Mandiri lewat Depkeu menahan pencairan uang itu karena PT Timor dinilai masih punya utang dalam program Mobnas. ■ RH

Kronologi Pidana Tommy Soeharto:

22 Juli 2000

PN Jakarta Pusat memvonis Tommy 15 tahun.

16 Agustus 2002

Tommy dipindah ke Lapas Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

6 Juni 2005

MA memotong masa hukuman Tommy dari 15 tahun menjadi 10 tahun.

3 April 2006

Tommy dipindah ke Lapas Narkotika Cipinang.

19 Agustus 2006

Masa pemidanaan Tommy resmi memasuki 2/3 dari total hukuman 10 tahun yang harus dijalannya.

25 September 2006

Menkum HAM Hamid Awaluddin

menegaskan penundaan pembebasan bersyarat Tommy setelah khawatir melukai keadilan masyarakat.

17 Oktober 2006

Ditjen Pemasarakatan Pusat memutuskan bahwa pembebasan bersyarat Tommy disetujui dan langsung dikeluarkan surat keterangan pembebasan bersyarat 30 Oktober 2006. Tommy resmi keluar penjara. ■

Sang Koruptor di Televisi

Penayangan wajah para koruptor di televisi diragukan efektivitasnya oleh sejumlah kalangan. Hal ini terkait dengan program penayangan sejumlah koruptor yang buron yang diprakarsai Kejaksaan Agung.

Kejaksanaan Agung sendiri telah mengumumkan 14 nama koruptor yang putusan hukuman pidananya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan saat ini dinyatakan buron. Bahkan, Selasa, (17/10), Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh sudah menunjukkan wajah Sudjiono Timan, mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, untuk dipublikasikan.

Koruptor yang akan segera diumumkan menyusul Sudjiono Timan antara lain Samadikun Hartono (mantan Komisariss Utama Bank Modern), Adrian Kiki Ariawan (mantan Direktur Utama Bank

Surya), Nader Thaher (mantan Direktur Utama PT Siak Jamrud Pusako) dan Darmono K. Lawi (mantan Ketua DPRD Banten).

Kompas, 23 Oktober 2006, mengutip pendapat Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Hasril Hertanto, bahwa penayangan wajah koruptor di televisi bisa menjadi terapikejut bagi koruptor buron. Di sisi lain, perlu sosialisasi yang intensif kepada masyarakat.

Contohnya seperti cara kepolisian mengumumkan wajah Noordin M. Top dan Dr Azahari, dua teroris asal negeri jiran. Menurut Hasril, cara polisi memasang wajah kedua buronan dalam wujud asli maupun rekayasa di sejumlah tempat publik justru lebih baik.

Cara itu memang butuh biaya lebih banyak dan lebih efektif. Biayanya bahkan bisa diambil dari anggaran pena-



Kejaksaan Agung mengimbangi kelihaihan para koruptor buron.

nganan perkara korupsi.

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, yang akrab disapa Arman, memang pernah menyampaikan, usaha kejaksaan mengumumkan wajah dan identitas para koruptor yang

buron itu dilakukan untuk mengimbangi langkah para koruptor yang lihai. Mereka kerap melakukan operasi plastik untuk mengubah ciri-ciri khusus di tubuh atau wajah mereka. ■ RH



Daan Dimara tampaknya sudah kadung kesal pada Hamid Awaluddin, mantan rekannya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini menjabat Menteri Hukum dan HAM.

Seperti dilaporkan *Indo Pos*, 23 Oktober 2006, ia menyatakan menutup pintu dialog seperti yang diinginkan

Daan Menolak Hamid

kan pihak Hamid Awaluddin. Menurutnya, tidak perlu ada pembicaraan di luar pengadilan lagi. Ia menginginkan proses hukum yang berjalan.

Ia juga tidak akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya soal dugaan kesaksian palsu Hamid dalam sidang Tipikor, 25 Juli lalu. Namun demikian, ia tidak menutup jalur dialog dalam kasus sumpah palsu, jika difasilitasi Presiden. Menurutnya, Presiden memiliki wewenang untuk memberikan amnesti dan mengurangi hukumannya.

Selain merasa dialog de-

ngan Hamid tidak berguna lagi, Daan mengaku tersinggung dengan pernyataan pengacara Hamid, Amir Syamsuddin, yang disampaikan kepada media, Jumat (20/10). Pengacara Hamid menganggap pernyataan-pernyataan Daan selama ini membodohi dan menyesatkan publik.

Menurut versi Amir, Hamid tidak bertanggung jawab terhadap pengadaan segel. Keberadaan Hamid dalam rapat 4 Juli 2004 dianggap tidak terbukti, meski lima saksi mengatakan Hamid memimpin rapat dan me-

entukan harga segel.

Amir menekankan adanya perbedaan keterangan antara lima orang saksi tersebut dengan kesaksian Hamid, Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, anggota KPU Mulyana W. Kusumah dan Wakil Sekjen KPU Sasongko.

Namun Daan berkilah, wajar jika Nazaruddin tidak mengaku. Sementara, Mulyana memang tidak tahu soal itu.

Daan terbukti bersalah dalam kasus pengadaan segel Pemilu legislatif. Ia divonis penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. ■ RH

Mira Lesmana Perempuan di Balik Layar Perak

Untuk pertama kalinya ia merayakan Hari Lebaran di negeri orang. Risikonya sebagai insan film.

Lebaran tahun ini benar-benar berbeda bagi Mira Lesmana. Perempuan yang dikenal sebagai produser dan sutradara ini tidak bisa merayakannya bersama keluarganya. Suaminya, aktor Mathias Muchus dan kedua anaknya, Galih dan Kafka, juga harus rela ditinggal orang yang mereka cintai demi tanggung jawabnya terhadap pekerjaan. "Ini sebenarnya salah manajemen waktu," keluhnya, seperti dimuat *Kompas*, 23 Oktober 2006.

Di hari yang fitri itu, Mira berada di Jepang untuk menghadiri Tokyo International Film Festival (TIFF). Ia tidak menyangka, kehadirannya di TIFF dalam rangka Tokyo Project Gathering untuk mempresentasikan film *Babi Buta yang Ingin Terbang* kepada calon sponsor dan distributor, diperlukan sebelum Lebaran. Di Tokyo, ia juga menghadiri pemutaran film *Garasi*, yang ikut kompetisi kategori Winds of Asia.

Sebelumnya, ia dan Mathias Muchus sempat berencana berlebaran bersama di Tokyo. Namun melihat padatnya jadwal kerja di sana, ia merasa percuma memboyong keluarganya ke sana. Salah satu siasatnya untuk memunahkan rasa kangen pada suami dan kedua anaknya adalah dengan membeli ponsel 3 G. Sehingga saat bertelepon, ia bisa melihat wajah keluarganya, begitu juga sebaliknya.

Mira memang dikenal pekerja keras dan berdedikasi tinggi. Bicara tentang kebangkitan perfilman Indonesia, berarti juga membicarakan Mira Lesmana. Bersama Nan Achnas, Riri Riza, dan Riza Mantovani, kelahiran Jakarta 8 Agustus 1964 ini membuat film *Kuldesak* (1998), yang tahun lalu diputar di Festival Film Internasional Pusan di program New Indonesian Generation.

Film layar lebar semacam *Petualangan Sherina* (2000) dan *Ada Apa dengan Cinta* (2002) yang diproduserinya juga menunjukkan animo penonton yang tidak pernah terbayangkan pernah terjadi di masa sebelumnya, hampir dua juta jiwa.

Mira mendirikan Miles Productions pada tahun 1995, yang kemudian, tonggak Gerakan



Mira Lesmana

Film Indonesia Baru. Saat ia menggarap film *Gie*, banyak pihak memberikan tanggapan positif, meskipun film itu belum selesai.

Ia mengakui, *Gie* adalah film besar, dari segi produksi, ide, biaya, dan waktu. Persiapannya dilakukan sejak 2002, dan baru selesai 2004. Dari generasi baru perfilman kita, ini memang film yang terbesar.

Cinta dunia film

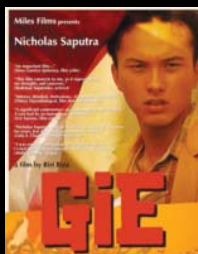
Lahir dalam lingkungan musisi, puteri dedengkot jazz almarhum Jack Lesmana ini justru diberi kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Meski setiap hari ia melihat para musisi berseliweran 24 jam di rumahnya, Mira hanya menganggap musik hanya sebagai kesenangan saja. Apalagi, ia melihat bakat musik adiknya, Indra Lesmana, yang begitu menakjubkan sejak mereka masih kecil. Ia lebih yakin, bahwa musik bukan tempat untuknya.

Sebaliknya, sejak kecil ia suka sekali menonton film. Kenangan masa kecilnya meliputi menonton bioskop bersama orngtuanya dan makan es krim setelahnya. Di rumah, mereka juga biasa menonton televisi bersama-sama dan mendiskusikan yang mereka tonton itu.

Meski tidak ingin menjadi musisi seperti ayah dan adiknya, awalnya Mira dikenal sebagai pencipta lirik lagu yang dinyanyikan Indra Lesmana dan Titi DJ. Lagu karyanya yang sempat terkenal adalah *Aku Ingin* yang dibawakan Indra dan *Ekspres* yang dibawakan Titi.

Lulusan Institut Kesenian Jakarta jurusan penyutradaraan ini kini mengaku lebih *enjoy* sebagai produser. Menurutnya, begitu banyak sutradara berbakat yang saat ini ada di dunia perfilman Indonesia, namun sangat sedikit produser yang ada. Karena itu, ia memilih menjadi produser bagi mereka.

Baginya tak penting menjadi produser atau sutradara. Yang penting adalah ia bisa mencipta. Menghasilkan sebuah film yang bisa dinikmati banyak orang merupakan kepuasan batinnya. ■ RH



Produser - filmography

1. *Garasi* (2006) (produser)
2. *Untuk Rena* (2005) (produser)
3. *Gie* (2005) (produser)
4. *The Year of Living Vicariously* (2005) (produser eksekutif)
5. *Rumah Ketujuh* (2003) (produser)
6. *Eliana, Eliana* (2002) (co-produser)
7. *Ada apa dengan cinta?* (2002) (produser)
8. *Petualangan Sherina* (2000) (produser)
9. *Ceh Kucak Gayo* (1995) (co-produser)

Sutradara-filmography

- Kuldesak* (1999)

Sepak Bola ke AG 2006 Tanpa Target

Cabang olahraga sepakbola akhirnya ikut diberangkatkan ke Asian Games (AG) 2006 di Doha, Qatar, Desember mendatang. Bersama 19 cabang olahraga lainnya. Sedangkan cabang atletik terpaksa dicoret karena dianggap tidak siap.

Walau tanpa target perolehan medali, ada pertimbangan khusus mengikutkan tim sepakbola yang sudah empat kali absen di even olahraga tingkat Asia itu. Terakhir sepakbola Indonesia tampil dan menjadi empat besar di Asian Games Seoul 1986.

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi Tim Monitoring Menpora dan KONI Pusat di Jakarta, Kamis (2/11) lalu. Ke-19 cabang olahraga lainnya adalah bulu tangkis, karate, layar, bowling, voli pantai, balap sepeda, taekwondo, catur, angkat besi, kano, rowing, wushu, panahan, sepak takraw, tenis, judo, bina raga, biliard dan berkuda.

"Kita tetap berpegang pada prinsip, cabang-cabang yang dikirim ke AG minimal bisa masuk empat besar, kecuali sepak bola dengan pertimbangan khusus. Atletik kita anggap tidak mampu," ujar Ketua Umum KONI Pusat Agung Gumelar.

Ada dua alasan sepakbola diikutsertakan. Pertama, Indonesia bakal menjadi tuan rumah Piala Asia 2007. Kedua, permintaan AFC (Federasi Sepak Bola Asia) karena Indonesia sudah empat kali tidak mengirimkan tim nasionalnya ke AG. Yang akan tampil di AG adalah Timnas U-23 tahun (Timnas U-23). Tim ini sejak Juni berlatih di Belanda di bawah asuhan pelatih Foppe de Haan. Tim ini pula yang dipersiapkan ke Sea Games 2007.

Menpora Adhyaksa Dault mengakui beberapa cabang olahraga diberi toleransi. Namun ini merupakan yang terakhir kali diberikan. Tahun 2007 toleransi itu tidak ada lagi. Prioritas hanya diberikan untuk cabang yang berangkat untuk menang atau *training to win*. Dia berharap semua atlet berjuang habis-habisan. Bagi peraih medali emas dijanjikan mendapat hadiah sebuah rumah. ■ SP



Hayden Juara Dunia Sejati

Nicky Hayden juara sejati

Dominasi Valentino Rossi di kelas balap motor dunia berakhir. Kesalahannya memberi berkah kepada Nicky Hayden muncul sebagai juara.

Nicky Hayden menunjukkan jati dirinya sebagai pembalap sejati. Dalam posisi tertinggal di klasemen dan posisi start, pembalap Repsol Honda dari Amerika Serikat ini tak putus asa. Apalagi hampir semua orang lebih menjagokan saingannya, Valentino Rossi. Pembalap Italia itu diprediksi akan memenangkan lomba dan meraih gelar dunia untuk kali kedelapan (termasuk kelas 125 dan 250 cc) dalam MotoGP 2006 di Sirkuit Valencia, Spanyol, Minggu (29/10) lalu.

Memang tak banyak yang berani menjagokan Hayden. Karena pembalap kelahiran Owensboro, Kentucky, 30 Juli 1981 ini bukan tipe pembalap yang luar biasa dan sering menang. Seperti diberitakan *Indo Pos* (30/10), perjalanan karir Hayden memang tidak spektakuler. Pada 15 lomba pertama, dia merupakan satu-satunya pembalap yang meraih poin di setiap lomba. Namun dia hanya menang dua kali. Bahkan sepanjang karirnya yang dimulai tahun 2003 lalu, dia total baru menang tiga kali. Bahwa dia memimpin klasemen, itu karena Valentino Rossi beberapa kali mengalami nasib sial, seperti mengalami kerusakan motor.

Usai lomba ke-16 di Portugal pertengahan Oktober, banyak pihak yang meragukan Hayden. Dia kehilangan posisinya di puncak klasemen setelah ditabrak sesama penunggang Repsol Honda, Dani Pedrosa. Sehingga saat memasuki GP Valencia dia tertinggal 8 poin (236 -244) di belakang Rossi.

Namun bencana Portugal ini tak membuat Hayden patah semangat. Kendati mengaku kecewa, dia tetap bertekad meraih gelar ini dengan upaya sendiri, meraih kemenangan di lintasan.

Di babak kualifikasi Hayden menempati posisi start kelima. Sementara Rossi

meraih *pole position*. Di posisi kedua dan ketiga ada pasangan Ducati Marlboro, Troy Bayliss dan Loris Capirossi yang melaju cepat luar biasa. Sehingga wajar jika orang menganggap gelar bakal jatuh lagi ke pelukan Rossi.

Namun kenyataan berkata lain. Saat lomba, dewi fortuna nyatanya berpihak kepada Hayden. Perebutan gelar secara efektif sudah berakhir pada laps kelima. Saat itu Valentino Rossi membuat kesalahan dan terjatuh. Praktis setelah itu Hayden hanya perlu menjaga posisi di urutan tiga besar. Tak perlu mengambil resiko terlalu besar dalam mengejar kemenangan dalam lomba yang berlangsung 30 laps itu.

Begitu mencapai finis, dia pun menjadi seorang juara sejati. Hayden kemudian melakukan *victory laps* sambil membawa bendera AS. Sementara Rossi yang mencoba kembali bangkit dan menaiki Camel Yamaha-nya tak kuasa mengejar pembalap lain di depannya. Dia hanya mampu finis di urutan ke-13.

"Dipanggil dengan sebutan *Champion* rasanya menyenangkan sekali. Saya pikir gelar ini telah hilang di Portugal. Tapi kemudian ini (menjadi juara) terjadi," ujarnya ceria sesuai pertandingan.

Hayden masuk ke kancah MotoGP pada tahun 2003. Di tahun pertama itu ia dianugerahi sebagai pendatang baru terbaik dan menempati posisi kelima klasemen akhir. Kemenangan pertama Hayden di lomba MotoGP terjadi tahun lalu di Laguna Seca, AS. Pada musim ini Hayden mengantongi dua kemenangan, yakni di Laguna Seca dan di Catalonia.

Selain sukses mematahkan dominasi Rossi, Hayden menjadi pembalap AS pertama yang menjadi juara dunia setelah Kenny Robert Jr merajai kelas tertingi 500 cc pada tahun 2000. ■ SP



Tempat Anda Membeli

MAJALAH TokohINDONESIA

MAJALAH BERBASIS WEBSITE TOKOH INDONESIA

Distributor Toko Buku:

PT CENTRAL KUMALA SAKTI

Komplek Green Ville Blok BG No.67 Jakarta Telp. (021) 5640185, 5658088

- **TB. GRAMEDIA** ■ Taman Anggrek Mall ■ Citraland Mall ■ Pondok Indah Mall ■ Mega Mall, Pluit ■ Hero Gatot Subroto ■ Melawai ■ Matraman ■ Kelapa Gading Mall ■ Cempaka Mas ■ Pintu Air ■ Gajah Mada ■ Cinere Mall ■ Metropolitan Mall, Bekasi ■ Bintaro Plaza ■ Mahkota Mas, Tangerang ■ Karawachi Mall, Tangerang ■ Daan Mogot Mall, Tangerang
- **TB. GUNUNG AGUNG** ■ Taman Anggrek Mall ■ Pondok Gede ■ Blok M Plaza ■ Kwitang 6 ■ Kwitang 38 ■ Blok M Plaza ■ Kramat Jati Indah ■ Atrium Plaza ■ Tambun ■ Jl. Ir. Juanda, Bekasi ■ Arion Plaza ■ Depok Plaza ■ Citraland Mall ■ Sunter Mall ■ Hero Tendeand ■ Trisakti
- **TB. GUNUNG MULIA** ■ Jalan Kwitang

OFFICE, HOTEL, MALL, DLL

- Ambassador Mall ■ Ranch Market, Kb. Jeruk ■ Cimone ■ Drug Store Hotel Sentral, Pramuka ■ Drug Store Hotel Sheraton, Gunung Sahari ■ Drug Store Hotel Maharaja, Tendeand ■ Drug Store Hotel Century, Sudirman ■ Drug Store Hotel Menteng I ■ Drug Store Hotel Mega Matra, Matraman ■ Drug Store Hotel Menteng II ■ Drug Store Hotel Paninsula ■ Drug Store Hotel Ibis, Slipi ■ Drug Store Hotel Santika ■ Iana Drug Store Hotel Grand Melia, Rasuna Said ■ Anais Gift Hotel JW Marriot, Mega Kuningan ■ Drug Store Hotel Akasia ■ Drug Store Hotel Sahid Jaya ■ Drug Store Hotel Kristal ■ Drug Store Hotel Ambara ■ Hotel Classic, Jl. Samanhudi ■ Hotel Mulia Senayan ■ Drug Store Hotel Beautique, Depan Mall Taman Anggrek Grogol ■ Mini Market Angkur 26, Jl. Angkur 26 Kayu Putih, Jakarta ■ Mini Market Ikhtiar, Jl. Utan Kayu No.91, Jakarta ■ PT Promexx, Toko Buku & Alat Tulis, Jl. Ir. Juanda ■ Kantin Permata, Gedung Plaza Permata Thamrin ■ Koperasi Wisma Bumi Putera, Sudirman ■ Bon's Café, Gedung Menara Mulia, Gatot Subroto ■ Tower Corner Gedung Graha Niaga, Sudirman ■ Mini Market Alamanda, Menara Dea K, Mega Kuningan ■ Esca Deli BEJ, Tower II ■ Koperasi Wisma Indomobil, Jl. MT Haryono Kav.8 ■ Koperasi Agape, Jl. MT Haryono Kav.04-05 ■ Tutik Mini Market, Jl. Siaga Raya Pejaten ■ Kopkar LIA, Kampus LIA Pengadegan ■ Mini Market Markaz, Jl. Radio Dalam Raya No.50 ■ Koperasi STIE Perbanas, Rasuna Said ■ Kopkar Wisma Kodel, Rasuna Said ■ Restoran Bona Petit Gedung Wisma Budi, Rasuna Said ■ Mini Market Basement Gedung Wisma 77 ■ Monika Mini Market, Gedung Wisma Adhi Graha ■ Hotel Fm Beautique, Jl. S Parman ■ Kantin BNI Kantor Pusat Sudirman ■ Cafeteria Elektrika, Rasuna Said ■ Kantin Depkes, Rasuna Said ■ Koperasi Depnaker RI, Gatot Subroto ■ PT Global Bisnis Center Bank Danamon, Sudirman ■ Mini Market Ananda, Rawa Sari ■ Lobby Drug Store Apartemen Kusuma Candra SCBD ■ Counter Majalah Wisma BCA, Sudirman ■ Swalayan Al Maidah ■ Drug Store Hotel Bina Sentra (Bidakara), Pancoran ■ Wartel Putra, Pulo Mas Utara ■ Menara Jamsostek, Gatot Subroto Lt.2 ■ Don's Mart ■ Valentine's Mart ■ Hotel Kemang ■ Hotel Millenium ■ Apartemen Mediterania Palace Kemayoran ■ Graha Surya Internusa, Rasuna Said ■ Hotel The Park Lane, Casablanca ■ Gedung Trans TV & Mega Bank

Distributor Agen:

- **KEDARTON AGENCY:** Stasiun Senen, Jakarta Telp. 021-9119176
- **AGEN UTAMA:** ■ KPA, Terminal Senen, Tlp. 42877451 ■ MARLIN, Stasiun KA Senen, 08129956840 ■ HARIAN JAYA, Cawang, 08128309471 ■ ANTO'S, Kalimalang, 08129256715
- DAVID OXTO, Stasiun KA Senen, 9119180 ■ PURBA ST., Stasiun KA Senen, 0816974343
- TAMORA, Stasiun KA Senen, 9119175 ■ ARITONANG, Budi Utomo, 9220669 ■ RAE LMAN, Budi Utomo, 9238167 ■ SIHITE, Budi Utomo, 9214526 ■ PURBA K, Kuningan, 5264955 ■ NAIBAHO, Cawang, 8577453 ■ SIMATUPANG, Cililitan, 80880572 ■ SIMALUNGUN, Kramat, 88980567 ■ MILLU, Blok M, 7200669 ■ BERLIAN, Pramuka ■ KA GROUP, Bekasi, 08129825236 ■ MANULLANG, Cimone, 08129590050 ■ YULIANI, Medan, 061-4157471 ■ MEDY, Surabaya, 031-83205231

Atau Hubungi:

- **BAGIAN SIRKULASI** ■ E-mail: sirkulasi@tokohindonesia.com
- **JAKARTA** Tel: 021-83701736 Fax: 021-9101871 ■ **BIRO BANDUNG** 022-7830773 ■ **BIRO MEDAN** 061-7850260

TokohINDONESIA Majalah Biografi Pertama dan Satu-satunya di Indonesia

The Excellent Biography

www.tokohindonesia.com

THE EXPERIENCE SITE